



BAGIAN PERTAMA

TEORI DAN PANDANGAN TENANG EKONOMI PEMBANGUNAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





BAB I PEMBANGUNAN EKONOMI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi pembangunan (*economics of development*) adalah ilmu ekonomi yang mempelajari transformasi struktural dan kelembagaan dari seluruh masyarakat yang pada hakekatnya akan menghasilkan kemajuan ekonomi secara efisien bagi sebagian besar penduduk. Ilmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Hasil ekonomi pembangunan diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Adanya pembangunan ekonomi (*economic of development*) akan terjadi pertumbuhan ekonomi yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan menyangkut perkembangan berdimensi tunggal diukur dengan meningkatnya produksi dan pendapatan. Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita masyarakat.

A. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi (*economic of development*) adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan mempunyai arti yang sangat luas, dimana tujuannya adalah peningkatan produksi. Jadi pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan. Pembangunan ekonomi juga merupakan pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi merupakan peningkatan produksi secara kuantitatif yang prosesnya mencakup perubahan pada komposisi produksi,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumberdaya produksi (*productive resources*) diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola pembagian (distribusi) kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang mencakup sekurang-kurangnya dua generasi dalam kehidupan bangsa (50-60 tahun). Selama proses pembangunan, tata ekonominya mencapai suatu tahap kegiatan yang di dalamnya perkembangan ekonomi dapat berlangsung secara kontiniu ke arah kemajuan berdasarkan kekuatan-kekuatan yang sudah terpupuk dalam masyarakatnya sendiri (Sumitro Djojohadikusumo, 1994).

1. Munculnya Kebutuhan Akan Pembangunan Ekonomi

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* telah meletakkan dasar-dasar tentang ekonomi, dan kemudian dilanjutkan oleh para pengikutnya mengenai perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ada negara-negara yang pesat perkembangan ekonominya, tetapi ada juga yang mengalami kemacetan dalam pembangunan ekonomi.

Jika ditinjau dari sudut ekonomi atau tingkat kehidupan ekonomi, maka secara garis besarnya negara-negara di dunia ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu: *Pertama*, negara-negara yang telah maju perekonomiannya, disebut negara-negara yang maju (*developed countries*). *Kedua*, negara-negara yang belum maju atau terbelakang perekonomiannya, disebut: negara-negara terbelakang atau negara dunia ketiga (*underdeveloped countries*) atau negara-negara yang sedang berkembang (*developing countries*).

Ragnar Nurse, membedakan tiga golongan atau tingkatan ekonomi negara yaitu: 1) Negara yang berpendapatan tinggi (*high income countries*) seperti, Amerika, Canada, Australia, Jepang; 2) Negara yang berpendapatan menengah (*middle income countries*); dan 3) Negara-negara yang berpendapatan rendah (*low income countries*).



Setiap negara di dunia ini selalu mengadakan pembangunan baik pembangunan yang direncanakan maupun pembangunan yang terbentuk karena kebutuhan pasar. Jadi pembangunan ekonomi dilakukan oleh semua negara, baik negara yang relatif sudah maju maupun negara yang belum maju. Ada beberapa alasan mengapa muncul pembangunan ekonomi, antara lain: 1) Adanya kenyataan bahwa suatu negara pendapatan nasionalnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Dari sisi lain ada negara yang mempunyai sisa pendapatan untuk investasi guna menaikkan standar kehidupan masyarakatnya; 2) Adanya perbedaan tingkat hidup antara negara yang satu dengan negara yang lain, perbedaan ini semakin besar; 3) Adanya keinginan dari negara untuk berkembang yang selama ini disadari tingkat hidupnya yang rendah. Mereka menghendaki tingkat hidup yang lebih tinggi melalui peningkatan kemakmuran ekonomi atau kesejahteraan.

Untuk membedakan apakah suatu negara itu negara maju atau negara yang sedang berkembang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (*approach*) yaitu: 1) dengan ukuran deskriptif dan kuantitatif; 2) dengan ukuran struktur perekonomian; dan 3) dengan ukuran distribusi pendapatan pemilik faktor produksi.

2. Manfaat Pembangunan Ekonomi

Perkembangan ekonomi dapat menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu negara akan bertambah. Di samping itu pembangunan ekonomi juga meningkatkan kesejahteraan penduduk karena pembangunan ekonomi tersebut akan menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih baik.

Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Dalam perekonomian primitif orang dipaksa bekerja keras hanya untuk memperoleh makanan guna mempertahankan hidup supaya tidak mati. Dengan pembangunan ekonomi akan tersedia barang lebih banyak untuk pemuas kebutuhan dan juga lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-senang, juga akan tersedia jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan, karena semakin banyak sarana yang tersedia. Orang dapat menolong orang lain jika kebutuhan untuk dirinya sendiri sudah terpenuhi. Adanya pembangunan ekonomi akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara yang sudah berkembang. Mengurangi ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lain, baik ketimpangan pembangunan maupun ketimpangan pendapatan per kapita masyarakat.

Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan.

3. Hambatan dalam Pembangunan Ekonomi

Pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak berjalan semudah yang dibicarakan dalam ilmu ekonomi pembangunan, sebab dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi ada hambatan-hambatan yang ditemui oleh suatu negara yang sedang membangun. Hambatan itu antara lain adalah:

a. Lingkaran Kemiskinan

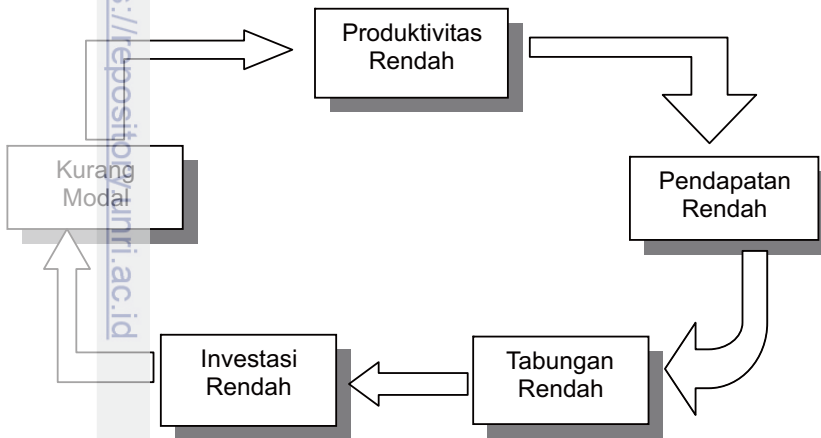
Negara terbelakang pada umumnya terjat ke dalam apa yang disebut lingkaran setan kemiskinan. Nurkse menjelaskan, lingkaran setan kemiskinan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat.

Lingkaran setan kemiskinan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat dari kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna dan keterbelakangan perekonomian. Lingkaran kemiskinan tersebut kalau dilihat dari sudut permintaan dapat dijelaskan sebagai berikut: rendahnya tingkat pendapatan nyata menyebabkan tingkat permintaan rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi rendah. Tingkat investasi rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah. Sebagai ilustrasi, pada Gambar 1.1 disajikan model terbentuknya lingkaran kemiskinan di dalam masyarakat.



Lingkaran kemiskinan itu juga dapat tercipta karena pendapatan rendah yang menyebabkan rendahnya tabungan masyarakat, akibatnya investasi rendah dan negara kekurangan modal. Karena kekurangan modal akan berdampak kepada rendahnya produktivitas.

Dari sisi lain lingkaran setan kemiskinan menyangkut dengan keterbelakangan manusia dan sumberdaya alam. Pengembangan sumberdaya alam tergantung kepada produktivitas sumberdaya manusianya. Jika penduduk terbelakang dan buta huruf, langka akan keterampilan teknik, pengetahuan dan aktivitas kewiraswastaan, maka sumber-sumber alam akan terbelakangan, kurang atau bahkan salah guna. Pada pihak lain keterbelakangan sumber alam akan menyebabkan keterbelakangan manusia.



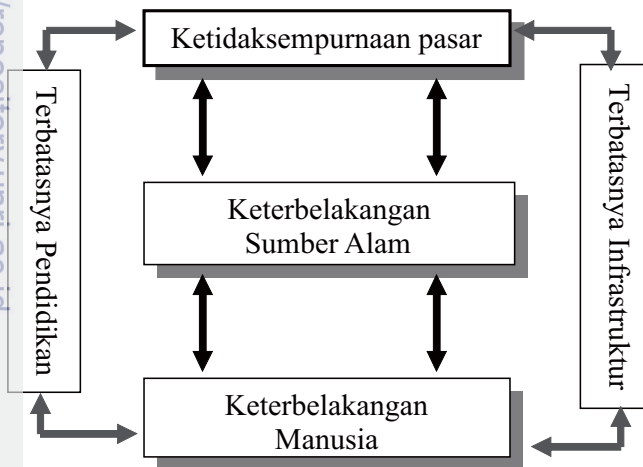
Gambar 1.1. Lingkaran Kemiskinan

Suatu masyarakat dikatakan miskin disebabkan mereka tidak dapat memperoleh pendapatan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Justru yang terjadi pendapatan mereka berimbang dengan kebutuhan hidup minimum yang seharusnya terpenuhi. Penyebab kekurangan pendapatan ini adalah mereka tidak dapat memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Sehingga secara agregat pendapatan masyarakat (negara) juga rendah. Barang kali mereka



dapat memproduksi barang dan jasa, namun keterbatasan pasar akan membatasi untuk berproduksi. Keterbatasan pasar di suatu daerah juga disebabkan karena ketidaksempurnaan pasar itu sendiri. Sebagai gambaran kaitan ketidaksempurnaan pasar dengan kemiskinan dan keterbelakangan disajikan pada Gambar 1.2.

Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi merupakan dua istilah yang sinonim. Suatu negara dikatakan miskin karena ia terbelakang. Keterbelakangan ini disebabkan lingkungan masyarakatnya miskin, terbatasnya infrastruktur terutama akses transportasi bagi mereka yang terbelakang, terlambatnya informasi bagi masyarakat tersebut, dan rendahnya tingkat pendidikan. Mereka tetap terbelakang karena tidak mempunyai sumber yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan.



Gambar 1.2. Ketidaksempurnaan Pasar dan Keterbelakangan

b. Tingkat Pembentukan Modal yang Rendah

Hambatan yang paling berat berkaitan dengan perkembangan ekonomi adalah kelangkaan modal. Hal ini bersumber dari lingkaran setan kemiskinan. Masyarakat suatu negara terbelakang tercekam oleh kemiskinan. Kebanyakan dari mereka buta huruf dan tidak terdidik, serta menggunakan peralatan modal yang sederhana dan usang. Lapangan usaha hanya bidang



pertanian pangan dan tidak banyak bersentuhan dengan perekonomian pasar. Dengan demikian produktivitas marginal mereka rendah. Produktivitas rendah menyebabkan pendapatan nyata mereka rendah, lalu tabunganpun rendah, tingkat investasi rendah, sehingga pembentukan modal juga rendah.

Kebanyakan tabungan di dalam masyarakat terbelakang dilakukan oleh kelompok berpendapatan tinggi. Tetapi tabungan itu tidak mengalir ke saluran-saluran produktif, melainkan dihabiskan untuk pembangunan rumah mewah, mobil mewah, perhiasan, permata, menimbun barang dagangan, menyimpan mata uang asing dengan maksud untuk dibungakan atau spekulasi. Jadi pengeluaran mereka mengandung nilai-nilai komsumeris dan tahan lama. Akibatnya mereka lebih suka kepada barang impor ketimbang barang yang sama tapi buatan dalam negeri. Itu semua lantaran gengsi.

c. Hambatan Sosio-budaya

Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusia, sikap sosial kondisi politik, dan latar belakang sejarah. Modal merupakan syarat yang perlu tetapi bukan syarat mutlak bagi kemajuan ekonomi suatu negara.

Sikap sosial terhadap pendidikan adalah halangan lain terhadap kemajuan ekonomi. Pendidikan akademis murni yang menyiapkan orang untuk menjabat posisi di pemerintahan atau pekerjaan lainnya disukai ketimbang pendidikan profesional. Akibatnya ada rasa anti terhadap pendidikan praktis. Hal ini yang menyebabkan terbelakangnya teknologi. Cara pandang dan kebiasaan hidup menyebabkan sosio budaya masyarakat tidak berubah. Nilai-nilai yang melekat pada budaya timur mengarah kepada stabilitas dan harmoni hidup, sedangkan ciri-ciri budaya barat mendorong kemajuan dan pengembaraan.

d. Dampak Kekuatan Internasional

Menurut para ahli ekonomi; Myint, Singer, Lewis dan Myrdal mengungkapkan, di dalam perekonomian dunia telah bermain kekuatan-kekuatan yang tidak seimbang, akibat keuntungan perdagangan lebih banyak mengalir ke negara-negara maju.

Setelah negara terbelakang membuka diri terhadap pasar dunia, ekspor meningkat secara luar biasa. Tetapi peningkatan ini tidak memberikan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

sumbangan besar kepada perkembangan perekonomian lainnya, karena sektor-sektor tersebut berkembang dengan mengabaikan sama sekali sektor perekonomian yang lain.

Hambatan lain yang menghadang negara terbelakang adalah pengaruh investasi asing. Investasi asing terutama ditujukan terhadap produksi barang ekspor. Ini cenderung merugikan perekonomian. Tingkat produktivitas, pendapatan dan tingkat kehidupan di sektor primer tidak mengalami kenaikan. Bahkan di sektor barang ekspor pun tingkat upah nyata tenaga tidak terdidik tetap rendah. Pihak asing menguras habis sejumlah besar uang dalam bentuk laba dan upah manajemen. Arus keluar laba dalam bentuk penarikan langsung, bukan dalam bentuk penarikan impor, justru membatasi kemampuan perekonomian tersebut untuk menabung secara riil.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek yakni: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita, oleh sebab itu ada dua sisi yang harus diperhatikan yakni; sisi output total (GNP) dan sisi jumlah penduduk.

Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya (Jhingan, 2007). Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu; *Pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *Kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; dan *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat.



Teori pertumbuhan ekonomi sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2000), komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat adalah; *Pertama*, akumulasi modal. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memberbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Demikian juga investasi dalam sumberdaya manusia dapat meningkatkan kualitasnya dan dengan demikian akan menghasilkan efek yang sama terhadap produksi, bahkan akan lebih besar lagi bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal dan informal akan dapat ditingkatkan lebih efektif lagi supaya dapat menghasilkan tenaga terdidik yang dapat memperbesar produktivitas.

Kedua, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja merupakan faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan penambahan penduduk yang lebih besar akan menambah luasnya pasar domestik.

Ketiga, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi bagi para ahli ekonomi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih penting. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan nilai tambah yang tinggi. Kemajuan teknologi berarti ditemukannya cara berproduksi atau perbaikan produksi.

Menurut Kuznets ada enam karakteristik proses pertumbuhan di hampir semua negara berkembang yaitu:

- ☐ Segi ekonomi agregat
 1. Laju pertumbuhan output per kapita dan penambahan penduduk yang tinggi.
 2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja.
- ☐ Segi Transformasi struktural
 1. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. Sebagian komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- pergeseran yang berangsur-angsur dari aktivitas pertanian ke non-pertanian.
 2. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi struktural ekonomi. Perubahan dalam masyarakat harus dibarengi dengan transformasi sikap, kelembagaan, dan ideologi.
 - Seiring tingkat penyebaran pertumbuhan internasional
 1. Kecenderungan negara maju perekonomiannya untuk menjangkau bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan bahan baku.
 2. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.
- Kalau disimak pendapat Jhingan (2007), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi.

a. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut, antara lain:

1) Sumberdaya Alam.

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Di negara berkembang sumber alam sering terbengkalai dan tidak diolah sama sekali karena kekurangan teknologi dan sumberdaya manusianya. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi kekayaan alam yang melimpah saja belumlah cukup. Yang terpenting pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga efisien dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Kenyataan yang ditemui terutama di negara berkembang, penguasaan sumberdaya alam lebih dominan dikelola oleh pemodal asing, hal tersebut lebih disebabkan karena negara sebagai pemilik sumberdaya alam kekurangan modal dan teknologi. Penguasaan pengelolaan sumberdaya alam oleh bangsa lain, kadang kala menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat. Konflik ini lebih banyak dipicu karena kecemburuan sosial ekonomi antara masyarakat tempatan dengan pemilik modal.



2) Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, ini disebut akumulasi atau pembentukan modal. Menurut Nurkse, pembentukan modal adalah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarah sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya. Untuk itu prosesnya mencakup tiga tahap, yakni: (a) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya; (b) keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkannya ke jalur yang dikehendaki; dan (c) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

3) Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitas. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan mengambil resiko diantara ketidakpastian. Wiraswasta bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain.

Menurut Myrdal, negara-negara Asia kekurangan wiraswastawan bukan karena mereka kekurangan modal atau bahan mentah tetapi mereka kekurangan orang yang memiliki pandangan benar terhadap kewiraswastaan. Orang Jepang memiliki hal seperti itu, maka tidak heran kalau negara Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan termasuk ke dalam kelompok negara maju.

4) Kemampuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil



dari teknik penelitian baru. Perubahan teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya.

Kuznets mencatat lima pola penting pertumbuhan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi modern, yakni: penemuan ilmiah (penyempurnaan teknologi); invensi; inovasi; penyempurnaan, dan penyebarluasan penemuan. Kuznets mengatakan inovasi terdiri dari dua macam: *Pertama*, penurunan biaya yang tidak menghasilkan perubahan apapun terhadap kualitas produk; *Kedua*, pembaharuan yang dapat menciptakan produk baru dan dapat menciptakan permintaan baru atas produk tersebut.

5) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas. Keduanya mengarah kepada ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Adam Smith menekankan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja memperbaiki kemampuan produksi buruh. Ia mampu menemukan mesin baru dan berbagai proses baru dalam berproduksi. Jika skala produksi luas, spesialisasi dan pembagian kerja akan luas pula. Akibat jika produksi naik laju pertumbuhan ekonomi akan cepat. Ekonomi eksternal akan semakin banyak tersedia dan manfaat dari investasi minimal akan berkembang. Yang dimaksud dengan investasi minimal adalah sumber tenaga, angkutan, dan sebagainya yang penggunaannya mengarah kepada kemajuan industri.

b. Faktor Non-ekonomi

Faktor non ekonomi bersama-sama dengan faktor ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Menurut Nurkse, pembangunan ekonomi berkaitan dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik, dan latar belakang historis.

1) Faktor Sosial

Faktor sosial dan budaya ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di negara terbelakang ada tradisi sosial dan budaya yang tidak menunjang perkembangan ekonomi. Kalau perkembangan ekonomi diinginkan berjalan mulus, pandangan, nilai dan lembaga sosial harus diubah. Perubahan hanya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
11. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
12. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
13. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
14. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
15. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
16. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
17. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
18. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
19. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
20. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
21. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
22. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
23. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
24. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
25. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
26. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
27. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
28. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
29. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
30. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
31. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
32. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
33. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
34. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
35. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
36. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
37. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
38. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
39. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
40. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
41. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
42. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
43. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
44. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
45. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
46. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
47. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
48. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
49. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
50. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
51. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
52. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
53. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
54. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
55. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
56. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
57. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
58. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
59. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
60. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
61. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
62. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
63. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
64. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
65. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
66. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
67. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
68. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
69. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
70. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
71. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
72. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
73. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
74. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
75. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
76. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
77. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
78. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
79. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
80. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
81. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
82. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
83. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
84. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
85. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
86. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
87. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
88. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
89. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
90. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
91. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
92. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
93. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
94. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
95. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
96. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
97. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
98. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
99. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
100. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

2. Faktor Manusia

Sumberdaya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada sumberdaya manusia saja, tetapi lebih menekankan kepada efisiensi mereka. Peningkatan GNP per kapita yang begitu hebat berkaitan erat dengan pengembangan sumberdaya manusia yang dapat menciptakan efisiensi dan peningkatan produktivitas di kalangan buruh. Pembentukan modal manusia yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan.

Penggunaan secara tepat sumberdaya manusia untuk pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan cara berikut: *Pertama*, harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk. Sumberdaya manusia dapat dimanfaatkan dengan baik apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan dan diturunkan; *Kedua*, harus ada perubahan dalam pandangan tenaga buruh. Perilaku sosial dari tenaga buruh merupakan hal yang penting di dalam proses pembangunan ekonomi. Hanya tenaga buruh yang terlatih dan terdidik dengan efisien tinggi yang akan membawa masyarakat kepada pembangunan ekonomi.

3) Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup, diperlukan dalam pembangunan ekonomi.

2. Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda pentingny di dalam kehidupan perekonomian. Prof. Simon Kuznets menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern, yaitu: laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita, peningkatan produktivitas, laju perubahan struktural yang tinggi, urbanisasi, ekspansi negara maju, arus barang modal dan orang antar bangsa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

a. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Produk Per Kapita

Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi, satu sisi dapat menciptakan permintaan akan barang produksi dan dari sisi lain sebagai penawaran tenaga kerja dalam proses produksi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk itu mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil yang dihasilkannya. Apabila laju pertumbuhan penduduk dapat diimbangi oleh laju pertumbuhan produktivitas, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Tetapi apabila pertambahan penduduk lebih cepat dari pertambahan penghasilan akan menyebabkan mundurnya perekonomian, inilah yang diragukan dalam teori Malthus. Seharusnya perkembangan penduduk dapat ditekan, dan kualitas sumberdaya manusianya ditingkatkan melalui pendidikan dan keterampilan.

b. Peningkatan Produktivitas

Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Kenaikan efisiensi berarti penggunaan output yang semakin besar setiap unit input. Peningkatan produktivitas mustahil ditingkatkan tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas manusianya sebagai pengelola.

c. Laju Perubahan Struktural yang Tinggi

Kecepatan perubahan struktural di dalam pertumbuhan ekonomi modern dapat juga tergambarkan dalam perubahan distribusi tenaga kerja diantara tiga sektor utama yakni: pertanian, industri, dan jasa. Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan hukum.

d. Urbanisasi

Pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan semakin banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke daerah perkotaan. Urbanisasi pada



umumnya merupakan produk industrialisasi. Urbanisasi mempengaruhi tingkat dan struktur pengeluaran konsumen negara melalui tiga cara: *Pertama*, urbanisasi menghasilkan pembagian kerja dan spesialisasi yang semakin meningkat dan perubahan aktivitas dari berbagai usaha keluarga dari tidak berorientasi pasar menjadi usaha yang berorientasi pasar; *Kedua*, urbanisasi membuat biaya pemenuhan sejumlah kebutuhan menjadi semakin mahal. Hal ini disebabkan karena kehidupan kota semakin mahal dibandingkan dengan kehidupan desa. Seperti, perumahan, kebersihan, air, angkutan dalam dan antar kota, dan fasilitas lainnya; *Ketiga, demonstration effect*, kehidupan kota mendorong kelompok urbanis meniru pola konsumsi orang kota sehingga menyebabkan meningkatnya pengeluaran konsumen.

Ekspansi Negara Maju

Ekspansi negara-negara maju yang bermula dari bangsa Eropa tidak lain adalah akibat revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Hal ini melahirkan dominasi politik terhadap negara jajahan. Dari sisi lain negara sasaran mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap negara lain. Ketergantungan ini lebih banyak disebabkan kurangnya sumberdaya manusia berkualitas sehingga penguasaan teknologi sangat rendah.

1. Arus Barang, Modal, dan Orang antar Bangsa

Arus barang, modal dan orang antar bangsa dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu negarapun yang bisa memenuhi kebutuhan bangsanya dengan semata-mata hasil produksinya. Arus barang komoditi merupakan unsur yang dominan untuk ekspansi keluar dari negara maju. Begitu juga dengan kekurangan modal suatu negara akan menyebabkan mengalirnya investasi dari negara kaya ke negara berkembang dan diikuti dengan aliran migrasi sebagai pembawa ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Perhatian Negara Maju pada Negara Berkembang

Negara-negara yang relatif sudah maju, disamping mengusahakan dirinya untuk berkembang, juga menaruh perhatian terhadap negara yang sedang berkembang. Ini disebabkan karena adanya ketergantungan suatu negara



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

ke negara lain. Ketergantungan ini menyangkut dengan ekonomi negara yang bersangkutan, seperti masalah ekonomi secara global. Apabila ekonomi suatu negara dalam keadaan tidak stabil atau pendapatan per kapitanya rendah, tentu saja akan mempengaruhi pasar produk negara yang sudah maju, dari sisi lain juga akan mempengaruhi ekonomi secara menyeluruh.

Alasan mengapa negara maju memperhatikan pembangunan di negara yang sedang berkembang, antara lain: 1) Bersifat politis, yaitu mencegah masuknya pengaruh dari blok lain; 2) Bersifat ekonomis, yaitu untuk memperluas perdagangan internasional; 3) Bersifat perikemanusiaan.

Suatu negara ikut memperhatikan negara lain (khususnya negara berkembang) disebabkan adanya unsur politis. Memberikan perhatian khusus kepada negara tersebut lebih disebabkan supaya kebijakan dalam negara yang dibantu bisa menjalin hubungan yang baik dengan negara yang membantu. Hal tersebut terkait supaya negara yang bersangkutan juga membantu negara maju dalam pengampilan keputusan, terutama kebijakan internasional. Disamping itu faktor lain juga terkait dengan perdagangan, terutama perdagangan senjata.

Banyak negara maju memberikan bantuan kepada negara berkembang, terutama untuk Indonesia lebih disebabkan adanya unsur ekonomi. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak, dan penduduk ini merupakan potensi ekonomi baik sumberdaya manusianya maupun potensi pasar. Penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi produk suatu negara. Jika penduduknya sejahtera dengan meningkatnya pendapatan per kapita, maka daya beli meningkat. Hal tersebut akan menimbulkan permintaan terhadap barang. Kondisi ini dimanfaatkan oleh negara maju untuk merebut pasar di negara berkembang.

Terlambatnya pembangunan ekonomi pada suatu negara, menyebabkan negara maju ikut memperhatikan. Hal tersebut bukan saja disebabkan faktor ekonomi dan potensi pasar, tetapi lebih disebabkan karena nilai kemanusiaan. Pertumbuhan ekonomi yang lambat menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesehatan yang rendah, tidak memadainya pasar, keterbelangan karena mutu pendidikan yang rendah. Negara maju merasa terpenggil untuk membantu baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bantuan jangka panjang berupa pembangunan sumberdaya



manusia melalui biaya siswa dan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan. Bantuan jangka pendek lebih banyak pada kondisi darurat saat terjadinya bencana yang menimbulkan banyak korban.

Dari ketiga alasan memberikan bantuan oleh negara maju, secara sinergi dalam jangka panjang berdampak terhadap ekonomi dunia maupun ekonomi negara donor. Kesejahteraan bagi suatu negara merupakan potensi pasar bagi negara lain. Alasan tersebut disebabkan suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dari produksi dalam negeri saja, ketergantungan terhadap negara lain tidak bisa dihindari.

Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak saja merupakan usaha-saha negara yang belum berkembang saja, melainkan negara majupun juga memperhatikan pembangunan ekonominya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





BAB II

NEGARA BERKEMBANG DAN UPAYA PEMBANGUNANNYA

A. Ciri Negara Berkembang

Paul Hoffman melukiskan dengan jelas gambaran suatu negara yang terbelakang dalam ungkapan berikut: Setiap orang dapat memahami suatu negara terbelakang apabila ia melihatnya. Ia adalah suatu negara yang ditandai dengan kemiskinan, kota yang dipadati oleh pengemis dan penduduk desa yang sudah mencari nafkah di kampung halamannya sendiri. Ia adalah suatu negara yang jarang memiliki industri, seringkali dengan persediaan tenaga dan listrik yang tidak memadai. Negara tersebut tidak memiliki jalan raya dan kereta api yang cukup, pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai, dan komunikasi yang ada biasanya buruk. Rumah sakit dan lembaga pendidikan tinggi sangat sedikit. Sebagian besar penduduk buta huruf.

Untuk lebih jelasnya ciri-ciri negara terbelakang tersebut diklasifikasikan menjadi enam golongan, antara lain: 1) Standar Hidup yang Rendah; 2) Produktivitas yang rendah; 3) Tingkat pertumbuhan penduduk beban ketergantungan yang tinggi; 4) Tingkat pengangguran yang tinggi; 5) Ketergantungan sector pertanian dan ekspor barang primer; 6) Ketergantungan yang kuat dalam hubungan internasional.

1. Standar Hidup yang Rendah

Majunya suatu golongan masyarakat disebabkan mereka bisa menangkap peluang yang harus diraih untuk memperoleh kehidupan yang baik. Bagi mereka yang hidupnya lebih baik merupakan ukuran standar kehidupan. Di negara berkembang standar hidup sebagian besar penduduknya masih rendah. Standar hidup yang rendah tersebut dimanifestasikan secara kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk pendapatan yang rendah (kemiskinan), perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah dan kurang bermutu, angka kematian bayi yang tinggi, harapan hidup yang rendah.

Dari sisi lain untuk negara yang sedang berkembang ada beberapa penyebab kenapa standar hidup penduduknya rendah, antara lain disebabkan oleh:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

a. Pendapatan Nasional Per Kapita

Pendapatan nasional bruto (GNP) per kapita biasanya dipakai sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. GNP itu dipakai sebagai ukuran aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Apabila GNP suatu negara rendah dan pertumbuhan penduduk tinggi, maka pendapatan nasional per kapita turun. Hal ini akan menyebabkan tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk menjadi lebih lamban perkembangannya.

b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah sebagai akibat dari perkembangan GNP lambat, sedangkan dari sisi lain pertumbuhan penduduk lebih laju dari GNP itu sendiri. Maka pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah tercermin dari rendahnya pendapatan per kapita dari suatu periode ke periode lain.

Kemudahan negara berkembang selama ini adalah, kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di negara bersangkutan sangat tergantung kepada sumberdaya alam yang dimiliki. Padahal bagaimanapun kayanya sumberdaya alam, jika tidak dikelola oleh sumberdaya manusia akan memberikan kontribusi yang kecil. Pengelolaan sumberdaya alam lebih banyak dikuasai oleh negara maju, sehingga kontribusi terhadap negara relatif kecil dan pengembangan sumberdaya manusianya terabaikan.

c. Distribusi Pendapatan Nasional

Semakin melebarnya kesenjangan pendapatan per kapita antara negara kaya dengan negara miskin, bukan satu-satunya manifestasi melebarnya disparitas ekonomi antara negara kaya dan miskin. Tetapi disparitas ekonomi itu sendiri juga tercipta dalam suatu negara miskin, dimana sebagian besar GNP dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita, harus dilihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk, dalam arti siapa yang menikmati hasil pembangunan tersebut.

d. Tingkat Kemiskinan

Luasnya tingkat kemiskinan pada suatu negara tergantung kepada dua faktor: (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata; (2) tingkat pemerataan dalam



distribusi. Dari kedua faktor tersebut merupakan kunci terbentuknya kemiskinan. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menjadikan kemiskinan semakin melebar. Hal ini akan menciptakan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut dapat dikurangi melalui pembangunan ekonomi padat karya. Ciri negara berkembang, kualitas sumberdaya manusianya relatif rendah. Untuk itu untuk melibatkan mereka dalam pembangunan dan upaya meningkatkan pendapatan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan mereka melalui kebijakan pembangunan padat karya. Ini berarti bukan mengabaikan pembangunan ekonomi yang padat modal dan teknologi.

Tingkat Kesehatan

Di samping penderitaan akibat pendapatan yang rendah, banyak penduduk di negara berkembang yang melawan kekurangan gizi, penyakit, kemudian mereka mati. Oleh sebab itu untuk memajukan suatu penduduk perlu diperbaiki kesehatan dan penyempurnaan gizi. Tanpa perbaikan gizi, mereka akan mudah terserang penyakit, stamina rendah, produktivitas rendah, akibatnya pendapatan riil mereka rendah. Kesehatan merupakan faktor penting untuk memacu produktivitas dalam suatu negara. Kesehatan dimulai dari perbaikan gizi. Gizi yang memadai akan membuat proses berfikir meningkat dan kualitas sumberdaya manusia juga meningkat.

Tingkat Pendidikan

Rendahnya kualitas pendidikan di negara berkembang lebih dominan disebabkan terbatasnya sumberdaya pendidikan dan kurang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. Dalam bidang pendidikan dijumpai fasilitas dan kurikulum pendidikan yang tidak relevan dan kurang memadai, tingkat kegagalan (drop out) tingkat sekolah yang tinggi dan melek huruf yang rendah. Sebagian besar sistem pendidikan di negara berkembang belum mengacu kepada kebutuhan pasar. Begitu juga untuk bidang eksakta belum didukung oleh peralatan labor yang memadai, sehingga peserta didik hanya belajar teori di dalam kelas, sedangkan implementasi dari teori itu tidak dikuasainya. Hal ini menyebabkan setiap peserta didik baik dari perguruan tinggi belum siap memasuki lapangan kerja karena tidak adanya keterampilan.

Jika diamati lebih lanjut, rendahnya kualitas pendidikan di negara berkembang juga disebabkan kualitas pendidik (guru dan dosen) yang relatif



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

rendah. Penyampaian materi masih bersifat konvensional, belum menerapkan model pembelajaran modern. Dari sisi lain pendidik juga mempunyai kemampuan dan keterampilan yang rendah. Pendidik belum memperlihatkan bahwa dia sebagai seorang yang profesional di bidangnya. Pendidik lebih banyak bersifat menyampaikan materi ke peserta didik. Tidak mempunyai kemampuan mengolah informasi. Akibatnya ukuran keberhasilan masih terbatas pada kognitif saja, belum memperlihatkan keterampilan proses.

2. Produktivitas yang Rendah

Produktivitas yang tinggi lebih disebabkan oleh pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menghasilkan tenaga terampil dan mampu memanfaatkan teknologi. Penduduk negara berkembang sangat lemah dalam penguasaan teknologi. Negara yang sedang berkembang ditandai dengan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Konsep fungsi produksi yang menghubungkan output dengan bermacam-macam kombinasi penggunaan faktor input berdasarkan teknologi tertentu seringkali digunakan untuk menjelaskan bagaimana penduduk memenuhi kebutuhannya. Tetapi secara teknis konsep fungsi produksi perlu ditambahkan dengan kemampuan manajerial, motivasi tenaga kerja, dan fleksibilitas kelembagaan yang mendukung.

Berdasarkan argumentasi tingkat produktivitas dapat dinaikkan melalui mobilitas tabungan dalam negeri dan bantuan modal asing guna meningkatkan investasi baru dalam barang-barang modal serta investasi dibidang pendidikan dan pelatihan untuk menambah keterampilan.

3. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Beban Ketergantungan yang Tinggi

Hampir semua negara terbelakang mempunyai potensi pertumbuhan penduduk yang tinggi serta dibarengi oleh tingkat kematian yang cenderung menurun. Kemajuan ilmu kedokteran telah dapat menurunkan tingkat kematian dan menaikkan tingkat kesuburan. Akibatnya pertumbuhan penduduk dalam suatu negara meningkat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan penghambat dalam pembangunan ekonomi, jika penduduk itu tidak mampu mengembangkan dirinya sebagai masyarakat mandiri.

Implikasi utama tingginya tingkat kelahiran adalah bahwa lebih dari 40 persen penduduknya terdiri dari anak-anak yang berumur kurang dari 15



lahun (kelompok usia muda). Makin banyak keluarga yang ditanggung makin kecil kesempatan bagi keluarga tersebut untuk menabung. Banyaknya usia muda dalam suatu keluarga (negara) akan menyebabkan tingginya beban ketergantungan. Rata-rata rasio beban ketergantungan di negara berkembang 1,4. Artinya setiap kepala keluarga menanggung kehidupan orang lain (istri, anak, dan anggota keluarga lainnya) minimal 4 orang. Tingginya rasio ketergantungan ini menyebabkan kemampuan membangun sumberdaya manusia rendah.

Tingkat Pengangguran yang Tinggi

Salah satu manifestasi mendasar dari faktor-faktor yang mengakibatkan rendahnya taraf hidup di negara-negara berkembang adalah kurangnya penggunaan tenaga kerja atau penggunaan tenaga kerja yang tidak efisien dibandingkan dengan negara maju. Penggunaan tenaga kerja di bawah standar dapat disebabkan karena; *Pertama*, keadaan setengah menganggur (*underemployment*) penduduk kota maupun desa yang bekerja di bawah jam kerja normal. Keadaan setengah menganggur juga meliputi mereka yang bekerja secara normal dengan waktu penuh tetapi produktivitasnya rendah sehingga pengurangan jam kerja tidak berpengaruh terhadap total output; *Kedua*, pengangguran terbuka, yakni penduduk yang mampu dan ingin bekerja tetapi tidak tersedia lapangan pekerjaan.

Di negara terbelakang sering dijumpai pengangguran dan pengangguran tersembunyi dalam jumlah besar. Pengangguran di kota membengkak akibat arus urbanisasi dan meningkatnya pendidikan. Dari sisi lain sektor industri tidak berkembang sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja sehingga memperbesar pengangguran.

5. Ketergantungan Sektor Pertanian dan Ekspor Barang Primer

Di negara berkembang duapertiga atau lebih penduduknya tinggal di pedesaan dan mata pencarian utama adalah pertanian. Alasan utama terkonsentrasinya penduduk dan produksi dalam aktivitas pertanian dan produksi primer lainnya adalah bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah prioritas pertama setiap orang adalah pangan, pakaian dan papan. Rendahnya produktivitas pertanian di negara berkembang disebabkan karena besarnya jumlah penduduk dibandingkan dengan lahan pertanian yang tersedia, juga disebabkan karena teknologi yang dipergunakan pada sektor



pertanian masih bersifat primitif, terbatasnya modal fisik dan kemampuan manusianya.

Dari sisi lain negara-negara berkembang pada umumnya lebih banyak berorientasi kepada produksi barang primer (pertanian, bahan bakar, hasil hutan, dan bahan mentah). Barang-barang primer tersebut merupakan ekspor utama ke negara lain. Dari sisi volume ekspor cukup tinggi, tapi nilai ekspornya rendah. Alhasil kontribusi sektor primer terhadap PDB juga rendah.

6. Ketergantungan yang Kuat dalam Hubungan Internasional

Biasanya negara sedang berkembang sangat berorientasi pada perdagangan luar negeri. Orientasi ini terlihat dari ekspor barang primer dan impor barang-barang konsumsi dan mesin. Terlalu tergantung pada ekspor barang primer ini akan menimbulkan dampak negatif pada perekonomian negara tersebut; *Pertama*. Perekonomian hanya terpusat pada produksi barang primer untuk ekspor, akibat sektor ekonomi lainnya terabaikan; *Kedua*, perekonomian menjadi rentan terhadap fluktuasi harga internasional barang-barang ekspor tersebut. Depresi dunia akan menjatuhkan harga dan permintaan. Akibat seluruh perekonomian terkena efek buruk; dan *Ketiga*, karena tergantung pada beberapa mata dagang ekspor, maka perekonomian akan menjadi sangat tergantung pada impor. Impor pada umumnya terdiri dari bahan bakar, bahan pabrik, matadagangan primer, alat-alat transpor dan mesin, dan bahkan makanan. Di samping itu harus diperhatikan juga pengaruh *demonstration effect* yang cenderung meningkatkan impor menjadi semakin besar.

Menurut Nurkse yang dikutip oleh Jhingan (1994), salah satu faktor penting yang memperlambat pembentukan modal di negara terbelakang adalah keinginan untuk meniru standar konsumsi mewah negara maju. Gejala ini terkenal dengan *demonstration effect*.

Akibat *demonstration effect* akan berpengaruh buruk kepada kecenderungan menabung (*propensity to save*). Pengeluaran mereka untuk konsumsi barang mewah meningkat seiring kemauan yang sudah surut untuk menabung. *Demonstration effect* akan mempersulit pemerintah untuk menggunakan keuangan negara sebagai sarana pembentukan modal. *Demonstration effect* yang menyebabkan meningkatnya permintaan akan barang impor akan melahirkan tekanan inflasioner dan ketidakseimbangan neraca pembayaran.



B. Tindakan Dalam Negeri dan Upaya-Upaya Internasional

1. Tindakan Dalam Negeri

Pertumbuhan, Kemiskinan, dan Distribusi Pendapatan

1) Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB(=GNP) dari tahun ke tahun.

Cara tahunan:

$$\Delta \text{ PDB} = \frac{\text{PDB}_2 - \text{PDB}_1}{\text{PDB}_1} \times 100 \%$$

$\Delta \text{ PDB}$ = Laju pertumbuhan ekonomi (Rate of growth)

PDB = Produk Domestik Bruto

Cara Geometri:

$$P_t = P_0 (1 + r)^n$$

P_t = PDB pada tahun ke t

P_0 = PDB pada tahun ke nol

r = pertumbuhan rata-rata per tahun

N = Waktu antara P_0 dan P_t

2) Ukuran Distribusi

Ukuran distribusi adalah ukuran yang umum dipakai oleh para ekonom. Distribusi ini menyangkut dengan segi manusia sebagai perorangan atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima. Dalam menghitung distribusi pendapatan masyarakat, terlebih dahulu mengelompokkan individu berdasarkan pendapatan perorangan dan lalu membagikannya dengan jumlah yang berbeda-beda ukurannya. Metode yang lazim dipakai adalah membagi penduduk menjadi 5 atau 10 kelompok (*quintiles*= atau *deciles*) sesuai dengan tingkatan pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterimanya oleh masing-masing kelompok dari pendapatan nasional (contoh perhitungan pada Tabel 2.1).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Ketidakmerataan pendapatan dapat diperoleh dari kolom 3, yaitu perbandingan antara pendapatan yang diterima kelompok bawah 40 % dan kelompok atas 20 % dari jumlah penduduk. Dari tabel tersebut terlihat 40 % kelompok miskin (golongan terbawah) menerima pendapatan sebesar 26,3 %, sedangkan 20 % kelompok kaya menikmati pendapatan sebesar 33 % dari total PDB. Sehingga perbandingan pendapatan antara 20 % tertinggi dengan 40 % terendah sebesar 1,26. Rasio ini sering digunakan sebagai ukuran ketidakmerataan antara dua kelompok secara ekstrem, yaitu kelompok yang sangat miskin dan kelompok yang sangat kaya.

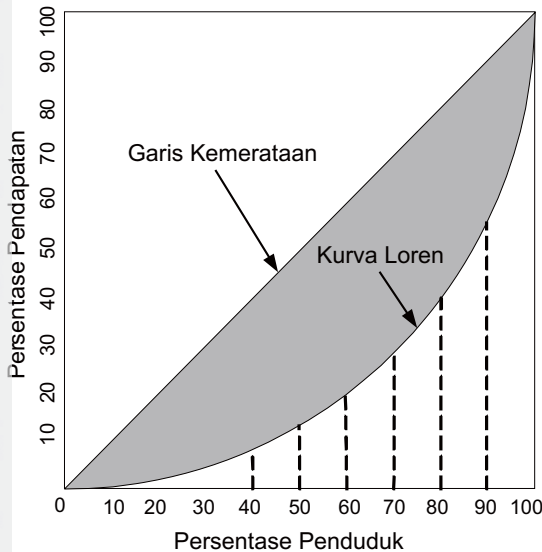
Tabel 2.1. Contoh Perhitungan Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kelompok Masyarakat di Pedesaan

Kelompok Pendapatan	Pendapatan %	Kumulatif
20 % pendapatan terendah	10.40	10.40
20 % pendapatan terendah kedua	15.90	26.30
20 % pendapatan terendah ketiga	17.91	44.21
20 % pendapatan terendah keempat	22.60	66.81
20 % pendapatan tertinggi	33.19	100.00
Jumlah	100,00	
Rasio 20% tertinggi dan 40% terendah	1,26	

3) Kurva Lorenz

Cara lain yang lazim dipakai untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan adalah dengan menggunakan Kurva *Lorenz*. Kurva *Lorenz* memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerima pendapatan dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama waktu tertentu (misalnya satu tahun).

Pada Gambar 2.1 dapat dilihat kurva *Lorenz* tersebut. Semakin jauh jarak garis kurva *Lorenz* dari garis diagonal (kemerataan sempurna) semakin tinggi tingkat ketidakmerataan.



Gambar 2.1. Kurva Lorenz

4) Ketidak Merataan

Untuk mengetahui ketidak merataan pendapatan relatif yang sangat sederhana dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva Lorenz dibagi dengan luas separoh bidang dimana kurva terletak. Rasio ini dikenal dengan Rasio Kosentrasi Gini (*Gini Ratio*).

$$GR = 1 - \sum_i^n .f_i (X_{i+1} - X_i)(Y_{i+1} + Y_i)$$

Atau

$$GR = 1 - \sum_i^n .f_i (X_{i+1} - X_i)(Y_{i+1} + Y_i)$$

GR = Angka Gini Ratio

X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas ke i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas ke i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas ke i



Pada Tebl 2.2 disajikan cara perhitungan angka Gini Ratio. Angka Gini Ratio memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat itu sendiri. Angka tersebut berkisar antara 0-1, semakin mendekati 1 maka semakin timpang pendapatan masyarakat dan sebaliknya bila mendekati 0 maka semakin merata pendapatan masyarakat.

Tabel 2.2 Perhitungan Gini Ratio di Pedesaan Tahun 2009

Persentase Penduduk (fi)	Pendapatan (%)	Kumulatif (%)	$Y_i + Y_{i-1}$	$f_i(Y_i + Y_{i-1})$
10 terendah	4.845	4.845	4.845	0.00485
10 kedua	6.425	11.270	16.115	0.01612
10 ketiga	7.403	18.673	29.944	0.02994
10 keempat	8.071	26.744	45.417	0.04542
10 kelima	8.876	35.620	62.364	0.06236
10 keenam	9.532	45.153	80.773	0.08077
10 ketujuh	10.544	55.697	100.850	0.10085
10 kedelapan	11.423	67.120	122.817	0.12282
10 kesembilan	13.606	80.725	147.845	0.14785
10 tertinggi	19.275	100.000	180.725	0.18073
	100.00			0.79170

Sumber: Almasdi Syahza (2009)

5) Tingkat Kesejahteraan

Disamping mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi melalui pengukuran ketidak merataan dan kurva Lorenz, dapat juga diukur melalui tingkat kesejahteraan yaitu:

$$G = w_1g_1 + w_2g_2 + w_3g_3 + w_4g_4 + w_5g_5$$

G = Indeks pertumbuhan kesejahteraan

w = Bobot kesejahteraan kelompok penghasilan ke i

g_i = Tingkat pertumbuhan penghasilan dari kelompok ke i

Contoh perhitungan indeks kesejahteraan masyarakat di sajikan pada Tabel 2.3. Apabila diamati Tabel 2.3 tingkat pertumbuhan indeks kesejahteraan masyarakat tahun 1995 sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan



kesejahteraan meningkat sebesar 49 persen dari periode sebelumnya. Selama periode 1995-2006 indeks kesejahteraan meningkat sebesar 0,18 atau peningkatan sebesar 18% dari periode sebelumnya. Perhitungan indeks kesejahteraan terkait kuat dengan perhitungan distribusi pendapatan.

Bel 2.3. Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan

Kelompok Pendapatan	1995		2006	
	w	g	w	G
20 % pendapatan terendah	0.0805	-0.0084	0.1513	-0.0344
20 % pendapatan terendah kedua	0.1267	0.0090	0.1946	-0.0363
20 % pendapatan terendah ketiga	0.1438	-0.0056	0.2152	-0.0321
20 % pendapatan terendah keempat	0.1955	-0.0119	0.2010	0.0097
20 % pendapatan tertinggi	0.4535	0.0167	0.2379	0.0930
Indek Pertumbuhan Kesejahteraan	0.49		0.18	

Sumber: Almasdi Syahza (2008)

b. Peranan Pertanian Dalam Pembangunan

Sumbangan atau jasa sektor pertanian pada pembangunan ekonomi terletak dalam hal; (1) menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat; (2) meningkatkan permintaan akan produk industri, dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tertier; (3) menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian terus menerus; (4) meningkatkan pendapatan desa; dan (5) memperbaiki kesejahteraan rakyat pedesaan.

Negara berkembang pada umumnya sumber kehidupan masyarakatnya sangat tergantung kepada sektor primer (perkebunan, peternakan, perikanan, tanaman pangan dan hortikultura, serta kehutanan). Sektor primer memberikan kontribusi yang kecil jika tidak diolah secara modern (pengolahan pascapanen). Apabila ekspor sektor primer meningkat, sngat berdampak pada pendapatan masyarakat pedesaan khususnya yang berusaha di sektor pertanian komoditas ekspor.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

c. Peranan Moneter dalam Pembangunan

Kebijaksanaan moneter mengacu kepada kebijaksanaan otorita moneter yang menyangkut masalah-masalah moneter. Kebijakan tersebut berkenaan dengan: (1) pengendalian lembaga keuangan; (2) pembelian dan penjualan secara aktif kertas-kertas berharga, yang tujuannya untuk mempengaruhi jumlah uang beredar; dan (3) pembelian secara pasif kertas berharga yang tujuannya untuk mempertahankan struktur tingkat bunga tertentu stabilitas harga saham.

Ciri-ciri kebijaksanaan moneter adalah; (1) pendirian dan perluasan lembaga keuangan; (2) kebijaksanaan suku bunga yang cocok; (3) manajemen utang; (4) perimbangan antara permintaan dan penawaran uang; (5) pengendalian kredit.

d. Kebijakan Fiskal dalam Pembangunan Ekonomi

Kebijaksanaan fiskal berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi atau pembangunan. Penggunaan kebijaksanaan fiskal untuk menggalakkan pembangunan ekonomi merupakan kebijaksanaan yang baru dalam ilmu ekonomi.

Tujuan kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut; (1) Untuk meningkatkan laju investasi; (2) Untuk mendorong investasi optimal secara sosial; (3) Untuk meningkatkan kesempatan kerja; (4) Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional; (5) Untuk menanggulangi inflasi; (6) Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan.

e. Kebijakan Harga dalam Pembangunan Ekonomi

Di dalam perencanaan pembangunan ketidak seimbangan antara permintaan, penawaran barang, dan faktor produksi merupakan hal yang tak terelakkan. Permintaan barang meningkat sebagai akibat meningkatnya investasi dalam skala luas sehingga menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat, atau dengan arti kata meningkatnya pendapatan dalam masyarakat. Untuk menghindari terjadinya kenaikan harga sebagai akibat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

uang yang dipegang oleh masyarakat meningkat maka pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan harga.

Tujuan kebijaksanaan harga ini tidaklah semata-mata menyangkut upaya menguasai harga atau mempertahankan kestabilan harga pada tingkat tertentu, tetapi juga menyangkut gerakan barang dan jasa baik secara umum maupun secara relatif. Berikut ini adalah tujuan dari kebijaksanaan harga, yaitu: (1) Untuk menjaga keseimbangan antara permintaan barang dan jasa; (2) Untuk menstabilkan harga barang konsumsi; (3) Untuk menciptakan fleksibilitas harga; (4) Kebijakan harga untuk barang pertanian yang tujuannya untuk menambah pendapatan masyarakat pedesaan; (5) Dapat memacu pertumbuhan ekonomi; (6) Mengatur harga barang konsumsi; (7) Mengatur harga bahan baku industri; (8) Mengatur kebijaksanaan harga dengan perusahaan; dan (9) Mengatur kebijaksanaan harga dengan tingkat upah.

Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi

Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perhatian ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi sejak Adam Smith menulis bukunya *Wealth of Nations*. Adam Smith menulis buruh tahunan setiap bangsa merupakan kekayaan yang pada mulanya memasok bangsa dengan segala kenyamanan hidup yang diperlukan. Hanya Malthus dan Ricardo yang mencanangkan tanda bahaya mengenai dampak pertumbuhan penduduk pada perekonomian. Akan tetapi kekhawatiran mereka tidak terbukti di Eropa Barat, justru pertumbuhan penduduk mempercepat industrialisasi. Berbeda di negara terbelakang, ekonominya miskin, kurang modal, sedangkan buruh melimpah. Karena itu pertumbuhan penduduk benar-benar menghambat pertumbuhan ekonomi.

Tak kalah pentingnya pertumbuhan penduduk menekan pendapatan per kapita, menurunkan standar kehidupan dan menurunkan tingkat pembentukan modal. Pengaruh pertumbuhan penduduk tersebut akan diuraikan secara ringkas berikut ini.

1) Penduduk dan Pendapatan Per Kapita

Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pendapatan per kapita biasanya tidak menguntungkan. Pertumbuhan penduduk cenderung



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

memperlambat pendapatan per kapita dalam tiga cara: (i) memperberat beban penduduk pada lahan, (ii) menaikkan biaya barang konsumsi karena faktor pendukung untuk menaikkan penawaran mereka, (iii) memerosotkan akumulasi modal, karena dengan bertambahnya anggota keluarga biaya meningkat. Setiap kenaikan output nasional diiringi oleh jumlah konsumen yang semakin besar.

2) Penduduk dan Standar Kehidupan

Karena salah satu faktor penting dalam standar kehidupan adalah pendapatan per kapita, maka faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita dalam hubungannya dengan pertumbuhan penduduk sama-sama mempengaruhi standar kehidupan. Penduduk yang meningkat dengan cepat menyebabkan permintaan akan sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Tetapi penawaran barang-barang ini tidak dapat ditingkatkan dalam jangka waktu pendek lantaran kurangnya faktor pendukung seperti bahan mentah, buruh terlatih, modal dan sebagainya.

3) Penduduk dan Pembangunan Pertanian

Di negara terbelakang kebanyakan rakyat tinggal di daerah pedesaan. Pertanian merupakan mata pencarian utama. Oleh karena itu pertambahan penduduk akan mengurangi rasio lahan dengan manusia. Tekanan penduduk pada lahan meningkat karena penawaran lahan tidak elastis. Ini menambah pengangguran tersembunyi dan mengurangi produktivitas per kapita lebih jauh. Produktivitas yang rendah mengurangi kecenderungan untuk menabung dan menginvestasi. Akibatnya pembangunan pertanian hanya terbatas pada perekonomian pangan (subsisten).

4) Penduduk dan Lapangan Kerja

Penduduk yang meningkat dengan cepat menjerumuskan perekonomian pada pengangguran dan kekurangan lapangan kerja. Karena penduduk meningkat proporsi pekerja pada penduduk total menjadi naik. Penduduk yang meningkat dengan cepat mengurangi pendapatan, tabungan dan investasi. Karenanya pembentukan modal jadi lambat dan kesempatan kerja kurang sehingga meningkatkan pengangguran.



5) Penduduk dan Overhead Sosial

Penduduk yang berbiak dengan cepat memerlukan investasi besar di bidang overhead sosial dan pengalihan sumber-sumber dari aktiva produktif dengan segera. Karena kurangnya sumber, negara tidak mungkin menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, pengobatan, transportasi dan perumahan kepada seluruh penduduk. Akibatnya kualitas pelayanan menurun. Semakin banyak penduduk yang semakin besar mengurangi kualitas diri manusia sebagai agen produktif. Kenaikan jumlah penduduk usia sekolah dan jumlah tenaga buruh ikut memperberat beban penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan memperlambat perbaikan fasilitas pendidikan.

Penduduk dan Tenaga Buruh

Tenaga buruh dalam suatu perekonomian adalah rasio antara penduduk yang bekerja dengan penduduk total. Adanya anak-anak dewasa di dalam tenaga buruh mengandung makna bahwa orang yang berpartisipasi pada pekerjaan produktif sebenarnya sedikit. Keadaan ini juga menyebabkan tingginya beban ketergantungan suatu keluarga. Pada umumnya di negara berkembang, penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan usia produktif. Begitu juga usia produktif belum tentu mereka berproduksi, karena keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia. Peluang kerja yang akan diraih mereka sangat kecil. Disamping keterampilan yang rendah, tingkat pendidikan juga rendah, sehingga daya saing untuk meraih pekerjaan sangat kecil. Akibat semuanya ini mereka hanya bisa bekerja di sektor informal atau sebagai tenaga buruh dengan gaji yang relatif rendah.

7) Penduduk dan Pembentukan Modal

Pertumbuhan penduduk memperlambat pembentukan modal. Jika penduduk meningkat, pendapatan per kapita yang didapat menurun. Dengan pendapatan yang sama orang terpaksa memberi makan kepada anak-anak yang lebih banyak. Itu berarti sebagian besar pendapatan terpakai untuk pengeluaran konsumsi. Tabungan yang sudah rendah menjadi lebih rendah. Akibatnya tingkat investasi juga semakin rendah.

Kenaikan penduduk juga menyebabkan pengalihan investasi modal dari kegiatan produktif langsung pada modal overhead sosial. Penduduk yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

meningkat dengan cepat memerlukan penyediaan fasilitas dasar yang lebih banyak dalam bentuk sekolah, jalan raya, rumah sakit, air dan sebagainya yang kesemuanya tidak menambah produk nasional secara langsung dan segera dengan akibat laju pertumbuhan perekonomian tetap rendah.

g. Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi

Penyediaan overhead sosial untuk negara yang sedang berkembang merupakan sebagian besar kegiatan pemerintah. Kebutuhan pelayanan dasar seperti jalan kereta api, transportasi, telekomunikasi, gas, listrik, alat irigasi dan sebagainya. Pelayanan tersebut harus disusun oleh pemerintah berdasarkan sistem prioritas. Tetapi pelayanan pemerintah yang paling penting dalam mendukung pembangunan ekonomi adalah : (1) Pendidikan, melalui pendidikan akan tercipta manusia yang berkualitas sebagai motor dalam pembangunan; (2) Kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat maka pemerintah harus menyediakan pelayanan berupa rumahsakit-rumahsakit, pusat kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian akan tercipta manusia yang sehat dan stamina yang baik. Pada hakekatnya akan dapat meningkatkan produktivitas penduduk; (3) Keluarga berencana, yang tujuannya adalah pengurangan angka kelahiran dan menekan tingkat kematian. Menurut Prof. Lewis, peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi mencakup: penyelenggaraan pelayanan umum, menentukan sikap, membentuk lembaga-lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumberdaya, menentukan distribusi pendapatan, mengendalikan jumlah uang, mengendalikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh, dan menentukan laju inflasi.

h. Pembangunan Pertanian

Guna meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan peranan pemerintah juga tidak dapat dihindari melalui pembangunan pertanian. Shriram Narayan mengelompokkan unsur-unsur utama dalam rencana produksi pertanian di tingkat desa: (1) pemanfaatan penuh fasilitas irigasi; (2) peningkatan daerah yang dapat panen berkali-kali; (3) perbanyak benih unggul dan pendistribusian kepada petani; (4) penyediaan pupuk melalui program pupuk buatan dan pupuk hijau; (5) penerapan praktek pertanian



yang baik serta perlindungan tanaman; (6) program pengenalan alat pertanian; (7) program pembangunan peternakan; (8) program peningkatan sayur dan buah-buahan; (9) program pengembangan padang rumput dan hutan kayu.

Kebijaksanaan Pembangunan Indonesia

Dalam perkembangan di masa depan, pembangunan negara-negara berkembang akan semakin tergantung dari kemampuannya untuk memanfaatkan sumber alamnya dalam jangka pendek dan sekaligus untuk memeliharanya dan mengamankannya secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dewasa ini sudah ada kesadaran yang meluas dikalangan masyarakat negara-negara industri maupun negara-negara berkembang bahwa pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup tidak boleh dianggap sebagai suatu dikotomi antara dua sisi kegiatan seolah-olah saling bertentangan, melainkan sebaliknya, pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan dua segi yang harus melengkapi dalam pola kebijaksanaan yang menyangkut kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Bagi Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang (Indonesia 2020) akan menghadapi tiga kelompok permasalahan mendasar, yaitu:

- ❑ Lapangan kerja produktif dan pengangguran. Masalah ini terkait dengan ketimpangan antara produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dan produktivitas di sektor sekunder (industri dan konstruksi).
- ❑ Ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.
- ❑ Ketidakseimbangan ekonomi antar daerah.

Ketiga kelompok permasalahan tersebut di atas akan dihadapi dan harus ditanggulangi di masa datang, dengan tetap mempertahankan pertumbuhan yang cukup pesat di berbagai bidang kegiatan.

2. Upaya- Upaya Internasional

a. Peranan Perdagangan Luar Negeri

Tidak ada di dunia ini suatu negara dapat memenuhi semua kebutuhan rakyatnya dengan memproduksi barang sendiri. Setiap negara selalu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

mengadakan hubungan dengan negara lain baik bersifat bilateral maupun multilateral. Oleh sebab itu peranan perdagangan luar negeri dalam menunjang pembangunan sangat menonjol. Para ahli ekonomi mengungkapkan betapa pentingnya perdagangan internasional dalam pembangunan suatu negara.

1) Pentingnya Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan Luar negeri mempunyai arti penting bagi negara yang berkembang. Dalam perdagangan akan terjadi proses pembangunan, peningkatan pengetahuan, dan pengalaman dalam pembangunan.

Haberler berpendapat "Perdagangan internasional telah memberikan sumbangan luar biasa bagi pembangunan negara kurang berkembang di abad ke-19 dan 20 dan dapat diharapkan sumbangan tersebut akan sama di masa datang".

2) Manfaat Langsung Perdagangan Luar Negeri

Dari perdagangan luar negeri, negara akan mendapat keuntungan yaitu pendapatan nasional akan naik, yang pada gilirannya akan menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan output yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan sehingga pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan. Perdagangan internasional memperluas pasaran dan merangsang investasi, pendapatan dan tabungan melalui alokasi sumberdaya dengan lebih efisien.

Menurut J.S. Mill, perluasan pasar menghasilkan sejumlah ekonomi internal dan eksternal sehingga mengurangi biaya produksi. Perdagangan luar negeri membantu mengalihkan sektor pangan (subsisten) ke sektor uang karena pasar bagi produk pertanian meningkat dan pendapatan serta standar kehidupan kaum tani meningkat.

3) Manfaat Tidak Langsung Perdagangan Luar Negeri

Manfaat tidak langsung dari perdagangan luar negeri menurut Mill adalah perdagangan internasional mendorong pemakaian mesin, mendorong penemuan dan pembaharuan, meningkatkan produktivitas buruh, menurunkan biaya dan membawa ke arah pembangunan ekonomi. Di samping itu juga mendorong persaingan yang sehat dan dapat mencegah monopoli.



Dari sisi lain perdagangan luar negeri juga dapat memberikan sumbangan berupa: *Pertama*, membantu mempertukarkan barang-barang yang mempunyai kemampuan pertumbuhan rendah dengan barang-barang yang mempunyai pertumbuhan tinggi. Komoditi pertanian ditukarkan dengan mesin-mesin pengolah, barang modal dan produk setengah jadi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi; *Kedua*, perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh mendidik. Negara yang melakukan perdagangan terutama dengan negara terbelakang akan memperoleh keterampilan dalam memproduksi barang dan meningkatkan efisiensi produksi; *Ketiga*, dapat memberikan pemasukan modal ke dalam negeri yang sedang berkembang; dan *keempat*, perdagangan luar negeri menguntungkan negara terbelakang karena meningkatkan persaingan sehat dan mengendalikan monopoli yang tidak efisien.

b. Peranan Modal Asing

Di negara yang sedang berkembang kendala mereka hadapi adalah kekurangan modal yang disebabkan rendahnya daya tabung masyarakat, sehingga pembentukan modal lambat sekali. Dalam pembangunan ekonomi negara yang sedang berkembang membutuhkan modal dari luar negeri untuk mendorong investasi di dalam negeri. Dengan demikian negara tersebut akan dapat meningkatkan produksinya, sehingga akan menaikkan pendapatan nasional.

Rendahannya kemampuan pembentukan modal akan menyebabkan negara-tersebut tidak mampu membangun industri-industri dasar dan industri-industri kunci. Untuk itu peran modal asing cukup membantu dalam pembangunan ekonomi.

Modal asing cenderung menaikkan tingkat produktivitas, pendapatan dan pekerjaan nasional yang pada gilirannya mengarah kepada upah riil buruh yang semakin tinggi serta naiknya standar kehidupan mereka. Bantuan berupa modal asing dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu;

- Investasi langsung, perusahaan dari negara penanam modal secara de facto dan de jure melakukan pengawasan atas asset (aktiva) yang ditanam di negara pengimpor modal dengan cara investasi. Invesatsi ini dpat berupa pembentukan cabang perusahaan di negara pengimpor



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

modal atau pembentukan perusahaan baru di negara pengimpor modal.

➤ Investasi tidak langsung, investasi berupa penguasaan saham yang dapat dipindahkan.

Modal asing negara, yang terdiri dari: (1) pinjaman keras bilateral; (2) pinjaman lunak bilateral; (3) pinjaman multilateral.

Dalam pemberian bantuan suatu negara ke negara yang sedang berkembang dapat dilihat dalam bentuk kriteria bantuan bersyarat dan bantuan tidak bersyarat. Bantuan bersyarat disebabkan karena pemanfaatan sumberdaya yang ada baik sumberdaya manusianya maupun sumberdaya alamnya atau bantuan yang menyangkut dengan proyek pembangunan sektor ekonomi. Sedangkan bantuan tidak bersyarat adalah berupa bantuan untuk tujuan umum atau dikenal dengan bantuan program atau nonproyek.

C. Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Keberhasilan dalam suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dan dukungan dari masyarakatnya. Setiap negara mempunyai bentuk kebijakan yang berbeda untuk memacu pembangunan ekonomi. Pada pokok bahasan ini materi yang dibahas adalah: 1) Perencanaan Ekonomi; 2) Bentuk-bentuk Perencanaan; 3) Syarat Perencanaan yang Berhasil; 4) Syarat-Syarat Umum Pembangunan Ekonomi; 5) Kesulitan dalam Pembangunan Ekonomi; 6) Pola Pengembangan Sektor Industri

1. Perencanaan Ekonomi

Prof. Robbins mendefinisikan perencanaan ekonomi sebagai pengawasan atau pengendalian secara kolektif atas seluruh kegiatan swasta di bidang produksi atau pertukaran. Sedangkan menurut Hayer, perencanaan itu berupa pengaturan kegiatan produktif oleh pemerintah pusat. Dr. Dalton, perencanaan ekonomi itu adalah pengaturan dengan sengaja oleh orang yang berwenang mengenai sumber-sumber kegiatan ekonomi ke arah tujuan yang ditetapkan.

Lewis Lordwin, perencanaan ekonomi sebagai suatu rencana perorganisasian perekonomian dimana pabrik, perusahaan, dan industri yang terpisah-pisah dianggap sebagai unit-unit terpadu dari suatu sistem tunggal dalam rangka memanfaatkan sumber yang tersedia untuk mencapai



kepuasan maksimum kebutuhan rakyat dalam waktu yang telah ditentukan. Menurut Zweig, perencanaan ekonomi mencakup perluasan fungsi penguasa negara sampai ke pengorganisasian dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Perencanaan mengandung arti dan mengarah kepemusatan perekonomian nasional.

Dickison, perencanaan sebagai pengambilan keputusan utama ekonomi tentang apa dan berapa banyak, bagaimana, bila dan dimana akan diproduksi, serta buat siapa akan dialokasikan, oleh badan pengambil keputusan yang berwenang atas dasar pengamatan yang menyeluruh terhadap sistem perekonomian sebagai satu kesatuan.

Bentuk-bentuk Perencanaan

Setiap negara melakukan pembangunan ekonomi di negaranya dengan cara yang berbeda. Negara kapitalis melakukan pembangunan tanpa perencanaan, bahkan pembangunan ekonomi dilakukan oleh kekuatan pasar, sedangkan negara hanya sebagai fasilitator dalam pembangunan. Negara sosialis melakukan pembangunan dengan menyusun perencanaan. Untuk negara berkembang, perencanaan sangat mutlak dilakukan karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Untuk membangun ekonomi dalam suatu negara, bermacam-macam cara melakukan perencanaan, antara lain:

- a. Perencanaan dengan komando (*direction*) dan perencanaan dengan ransangan (*inducement*).

Perencanaan dengan komando adalah perencanaan yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan ini merupakan integrasi dari masyarakat sosialis. Kelemahannya adalah: (1) perencanaan ini berkaitan dengan rezim birokrasi dan totaliter. Rakyat tidak dibolehkan berbelanja atau mengkonsumsi sesuai dengan selera. Bahkan hak memilih pekerjaanpun tidak ada; (2) perencanaan ini sering tidak memuaskan karena rumitnya masalah ekonomi; (3) tidak luwes, sekali perencanaan dilakukan tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya; (4) pemenuhan sasaran sesuai dengan perencanaan akan sulit; (5) timbulnya kecenderungan pemaksaan; dan (6) perencanaan yang mahal, karena memerlukan para ahli ekonomi, statistik, tenaga terlatih, dan dana yang banyak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Perencanaan dengan rangsangan. Perencanaan ini merupakan perencanaan demokratis. Perencanaan ini merupakan perencanaan manipulasi pasar. Seandainya ditemukan kelangkaan barang di pasar maka dapat dilakukan pengendalian harga dan penjatahan.
- c. Perencanaan Keuangan dan perencanaan fisik. Perencanaan keuangan merupakan kunci pokok perencanaan ekonomi. Jika keuangan tersedia dengan memadai maka sasaran fisik gampang dicapai. Dalam perencanaan keuangan pembiayaan ditetapkan dalam bentuk uang dan perkiraan dibuat atas dasar berbagai hipotesis yang menyangkut pertumbuhan pendapatan nasional, konsumsi, impor. Untuk menutup biaya tersebut melalui perpajakan, tabungan dan peningkatan penguasaan uang kas.
- d. Perencanaan fisik adalah suatu usaha untuk menjabarkan usaha pembangunan dalam arti alokasi faktor dan hasil produksi sehingga memaksimalkan pendapatan dan pekerjaan.
- e. Perencanaan Perspektif dan perencanaan tahunan. Perencanaan perspektif mengacu pada perencanaan jangka panjang dimana sasarannya ditentukan terlebih dahulu (biasanya jangka waktunya 20 sampai 30 tahun). Penjabaran perencanaan perspektif ini dalam bentuk rencana tahunan (untuk Indonesia Pelita yang dijabarkan dalam bentuk rencana tahunan).
- f. Perencanaan Kapitalisme. Perencanaan kapitalisme tidak didasarkan pada rencana yang terpusat (*central plan*). Dalam perencanaan ini alat-alat produksi dapat dimiliki secara privat. Produksi dilaksanakan oleh perusahaan swasta. Pasar memegang peranan penting, sehingga pemerintah tidak membuat perencanaan.

3. Syarat Perencanaan yang Berhasil

Untuk membuat suatu rencana dalam pembangunan ekonomi perlu diperhatikan syarat-syarat membuat suatu rencana tersebut yang diantaranya adalah:

- a. Adanya suatu komisi perencanaan yang diorganisir secara tepat yang dilakukan oleh para ahli ekonomi, statistik, sosial budaya, pendidikan dan bidang lainnya yang mendukung perencanaan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
4. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Adanya survey yang menyeluruh terhadap sumber potensial yang akan dikembangkan, dan adanya data statistik yang tepat sebagai pendukung perencanaan.

Adanya tujuan yang akan dicapai yaitu; peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan, pemusatan kekuatan ekonomi, menaikkan produksi pertanian, industrialisasi, mencapai pembangunan wilayah berimbang, mencapai swasembada dan sebagainya.

Penetapan sasaran dan prioritas dalam pembangunan ekonomi.

Mobilisasi sumberdaya yang ada.

Keseimbangan dalam rencana.

Adanya sistem administrasi yang efisien dan tidak korup.

Adanya kebijaksanaan pembangunan yang tepat. Menurut Prof. Lewis, unsur utama kebijaksanaan pembangunan adalah; (1) penyediaan potensi pembangunan; (2) penyediaan prasarana yang memadai; (3) penyediaan latihan khusus dan pendidikan umum; (4) perbaikan landasan hukum bagi kegiatan perekonomian; (5) bantuan untuk menciptakan pasar yang lebih banyak; (6) menemukan dan membanu pengusaha potensial; (7) peningkatan dan pemanfaatan sumber yang lebih baik.

Setiap perencanaan harus dibuat dampak ekonomis.

Adanya perencanaan yang mengacu pada teori konsumsi.

Dalam pembuatan perencanaan harus didukung oleh masyarakat.

4. Syarat-Syarat Umum Pembangunan Ekonomi

Dorongan kuat untuk perkembangan ekonomi adalah kehendak untuk menjadi makmur. Untuk itu dalam perencanaan ekonomi sasaran akhirnya adalah bagaimana suatu negara dapat menciptakan kemakmuran pada masyarakatnya.

Menurut Baldwin dan Meier ada 6 persyaratan yang diperlukan agar pembangunan ekonomi mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu:

a. Kekuatan dari dalam (*Indegenous Forces*) untuk berkembang.

Yang dimaksud kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang timbul dari masyarakat suatu daerah/negara untuk berkembang. Dengan adanya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b.

keuatan dari masyarakat maka perencanaan yang dibuat dapat dukungan dari masyarakat. Jadi harus ada kehendak dari masyarakat untuk menaikkan tingkat hidupnya.

Mobilitas faktor-faktor produksi.

Ketidak sempurnaan pasar akan sangat membatasi pergeseran faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan yang produktif.

c.

Akumulasi Kapital.

Ini merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur banyaknya kapital yang dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (1) perkiraan tingkat pertambahan penduduk; (2) target kenaikan pendapatan riil per kapita; dan (3) angka ratio pertambahan investasi dan output (ICOR=Incremental Capital Output Ratio).

$$ICOR = \frac{I/PDB \times 100 \%}{\Delta PDB (\%)}$$

Keterangan:

ICOR	=	menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi relatif akibat adanya investasi
$I/PDB \times 100 \%$	=	Persentase investasi terhadap PDB
$\Delta PDB (\%)$	=	Laju pertumbuhan ekonomi (PDB)

Tingkat investasi dapat dinaikkan dengan beberapa cara, antara lain; (1) menaikkan tingkat tabungan melalui pembatasan konsumsi; (2) pemerintah menjual obligasi; (3) pembatasan impor barang-barang konsumsi; (4) mengendalikan inflasi; (5) memindahkan pengangguran tersembunyi; (6) pinjaman dari luar negeri; dan (7) memperluas sektor perdagangan luar negeri.



Kesulitan dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi juga ditemukan beberapa hambatan, khususnya untuk negara yang sedang berkembang, antara lain:

Dualisme ekonomi

Dualisme ekonomi ini merupakan bentuk ekonomi pedesaan dan perkotaan. Ekonomi pedesaan masih bersifat subsisten, sedangkan perekonomian perkotaan sudah mendekati ekonomi pasar. Dengan adanya perbedaan ini anak-anak muda di desa mencari pekerjaan ke kota, sehingga yang tinggal di desa adalah orang-orang yang produktivitasnya sudah mulai menurun.

Iklim Tropis

Pada umumnya negara-negara terbelakang berada pada daerah tropis. Menurut para ahli orang daerah tropis produktivitasnya rendah, hal ini disebabkan karena mereka banyak penyakit dan keadaan pertanian yang tidak menguntungkan.

Produktivitas rendah

Produktivitas rendah banyak ditentukan oleh kualitas manusia dan sumberdaya alam sebagai faktor produksi belum banyak diolah.

d. Jumlah kapital sedikit

Di negara yang sedang berkembang kapital merupakan faktor produksi yang langka. Kelangkaan ini menyangkut dengan investasi yang menguntungkan.

e. Perdagangan luar negeri

Negara yang sedang berkembang mengandalkan perdagangan luar negerinya kepada sektor primer yang memberikan nilai tambah yang relatif kecil.

f. Ketidak sempurnaan pasar

Yang dimaksud ketidak sempurnaan pasar adalah seperangkat masalah yang menyangkut dengan immobilitas fakto-faktor produksi, harga yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

tidak luwes, tidak memperhatikan keadaan pasar, struktur sosial yang tidak mudah berubah dan kurang adanya spesialisasi.

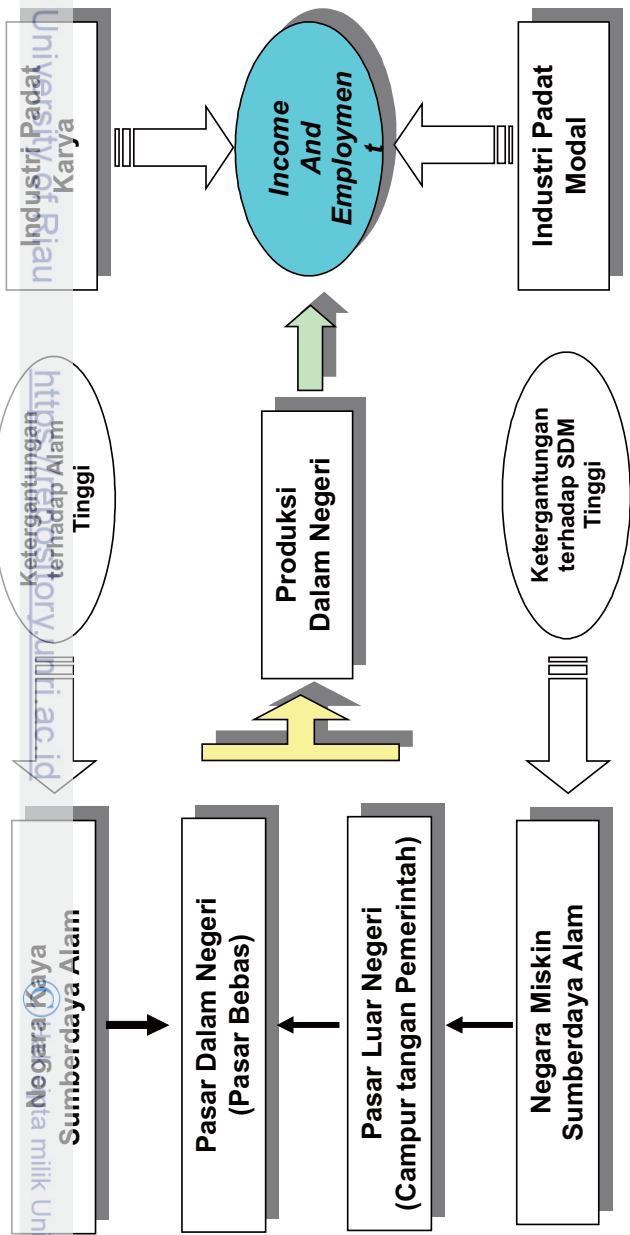
g. Kesenjangan pendapatan

Tujuan pembangunan disamping meningkatkan pendapatan per kapita juga menghilangkan kesenjangan absolut dan kesenjangan relatif.

6. Pola Pengembangan Sektor Industri

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa suatu Negara yang kaya dengan sumberdaya alam pada umumnya ketergantungan terhadap alam sangat tinggi. Bahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, negara tersebut memanfaatkan sumberdaya alamnya dengan tingkat pengendalian yang lemah. Kondisi ini pada suatu Negara yang sumberdaya alamnya tinggi ada kecenderungan mempercepat ketidak seimbangan lingkungan di negara tersebut. Pemanfaatan sumberdaya alam bisa sangat berlebihan, sehingga dalam waktu yang relatif pendek menyebabkan kelangkaan sumberdaya alam.

Dari sisi lain negara yang miskin terhadap sumberdaya alam justru memanfaatkan sumberdaya manusianya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya negara yang miskin dengan sumberdaya alam memiliki tingkat perekonomian yang tinggi karena negara tersebut memanfaatkan sumberdaya manusia untuk pengembangan sektor industri dan jasa. Kedua sektor ini memberikan nilai tambah yang tinggi. Potensi ini akan memberikan dampak pada kemajuan suatu negara. Pada Gambar 2.2 disajikan pola pengembangan industri.



Gambar 2.2. Pola Pengembangan Sektor Industri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





BAB III KEPENDUDUKAN DAN ANGKATAN KERJA

A. Masalah Kependudukan Dalam Pembangunan Ekonomi

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, tapi dari sisi lain juga bisa menjadi beban oleh negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Robert Malthus yang datang di akhir abad ke 18 dengan teorinya, pada dasarnya menyatakan bahwa penduduk yang banyak merupakan penyebab kemiskinan. Menurut Malthus laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tak akan pernah terkejar oleh penambahan makanan dan pakaian yang hanya bertambah secara deret hitung. Namun pada akhir abad ke XX teori Malthus ini mulai dibantah oleh pakar kependudukan dan pakar ekonomi. Alasan teori ini mulai ketinggalan disebabkan telah berhasilnya beberapa negara mengurangi laju pertumbuhan penduduk, sementara dari sisi produksi telah berhasil ditingkatkan melalui kemajuan teknologi.

Teori Malthus ini pada dasarnya beranjak dari dua gagasan utama: 1) manusia selalu memerlukan sandang pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan 2) nafsu seksual antara dua jenis kelamin akan selalu ada dan tidak akan berubah sifatnya. Pada saat gagasan yang disampaikan Malthus, kondisi pertanian masih bersifat subsisten dan ketergantungan terhadap alam sangat tinggi. Begitu juga teknologi belum mendukung terutama terkait dengan pengaturan kelahiran manusia (di Indonesia dikenal dengan Keluarga Berencana).

1. Masalah Kependudukan

Masalah penduduk dan kependudukan dapat kita soroti dengan pendekatan sistem. Sistem adalah suatu totalitas bagian (satuan komponen) yang terdiri dari berbagai sub komponen yang saling berkaitan, saling tergantung, berinteraksi, saling menentukan sehingga membentuk suatu kesatuan yang terpadu dan harus diperhitungkan dalam setiap mengambil keputusan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kebijakan kependudukan nasional pada hakikatnya bertujuan mempengaruhi sistem demografi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem-sistem yang lain dalam makrosistem kependudukan, untuk membawa penduduk kepada suatu keadaan di mana ciri dan perilaku demografinya menguntungkan bagi pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri.

Sebagai fenomena yang sudah menjadi masalah dapat disebut antara lain: 1) tekanan-tekanan pada usaha peningkatan ekonomi karena jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang cepat; 2) tekanan-tekanan pada usaha pembangunan, pendidikan dan tenaga kerja karena komposisi penduduk yang muda dan pertambahan yang cepat dari golongan penduduk usia sekolah dan tenaga kerja; dan 3) masalah-masalah pada usaha keamanan dan pembangunan daerah karena tidak terpenuhinya kesempatan kerja dan kepadatan penduduk yang tinggi yang tidak merata.

Kebijakan dalam bidang-bidang pembangunan yang lain pada hakikatnya bertujuan pada peningkatan kualitas hidup melalui sistem-sistem diluar sistem demografi tersebut dan sebagian dari kebijakan tersebut selain bertujuan untuk mengatasi masalah juga dapat secara langsung mempengaruhi sistem demografi.

2. Kebijakan Kependudukan

Kebijakan itu meliputi penyediaan lapangan kerja untuk penduduk yang menghendaknya, memberikan kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan serta usaha-usaha menambah kesejahteraan penduduk lainnya.

Selanjutnya secara terperinci mengenai kebijakan kependudukan dinyatakan sebagai berikut:

- a). Kebijakan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan serta diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya.
- b). Pelaksanaan kebijakan dan program-program kependudukan yang meliputi antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian anak-anak, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk dan



tenaga kerja yang lebih serasi dan seimbang.

Program keluarga berencana berperan ganda, ialah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujutkan keluarga kecil sejahtera serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk perlu diambil langkah-langkah untuk mempercepat turunnya tingkat kelahiran.

Jumlah peserta keluarga berencana perlu makin ditingkatkan atas dasar kesadaran dan secara sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penanganan dan pendidikan mengenai masalah kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda, perlu ditingkatkan dan lebih diperluas.

3. Pertambahan Penduduk dan Lingkungan Pemukiman

Dari segi lingkungan, masalah pemukiman adalah masalah penduduk.

Ketika manusia berjumlah terbatas dan hidup serba sahaja, maka cara hidup dan bermukim manusia diserasikan dengan lingkungan alam. Waktu itu kita tidak mengenal masalah lingkungan hidup. Tapi manusia bertambah banyak dan akal pikirannya berkembang, sehingga cara hidup dan bermukim tidak lagi diserasikan dengan lingkungan alam. Malah sebaliknya lingkungan yang diubah untuk dicocokkan dengan cara hidup dan bermukim manusia. Ruang dirombak untuk membangun berbagai bentuk perumahan dengan fasilitas pelayanan hidup yang bermacam-macam, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hiburan atau pasar yang harus ditunjang oleh prasarana jalan, angkutan, listrik, air minum dan sebagainya.

Sebagai suatu rangkaian, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, permukimannya terus berkembang, dan pengaruhnya kepada lingkungan hidup makin besar pula.

Peledakan penduduk menyebabkan pula membesarnya lagi urbanisasi, sehingga tidak ada satu kotapun yang mampu menampung arus penghuni baru yang datang dari daerah pedesaan.

Karena kota tidak mampu menampung arus yang datang akibatnya pengangguran di kota makin lama makin membengkak. Daerah pemukiman bertambah luas, sampah berserakan dimana-mana, persediaan air yang sehat



tidak dapat memenuhi kebutuhan dan akibatnya wabah penyakit menyerang masyarakat.

Proyek seperti perumahan dibangun, pasar diperbaiki, pedagang kakilima dilokalisasi, jalan-jalan diperbesar dan diperbaiki, akan tetapi bersamaan dengan pembangunan tersebut timbul masalah lain, masalah harga tanah yang terus-menerus meningkat yang menimbulkan spekulasi dan masalah penyediaan perumahan bagi golongan yang kurang mampu.

4. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Di negara-negara yang anggaran pendidikannya paling rendah, biasanya menunjukkan angka kelahiran yang tinggi. Tidak hanya persediaan dana yang kurang, tetapi komposisi usia secara piramida pada penduduk yang berkembang dengan cepat juga berakibat bahwa rasio antara guru yang terlatih dan jumlah anak usia sekolah akan terus berkurang. Akibatnya, banyak negara yang sebelumnya mengarahkan perhatian terhadap pendidikan universitas, secara diam-diam mengalihkan sasarannya.

Helen Callaway, seorang ahli antropologi Amerika yang mempelajari masyarakat buta huruf, menyimpulkan bahwa perkembangan ekonomi dan perluasan pendidikan dasar telah memperluas jurang pemisah antara pria dan wanita. Hampir di mana-mana pria diberikan prioritas untuk pendidikan umum dan latihan-latihan teknis. Mereka adalah orang-orang yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia. Sebaliknya pengetahuan dunia ditekan secara tajam pada tingkat yang terbawah.

Pertambahan penduduk yang cepat, lepas daripada pengaruhnya terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan, cenderung untuk menghambat perimbangan pendidikan. Kekurangan fasilitas pendidikan menghambat program persamaan/perimbangan antara laki-laki dan wanita, pedesaan dan kota, dan antara bagian masyarakat yang kaya dan miskin.

Pengaruh daripada dinamika penduduk terhadap pendidikan juga dirasakan pada keluarga. Penelitian yang dilakukan pada beberapa negara dengan latar belakang budaya yang berlainan menunjukkan bahwa jika digabungkan dengan kemiskinan, keluarga dengan jumlah anak banyak dan jarak kehamilan yang dekat, menghambat perkembangan berfikir anak-anak, berbicara dan kemauannya, di samping kesehatan dan perkembangan



kesulitannya. Kesulitan orang tua dalam membiayai anak-anak yang banyak, lebih mempersulit masalah ini.

Pertambahan penduduk yang cepat menghambat program-program perluasan pendidikan, juga mengarah pada aptisme di dunia yang kesulitan untuk mengatasinya. Tingkat pendidikan adalah sangat menentukan sebagai alat menyampaikan informasi kepada manusia tentang perlunya perubahan untuk merangsang penerimaan gagasan-gagasan baru.

5. Masalah Kemiskinan

Salah satu wabah penyakit yang menyerang negara-negara sedang berkembang dewasa ini adalah kemiskinan berserta saudara kembarnya keterbelakangan. Karena dalam kenyataannya kedua hal itu melemahkan fisik dan mental manusia yang tentunya mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.

Pembangunan di negara-negara sedang berkembang bukan hanya meningkatkan pendapatan nasional, tidak lagi hanya menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa, tetapi pembangunan mengandung pula unsur membangun manusia jasmaniah, rohaniyah dan mengubah nasib manusia untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk mengatasi ini pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa upaya diantaranya BIMAS, BUUD/KUD, Kredit Candak Kulak, SD INPRES, dimasa orde baru dicanangkan 8 jalur pemerataan, dan terakhir ini dicanangkan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada masa reformasi dikembangkan berbagai jenis kebijakan pembangunan, antara lain: kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) untuk petani di pedesaan, usaha ekonomi desa (UED), kredit usaha rakyat (KUR). Begitu juga untuk memacu kualitas sumberdaya manusia pemerintah mewajibkan setiap penduduk Indonesia minimal pendidikannya setingkat dengan sekolah lanjutan pertama (SLTP) atau dikenal dengan program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 tahun), bahkan beberapa daerah di Indonesia telah mengembangkan wajib belajar 12 tahun.

6. Sebab-sebab Kemiskinan

Sebab-sebab kemiskinan yang pokok bersumber dari empat hal, yaitu mentalitas si miskin itu sendiri, minimnya keterampilan yang dimiliki,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

ketidakmampuannya untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang disediakan, dan peningkatan jumlah penduduk yang berlebihan. Sesungguhnya keempat hal ini dalam kenyataannya kait mengait.

Apabila orang telah terperangkap dalam jurang kemiskinan, dan tidak lagi melihat untuk keluar dari jurang itu, maka ia cenderung mengambil sikap “menerima apa adanya”. Sikap ini bukanlah sikap yang seluruhnya irasional. Pada umumnya masyarakat tersebut tidak punya kekuatan untuk membangun ekonomi keluarga, karena mereka tidak punya keterampilan untuk bersaing meraih peluang yang ada. Faktor penyebab lemahnya daya saing meraih peluang yang ada, antara lain: rendahnya mutu pendidikan, kurangnya modal usaha, tidak mempunyai keberanian untuk memulai, dan tidak berani mengambil resiko.

Dari pandangan lain kemiskinan juga identik dengan keterbelakangan. Hal ini akan menyulitkan atau menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Keterkaitan ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. Masyarakat yang berpendapatan rendah kemampuan menabung dan pembentukan investasi baik dari sisi modal maupun keterampilan sangat kecil. Kondisi ini berdampak terhadap daya saing meraih peluang kerja. Dari sisi lain masyarakat yang berpendapatan rendah, lebih banyak memanfaatkan tenaganya dibanding pemanfaatan pemikirannya, sehingga berdampak kepada tingkat kesuburannya yang tinggi. Kondisi tersebut akan mempertinggi tingkat reproduksi sehingga tingkat kelahiran juga tinggi dilingkungannya. Faktor penyebab keterbelakangan masyarakat miskin di sebabkan adanya unsur keterbelakangan, antara lain: rendahnya tarah hidup, rendahnya harga diri, dan terbatasnya kebebasan. Taraf hidup yang rendah menyebabkan kemampuan untuk mengembangkan diri terbatas. Keterbatasan yang dimiliki tersebut akan menyebabkan munculnya kemiskinan absolut. Secara sinergi akan berdampak kepada kemampuan untuk menjaga kesehatan keluarga dan kemampuan mengembangkan pendidikan anak dalam jangka panjang.

Dalam lingkungan kehidupan kelompok miskin juga menyebabkan rendahnya harga diri yang dimulai dari individu masyarakat miskin. Kadang kala justru merekalah yang menyebabkan hargadirinya rendah dan diabaikan oleh orang lain. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat percaya



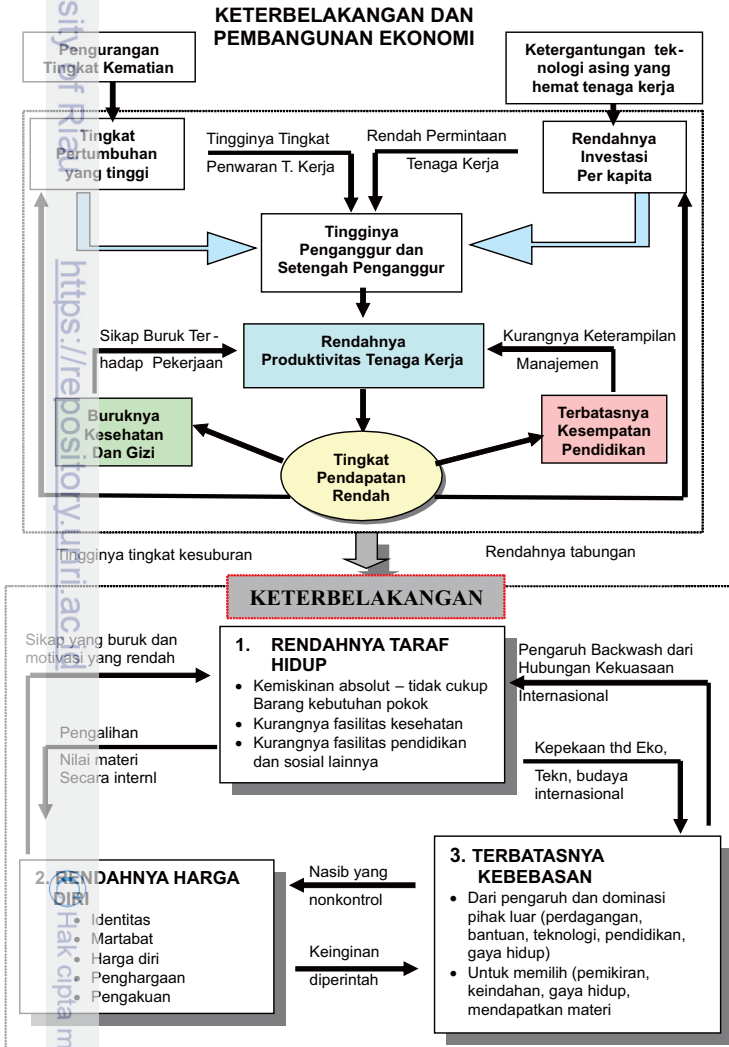
diri. Dari sisi lain keterbatasan ekonomi menyebabkan terbatasnya kebebasan individu dalam kehidupan mereka terutama yang terkait rasa kesejahteraan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 3.1. Keterbelakangan dan Pembangunan Ekonomi (Todaro, 2000)



B. Kegiatan Ekonomi dan Angkatan Kerja

Proses pembangunan terkait dengan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi (alam, modal, tenaga ahli, dan tenaga kerja). Tenaga ahli dan tenaga kerja merupakan bagian dari angkatan kerja. Semakin berkualitas tenaga kerja, semakin tinggi produktivitasnya, maka proses pembangunan berjalan semakin baik dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan.

Ada hubungan timbal balik antara kekuatan-kekuatan ekonomi dan kekuatan-kekuatan demografi. Ada pandangan yang mengatakan bahwa kejadian demografi adalah sebagian akibat dari kejadian-kejadian ekonomi. Misalnya; pada tingkat perekonomian makmur maka tingkat kelahiran akan berubah dan tingkat perpindahan penduduk suatu negara cenderung naik pula. Pada waktu depresi, mungkin tingkat kelahiran cenderung menurun. Sebaliknya ada pandangan lain yang mengatakan bahwa kejadian-kejadian ekonomi adalah tergantung dari kejadian-kejadian demografi. Misalnya, besarnya angkatan kerja, jenis kelamin dan lain sebagainya. Dari kedua kutub di atas sulit mengatakan mana yang paling benar. Mungkin yang lebih baik kita mencari jalan tengah, yaitu keduanya mengandung kebenaran dan karena itu saling kait mengkait.

Pertumbuhan angkatan kerja adalah disebabkan oleh trend demografi di masa lalu dan juga sebagai tanggapan (respons) dari suatu keadaan perekonomian. Jadi perubahan karakteristik angkatan kerja adalah karena unsur demografi dan unsur ekonomi secara bersama-sama. Pada wilayah tertentu, semakin membaik perekonomian suatu wilayah akan mempengaruhi perkembangan demografi. Pada wilayah ekonomi yang tumbuh dengan baik ada kecenderungan tingkat pertumbuhan penduduk juga tinggi. Hal tersebut disebabkan karena sumber dan peluang usaha terbuka, akibatnya muncul migrasi penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain dalam suatu negara. Migrasi ini lebih banyak disebabkan adanya keinginan untuk merubah nasib di wilayah yang baru dengan harapan pendapatan yang lebih layak. Dampak dari pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan mobilitas penduduk di suatu wilayah juga meningkat. Tentu saja akan mempengaruhi struktur kependudukan di wilayah tersebut.



Penduduk dapat digolongkan dalam: *Economically active population*; dan *Economically inactive population*. *Economically active population*, terdiri dari para pekerja yang memproduksi barang dan jasa (secara ekonomi) dan mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan. Karena itu disebut *gainfully employed*. Mereka pencari nafkah dan penerima pendapatan serta yang berusaha ke arah itu. Jadi istilah seperti *work-force*, *gainfully employed*, atau *labor force* dipergunakan untuk menunjukkan *economically active* dari penduduk suatu negara. *Economically inactive population*, adalah bagi mereka yang bukan pekerja atau sedang tidak mencari pekerjaan, di mana mereka hanya mengkonsumsi dan tidak memproduksi sesuatu barang dan jasa dilihat dari pengertian ekonomi.

Seluruh penduduk di suatu negara baik bayi, anak-anak, pemuda, orang dewasa sampai orang tua semuanya mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi kita melihat hanya sebagian dari mereka yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa. Kelompok inilah yang disebut penduduk aktif secara ekonomis atau angkatan kerja, dimana angkatan kerja menitik beratkan pada dua kelompok penduduk, yaitu; penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan (termasuk mereka yang pertamakali mencari pekerjaan).

1. Hubungan Kegiatan Ekonomi dengan Pengangguran

Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Untuk mencari keadaan seimbang maka seyogyanya mereka semua tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan dan keterampilan mereka. Ini membawa konsekuensi bahwa perekonomian seyogyanya harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru.

Kegiatan ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari pertambahan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran terbuka (*open unemployment*). Jika pertumbuhan perekonomian tidak lancar, maka jumlah orang yang tidak tertampung dalam suatu pekerjaan akan semakin besar.



Sebaliknya bila suatu perekonomian dalam keadaan makmur maka makin kecillah jumlah orang yang menganggur.

Dengan demikian jelaslah bahwa pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan perekonomian diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas sehingga dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur. Sebaliknya tanpa adanya pembangunan ekonomi maka kegiatan perekonomian akan makin sempit. Ini berakibat makin kecilnya kesempatan kerja sehingga mempertinggi tingkat pengangguran dalam masyarakat.

2 Pengertian Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Bukan Angkatan Kerja Tenaga Kerja (*manpower*)

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja. Dalam literatur biasanya adalah penduduk berusia 15-64 tahun. Tetapi kebiasaan yang dipakai di Indonesia adalah seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (sensus penduduk tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010). Pengertian lain, tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Angkatan Kerja (*labor force*)

Secara demografis besarnya angkatan kerja tergantung dari tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*), yaitu berapa persen dari tenaga kerja yang menjadi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa.

Bukan Angkatan Kerja (*Not in the Labor Force*)

Adalah bagian dari tenaga kerja (*manpower*) yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan. Jadi mereka ini adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat, atau tidak berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

3. Jenis/Jabatan Pekerjaan

Adapun jenis/jabatan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Tenaga profesional, tehnisi dan tenaga lain.
- Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan.
- Tenaga administrasi, tenaga tata usaha dan tenaga yang berhubungan dengan itu.
- Tenaga penjualan.
- Tenaga Usaha jasa.
- Tenaga usaha pertanian.
- Tenaga produksi dan sejenisnya, dan operator alat-alat pengangkutan.
- Lain-lainnya (termasuk ABRI).

Adapun lapangan pekerjaan/Usaha:

- ☐ Pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan.
- ☐ Pertambangan dan penggalian.
- ☐ Industri pengolahan.
- ☐ Listrik, gas dan air.
- ☐ Bangunan.
- ☐ Perdagangan, rumah makan dan hotel.
- ☐ Angkutan, penyimpanan dan komunikasi.
- ☐ Keuangan, Asuransi dan perdagangan benda tak bergerak.
- ☐ Jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan pribadi.
- ☐ Kegiatan yang tidak/belum jelas.

4. Status/Kedudukan dalam Pekerjaan dari Angkatan Kerja

Pengusaha tanpa buruh

Adalah mereka yang melakukan usaha/pekerjaan atas resiko/tanggungan sendiri dan tidak memakai buruh yang dibayar atau hanya anggota rumah tangganya dengan membayar upah.

Pengusaha pakai buruh

Adalah seseorang yang dalam usahanya dibantu oleh satu atau beberapa buruh yang dibayar.



Buruh atau pekerja

Adalah mereka yang bekerja dengan menerima upah atau gaji baik berupa uang maupun barang.

Pekerja keluarga

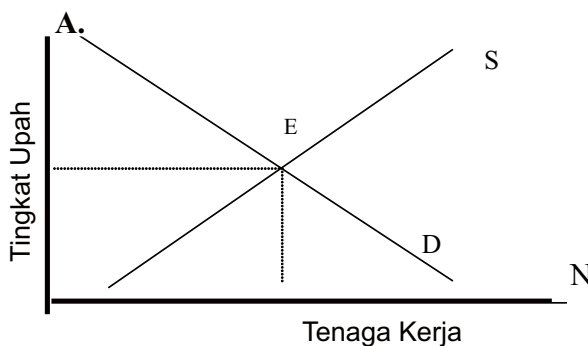
Adalah anggota rumah tangga yang membantu usaha yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga tanpa mendapat upah atau gaji.

5. Masalah Ketidakseimbangan antara Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Salah satu masalah yang sering timbul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah tertentu. Ketidakseimbangan ini dapat berupa:

- Lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labor*).
- Lebih besarnya permintaan dibandingkan penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand for labor*).

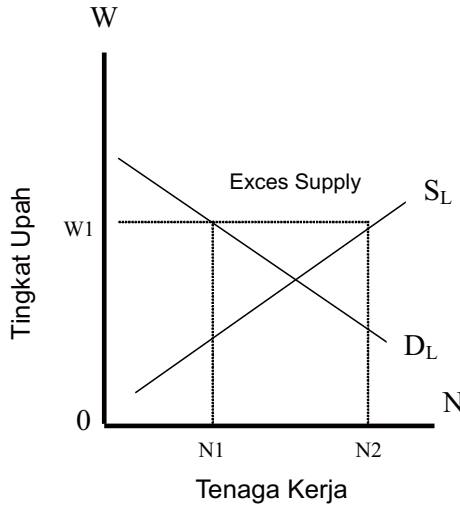
Keadaan yang umum terjadi adalah kelebihan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Meskipun demikian dalam lapangan pekerjaan tertentu terdapat juga kelebihan permintaan tenaga kerja.



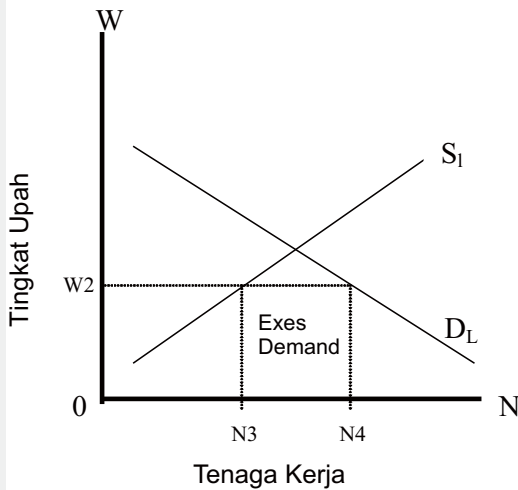
Gambar 3.2. Kurva Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 3.3. Kurva Exces Supply



Gambar 3.4. Kurva Exes Demand

Pada Gambar 3.3 dan 3.4 dapat dilihat keterangan lebih lanjut mengenai *excess supply of labor* dan *excess demand for labor*.



Keterangan Gambar:

1. Pada gambar pertama terlihat bahwa jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah tenaga yang diminta yaitu masing-masing sebesar N_e pada tingkat keseimbangan upah W_e . Titik keseimbangan terjadi pada titik E.
2. Pada gambar kedua terlihat adanya excess supply of labor sebesar $N_1 - N_2$.
3. Pada gambar ketiga terjadi excess demand for labor sebesar $N_3 - N_4$.

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaslah bahwa analisis tentang adanya *excess demand* maupun *excess supply for labor* tersebut hanya pada suatu tingkat upah riil tertentu. Jika tingkat upah berubah, maka akan terjadi keseimbangan baru yang merubah keadaan yang dibahas.

C. Urbanisasi, Kemiskinan, dan Kesejahteraan

Mobilitas penduduk merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Mobilitas penduduk merupakan meningkatnya aktivitas ekonomi baik antar daerah, antar wilayah maupun antar negara. Namun urbanisasi yang disebabkan karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia seperti penduduk yang mencoba merubah nasibnya di perkotaan tanpa didukung oleh keahlian yang tinggi akan menjadi beban bagi suatu daerah atau negara.

1. Pandangan Umum

Sebagaimana di banyak negara berkembang, urbanisasi di Indonesia telah meningkat pada dasawarsa terakhir. Urbanisasi merupakan salah satu proses yang tercepat diantara perubahan-perubahan sosial di seluruh dunia. Pada umumnya urbanisasi itu diartikan sebagai suatu proses, yang membawa bagian yang semakin besar dari penduduk suatu negara untuk berdiam di pusat-pusat perkotaan. Pada tahun-tahun mendatang wilayah perkotaan diperkirakan akan terus tumbuh, paling tidak secepat ini.

Sepuluh dari kenaikan total penduduk perkotaan disebabkan oleh urbanisasi dari desa ke kota yang biasa disebut dengan istilah migrasi. Seseorang dikatakan melakukan migrasi apabila ia melakukan pindah tempat tinggal secara permanen atau relatif permanen (untuk jangka waktu minimal) dengan menempuh jarak minimal tertentu pula.



Gerak penduduk dari desa ke kota sering merupakan sumber kerisauan di beberapa negara berkembang karena terbatasnya kemampuan penyediaan lapangan kerja dan berbagai fasilitas perkotaan bagi penduduk desa yang datang. Salah satu sebab meningkatnya jumlah penduduk perkotaan akibat adanya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan.

Dengan demikian maka pengertian urbanisasi juga dianggap mengandung arti :

Pergeseran penduduk dari desa ke kota.

Bertambah besarnya jumlah tenaga kerja non agraris di sektor industri dan sektor tersier di daerah perkotaan dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tumbuhnya permukiman menjadi kota.

Meluasnya pengaruh kota di daerah pedesaan mengenai segi ekonomi, sosial, kebudayaan, psikologi dan lembaga-lembaga sosial yang lain.

Dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial, urbanisasi juga diartikan sebagai tambahan proses-proses yang bersifat kekotaan.

Sebab-sebab yang menimbulkan arus perpindahan dari desa ke kota sering dicakup dengan istilah faktor pendorong (*push faktor*) dan faktor penarik (*pull faktor*). Sebagai faktor pendorong dapat disebut kemiskinan di desa-desa. Sebab kemiskinan itu bermacam-macam, seperti: cepatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan kecepatan pertumbuhan pertanian baru, mekanisasi pertanian dan terdesaknya kerajinan tangan di desa-desa oleh produk industri modern. Terutama di bagian-bagian Asia yang memang sudah padat penduduknya, tekanan kepada penduduk itu amat terasa. Dalam keadaan demikian itu orang pergi ke kota untuk beberapa waktu guna mengumpulkan uang yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat.

Di samping faktor yang seolah-olah mengusir penduduk dari pedesaan, ada faktor penarik yang berasal dari kota, seperti: lapangan pekerjaan yang cukup banyak, upah cukup tinggi, keindahan kota fasilitas-fasilitas sosial jauh lebih banyak dibanding di desa. Faktor penarik seperti tersebut di atas merupakan harapan bagi orang-orang yang pindah ke kota, tetapi diantaranya banyak yang kecewa karena harapan tersebut tidak dapat tercapai.

Menurut *Everest S. Lee* (1976) bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

orang untuk melaksanakan migrasi atau tidak bermigrasi, yaitu : (1). Faktor daerah asal; (2). Faktor daerah tujuan; (3). Faktor penghalang antara; (4). Faktor individu.

Meskipun pada umumnya migrasi itu dipandang sebagai faktor terpenting yang menyebabkan bertambahnya penduduk kota, akan tetapi juga terdengar suara-suara yang menyimpang dari pendirian tersebut, yang menganggap bertambahnya penduduk tersebut karena proses alam sebagai faktor utama.

Menurut *Kingsley Davis* (1966) bahwa, masyarakat kurang berkembang yang sudah berhimpit-himpitan di daerah tempat tinggalnya secara menyedihkan bertambah miskin dan dengan hari depan ekonomi yang gelap. Rakyatnya bertambah banyak karena pertambahan secara biologik dengan kecepatan yang belum pernah terjadi. Ledakan penduduk inilah yang terutama bertanggung jawab atas kecepatan dari inflasi penduduk kota di negara-negara seperti itu. Berlawanan dengan pendapat umum, baik di dalam maupun di luar negara itu, yang menjadi faktor utama bukanlah migrasi dari pedesaan ke perkotaan.

Jadi bukan migrasi atau urbanisasi itu yang terasa mencemaskan, namun proses kemiskinan yang cenderung dibiarkan menyertai kehidupan mayoritas penghuni kota-kota itulah yang merisaukan setiap bangsa, sebab dapat dibayangkan, kalau masyarakat yang miskin itu sudah sulit hidup di desa, dan tetap melarat ketika harus lari ke kota, lalu kemana lagi mereka mengadu nasib.

Dengan demikian kota telah menjelma menjadi tumpuan harapan bagi masa depan sejumlah pihak yang saling berebut kepentingan. Hingga penduduk dari pedesaan itupun berbondong-bondong membanjiri dan menuju celah-celah kehidupan kota. Itulah ladang juang yang baru, tempat taruhan hidup mati mereka. Namun kota-kota itu telah terlanjur dipersiapkan bukan untuk mereka, tetapi tempat pemukiman bagi mereka yang berharta dan berkuasa. Pabrik dan industri, pasar uang dan modal, serta pusat-pusat kekuatan ekonomi, politik dan pemerintahan.

Tak heran, kota merupakan gejala paradoks, tempat konsentrasi harta kekayaan nasional yang terbesar adalah di daerah perkotaan, tetapi di kota-kota pula terjadi konsentrasi terbesar dari pemukiman penduduk yang hidup pada tingkat kemiskinan absolut. Sementara bagian terbesar penduduk kota



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

bermukim, bekerja dan memperoleh nafkah dari kegiatan sektor informal, pola pembangunan dan pelayanan kota masih saja terus ditujukan untuk kepentingan kelompok elite kota di sektor formal. Meskipun produktivitas dan pendapatan per kapita yang tertinggi menurut ukuran nasional tercatat di kota-kota besar, namun hingga kini pembangunan kota-kota tersebut tidak di biayai dari hasil sumberdaya kota itu sendiri. Bahkan dengan segala akumulasi kekayaan dan produktivitas yang terkumpul dalam kota besar belum ada satu pemerintahan kotapun yang mampu untuk memanfaatkannya untuk membiayai penyediaan fasilitas pelayanan bagi kebutuhan dasar mayoritas warga kota yang berpenghasilan rendah. Pertumbuhan ekonomi kota tidak dengan sendirinya untuk melayani kebutuhan warganya secara adil dan merata, sebagaimana yang dikenal dengan adanya 8 jalur pemerataan kebutuhan dasar manusia.

Namun, apa hendak dikata. Banjir arus penduduk menyerbu kota itu tidak akan mereda, dan pemekaran daerah-daerah perkotaan adalah mustahil. Karena itu konsentrasi penduduk miskin di daerah perkotaan juga akan terus meningkat, yang berarti kian meningkat pula tuntutan akan penyediaan fasilitas pelayanan kebutuhan dasar bagi lapisan tersebut. Sementara pertumbuhan lapisan masyarakat miskin di kota berjalan lebih cepat dari upaya maupun kemampuan pemerintah kotamadya menyediakan fasilitas pelayanan bagi mereka, pertumbuhan sektor ekonomi modernpun tak akan begitu saja akan menetes ke sektor informal. Andaikata saja kemampuan pemerintah kota bisa ditingkatkan, agaknya belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pelayanan penduduk miskin yang cepat membengkak itu.

Dengan adanya arus urbanisasi yang semakin meningkat pada dasawarsa ini yang tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi maka dapat menimbulkan berbagai problem sosial, misalnya akan timbul masalah kemiskinan. Pengertian umum dari kemiskinan itu sendiri adalah kurangnya kesempatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang utama (pokok) seperti: sandang, pangan, papan.

Menurut *Sandra Wallman* (1977) kemiskinan dapat diartikan sebagai berikut: Bahwa kemiskinan itu akibat terbatasnya sumber-sumber ekonomi maupun non-ekonomi dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumberdaya ekonomi seperti : modal, tanah, manusia dan sumberdaya alam.



Sumber non-ekonomi seperti pendidikan, keterampilan dan keahlian:.

Kemiskinan dalam pengertian ini merupakan kemiskinan yang diderita oleh sesuatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan (faktor-faktor produksi) yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Dengan menggunakan kriteria tertentu maka dapat dikatakan/ditetapkan garis kemiskinan, yang selanjutnya proporsi penduduk di bawah garis ini digolongkan miskin. Dalam penggolongan yang dilakukan selanjutnya, telah ditetapkan oleh *Sajogjo* (1973, 71) bahwa: Batas tingkat pengeluaran per kapita per tahun kurang dari 240 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 360 kg beras bagi penduduk perkotaan tergolong miskin sekali, sedangkan pengeluaran kurang dari 180 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 270 kg beras bagi penduduk perkotaan sebagai tergolong paling miskin dan yang tergolong miskin adalah mereka yang mempunyai tingkat pengeluaran kurang dari 320 kg beras bagi penduduk pedesaan dan 480 kg beras untuk penduduk perkotaan.

Dengan demikian orang yang berada di bawah garis kemiskinan selalu berusaha untuk memperbaiki hidupnya, salah satu cara yaitu dengan jalan mengadakan urbanisasi ke kota. Di kota mereka mencari orang-orang yang memiliki nasib yang sama, dan kemudian mengisolir diri dalam perkampungan miskin yang bergaya pedesaan. Di tempat yang secara sosial terisolir ini mereka hidup dalam keadaan melarat, karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan layak. Di dalam pemukiman miskin ini terdapat suasana kehidupan yang pengap, karena adanya transisi tersebut.

Menurut *Oscar Lewis* (1965) akibat proses ini timbulah budaya kemelarat: Budaya kemelarat seperti: apatisisme, serba curiga, fanatisme, putus asa, tergantung dan rendah diri, kriminalitas, banyaknya anak diluar perkawinan, pemborosan dan konsumtif, berorientasi pada hari ini, serta tidak berintegrasi dengan kehidupan kota, kesemuanya itu disosialisasi dari generasi ke generasi.

Hal ini sangat nyata pada permukiman miskin yang tetap merupakan ciri yang menonjol dalam pemandangan kota. Menurut *Mc Taggart* berkomentar: Para migran membangun wilayah permukiman miskin yang luas dan perumahan liar di sekeliling kota, menempati tanah-tanah kosong



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

yang mereka temukan. Jasa dan pelayanan yang memenuhi standar yang memadai tidak tersedia bagi daerah pinggiran kota yang tumbuh dengan pesat. Kecenderungan ini akan membesar masalah tersebut, dan membuat kota tetap mewarisi pemukiman yang tidak memadai, komunikasi tidak lancar dan sistem pelayanan umum tidak efektif.

Dengan demikian maka sudah jelas bahwa masalah urbanisasi mempunyai dampak terhadap masalah kemiskinan terutama di negara-negara sedang berkembang yang memiliki latar belakang yang sangat kompleks.

2. Urbanisasi

Proses terjadinya perubahan tenaga kerja dari desa ke kota seperti yang dikemukakan oleh W. Athur Lewis yaitu ekonomi itu terdiri dari dua sektor; a) sektor subsistensi pedesaan yang ditandai dengan produktivitas yang rendah atau surplus tenaga kerja; b) sektor industri perkotaan modern yang ditandai dengan produktivitas yang tinggi, maka terjadi perpindahan tenaga kerja dari pedesaan/ sektor subsistensi secara bertahap ke kota (Todaro, 2000).

Bila diperhatikan lebih lanjut karakteristik migran itu adalah ;

- 1) karakteristik demografi; pada migran tersebut terdiri dai pemuda-pemuda yang berumur 15-24 tahun;
- 2) karakteristik pendidikan; tujuan migran ke kota adalah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi yaitu maksud tujuan yang positif;
- 3) karakteristik ekonomi; pada umumnya yang migran itu adalah orang yang miskin, di desa tidak punya tanah/ sawah, orang-orang yang tidak mempunyai keterampilan yang di desa tidak ada kesempatan untuk memperoleh pekerjaan.

Ketidakseimbangan perekonomian dimungkinkan karena tidak adanya pengaturan pada daerah-daerah yang berpotensi atau daerah yang kurang atau tidak berpotensi berikut kegiatan-kegiatan dan usaha yang dilakukan.

Setiap urbanisasi berlangsung selalu membawa dampak terhadap pembangunan di kota maupun dampak terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Akibat urbanisasi yang terjadi dengan cepatnya terdapat bangunan-bangunan kumuh yang kurang memadai dari segi kesehatan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Para urban yang melakukan urbanisasi tentu tidak akan berpindah begitu saja, karena keinginan semata, meskipun memang benar bagi masyarakat miskin. Sebagaimanapun orang-orang pedesaan membandingkan kesempatan atau peluang kerja dalam jangka panjang di kota-kota dengan di kampung-kampung yang miskin dengan berbagai macam fasilitas yang tidak memadai. Mereka pada bagian lain terlihat telah mempunyai tempat tinggal yang jauh dari kesederhanaan. Namun jumlah ini lebih sedikit bila kita bandingkan dengan kelompok mereka yang memiliki rumah sederhana.

3. Dampak Urbanisasi

Perpindahan penduduk dari desa ke kota tidak dapat diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia pada industri di kota. Hal inilah yang dapat menimbulkan akibat yang negatif baik bagi orang yang datang maupun daerah yang didatanginya. Akibatnya banyak diantara mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, tinggal pada rumah-rumah kecil yang tidak beraturan letaknya, atau bahkan ada di bawah kolong jembatan. Demikian pula halnya dengan fasilitas-fasilitas kota yang tersedia pada umumnya sangat kurang dibandingkan dengan banyaknya jumlah pendatang yang harus mendapatkannya. Pembangunan perumahan jauh tidak mencukupi untuk menampung kaum pendatang. Fasilitas pelayanan kesehatan, transportasi dan lain sebagainya tidak mampu memberikan pelayanan yang memadai. Akibat ketidak mapuan ini maka tidak bisa dielakkan lagi akan semakin meningkatnya pemukiman kumuh di perkampungan kota atau di kantong-kantong kota. Kehidupan mereka jauh di bawah garis kemiskinan, dimana rumah tempat tinggal mereka terbuat dari kayu, tidak punya listrik, pendidikan rendah dan tingkat sanitasi yang tidak sesuai dengan syarat-syarat lingkungan.

4. Kemiskinan

Kemiskinan yang telah berjalan dalam rentang ruang dan waktu yang pajang, dan gejala tersebut tidak cukup diterangkan dengan realitas ekonomi. Artinya kemiskinan tidak sekedar gejala keterbatasan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kemiskinan telah menjadi realitas sistem/struktur dari tata nilai kemasyarakatan. Kemiskinan



merupakan suatu realitas budaya yang antara lain berbentuk sikap menyerah pada keadaan.

Kemiskinan rakyat Indonesia tidak disebabkan mereka sejak semula tidak mempunyai faktor-faktor kultural yang dinamis. Mereka miskin dan terbelakang karena kesempatan tidak diberikan kepada mereka. Atau mereka miskin karena kesempatan-kesempatan telah dihancurkan dari mereka. Dan proses penghancuran itu telah berlangsung sejak dulu sampai sekarang, dimulai sejak zaman feodalisme kerajaan, zaman kolonialisme Belanda dan akhirnya pada zaman ketergantungan sekarang ini.

Secara spesifik, kemiskinan rakyat Indonesia sebagian besar disebabkan oleh proses penghancuran kesempatan yang terjadi sebagai akibat proses eksploitasi. Proses eksploitasi ini mengambil bentuk-bentuk yang berikut: 1) pertukaran yang tidak adil dalam perdagangan barang-barang; 2) pembayaran yang tidak adil atas jasa-jasa pekerja; 3) penggunaan pungutan yang relatif memberatkan dari penguasa terhadap rakyat kecil (Adi Sasono, 1987). Di samping itu adanya pengangguran yang terbuka dan terselubung, ini merupakan komponen yang pertama menimbulkan kemiskinan. Kedua, pengangguran ini menyebabkan ratio ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk aktif dengan penduduk yang tidak aktif menjadi tinggi. Di Indonesia *dependency ratio* yang tinggi ini dialami oleh sebagian besar golongan miskin.

Dalam situasi seperti ini timbullah lingkungan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) bersama-sama dengan lingkungan keterlembahan (*vicious circle of affwence*). Lingkaran kemiskinan ini terjadi karena kemiskinan, maka produktivitas rendah yang nantinya akan menyebabkan pendapatan rendah dan ini akan membuat daya tawar dan daya kerja lemah, oleh karena produktivitas dan pendapatan rendah maka timbul kemiskinan.

Situasi kemiskinan yang ditanggung itu tidak dapat lagi menimbulkan keharmonisan di pedesaan, maka timbul keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan ingin mencari keharmonisan baru, oleh sebab itu rakyat pedesaan akan teransang untuk migran ke kota. Tetapi apa yang didapatkan di kota tidak seperti apa yang diharapkan maka timbul masalah baru setelah di kota, hal ini disebabkan karena sampai saat ini kota masih dianggap kota sebagai lambang kehidupan modern. Orang-orang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang merasa ingin maju berupaya untuk pergi ke kota, baik mencari pekerjaan yang lebih baik, mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, keinginan untuk melepas tradisi yang terikat di desa, ataupun mencari kebutuhan lain yang dianggap dapat meningkatkan status sosialnya.

5. Kemiskinan dan Dampaknya

Secara konseptual kemiskinan dapat dipandang dari berbagai segi. Pertama-tama dari segi subsistem, dimana penghasilan seseorang hanya paspasan untuk dimakan saja bahkan tidak cukup untuk itu. Sedangkan dari segi eksternal mencerminkan kosekuensi dari kemiskinan terhadap masyarakat disekelilingnya, yaitu bagaimana kemiskinan yang berlarut-larut mengakibatkan dampak sosial yang tidak ada habisnya.

Dari segi lain kemiskinan absolut merupakan tingkat hidup seseorang tidak memungkinkan seseorang untuk memenuhi keperluannya yang mendasar, sehingga kesehatannya baik fisik maupun mental terganggu.

Atas dasar ini maka Sayogyo menentukan garis kemiskinan berdasarkan nilai gizi minimal yang diperlukan rata-rata orang. Dari penelitian ini dia menetapkan garis kemiskinan itu pada pendapatan perkapita setahun senilai 240 Kg beras/ tahun untuk daerah pedesaan dan 360 kg beras/ tahun untuk perkotaan. Garis itu tentunya garis yang sangat miskin karena didasarkan atas jumlah pangan minimal yang diperlukan untuk sekedar menyambung hidup.

Kemiskinan sangat berhubungan erat dengan pola pembagian pendapatan. Dari data yang dikemukakan oleh Almasdi Syahza (2009) hasil penelitian di Daerah Riau, terlihat keadaan sebagai berikut;

- 1) 40 % dari penduduk dengan tingkat pendapatan terendah menerima 26,74 % dari PDRB;
- 2) 40% dari penduduk dengan tingkat pendapatan menengah menerima 40,38 % dari PDRB;
- 3) 20 % dari penduduk termasuk golongan berpendapatan tinggi menerima 32,88 % dari PDRB.

Dari data tersebut terlihat perbandingan antara masyarakat berpenghasilan 20% tertinggi dibandingkan dengan masyarakat 405 berpenghasilan terendah sebesar 1,23. Kondisi ini jauh lebih baik



dibandingkan dengan tahun 1995, dimana perbandingan antara 20% masyarakat berpenghasilan tertinggi dengan 40% masyarakat berpenghasilan terendah sebesar 2,19. Artinya kebijakan pembangunan selama decade 1995-2009 telah berhasil mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah.

Berhasilnya suatu pembangunan memberikan dampak terhadap perubahan pendapatan masyarakat suatu daerah/negara. Artinya pembangunan tersebut berhasil mengetaskan kemiskinan atau dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walau kemiskinan itu tidak bias berantas sama sekali. Namun pembuat kebijakan berusaha untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan. Dampak kemiskinan yaitu ;

a. Dampak kemiskinan terhadap orang-orang miskin sendiri dan terhadap lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, dengan sendirinya sudah jelas negatif. Orang miskin tidak mampu memenuhi gizi minimal bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya, dengan akibat bahwa ia dan keluarganya merana fisik dan mentalnya. Dampak langsung adalah keterbelakangan dan rendahnya produktivitas.

b. Dampak kemiskinan terhadap lingkungan sosial tampak pada pengaruhnya penduduk ke kota-kota tanpa bekal pengetahuan. Akibatnya sampai kota bekerja sebagai tukang becak, pemulung, gelandangan dan pengemis yang menghuni kampung-kampung liar yang jorok digubuk-gubuk yang tidak pantas didiami oleh manusia.

c. Dampak lain dari kemiskinan ialah dampaknya terhadap lingkungan alam, sehingga dikatakan masalah lingkungan alam di Indonesia ini adalah masalah kemiskinan.

Sebab kemiskinan itu bersumber dari mentalitas miskin itu sendiri, minimnya keterampilan yang dimiliki, ketidakmampuan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia, dan peningkatan jumlah penduduk yang relatif berlebihan.

6. Penanggulangan Kemiskinan

Motivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan pasti ada pada setiap diri manusia yang normal, walaupun pada suatu saat dalam



Ekonomi Pembangunan

keadaan tertentu motivasi itu tampaknya musnah seperti terlihat dalam sikap “nerimo”. Mengenai ini segala sesuatu yang mungkin dilakukan sudah dirancang oleh pemerintah, tentu saja tinggal penyempurnaannya dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran mengenai apa yang telah diprogramkan pemerintah di masa lalu untuk memberantas kemiskinan dan keterbelakangan, diantaranya adalah :

1. Delapan jalur pemerataan yaitu;
 - Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.
 - Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - Pemerataan pembagian pendapatan
 - Pemerataan kesempatan kerja
 - Pemerataan kesempatan berusaha
 - Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pemuda dan wanita.
 - Pemerataan pembangunan seluruh Indonesia
 - Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Jangkauan semua langkah diatas telah mencakup semua bidang kegiatan masyarakat, termasuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, pengangkutan, industri, bangunan dan jasa.

2. Untuk membangun sektor pertanian, adanya kebijaksanaan dalam usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian dengan pembinaan Panchasaha Tani yaitu ;
 - ❖ Penanaman bibit unggul
 - ❖ Penggunaan pupuk
 - ❖ Perbaikan irigasi
 - ❖ Peningkatan alat dan cara bertani
 - ❖ Pemberantasan hama dan penyakit tanaman.
3. Menggiatkan transmigrasi, dan didukung oleh pembinaan ekonomi melalui sistem koperasi.



Transmigrasi ini bila dilaksanakan secara wajar merupakan cara yang memberikan harapan bagi suksesnya usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup si miskin, karena transmigrasi bisa mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, mensuplay pulau-pulau lain yang jarang penduduknya dengan angkatan kerja, memberikan sumber penghidupan baru yang mendukung harapan untuk bisa ditingkatkan.

Untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan penduduk desa, pada masa pemerintahan orde baru dicanangkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang merupakan salah satu upaya-upaya pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Melalui IDT ini masyarakat desa menentukan kegiatan apa yang diinginkan, yang berarti masyarakat desa itu sendirilah yang dianggap paling mengetahui kegiatan yang paling menguntungkan untuk merubah wajah kehidupan mereka. Namun yang bersifat non teknis perlu mendapat perhatian yang serius karena tidak jarang faktor-faktor non teknis merupakan kendala yang bisa mengurangi bahkan menggagalkan program IDT.

Pada pemerintahan reformasi telah dikembangkan berbagai bentuk investasi untuk masyarakat pedesaan dan kalangan berpenghasilan rendah, antara lain: kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA), kredit usaha rakyat (KUR), usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP), pembinaan dan pemberian modal usaha bagi penyelenggara usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

7. Kesejahteraan

Setiap manusia di muka bumi ini selalu berusaha untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila kebutuhan hidup belum terpenuhi manusia itu akan merasa risik dan gelisah, bahkan bisa mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Namun apabila kebutuhan hidup sudah terpenuhi maka hidupnya merasa nyaman dan tentram.

Kebutuhan hidup secara ekonomi dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar bagi suatu keluarga.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kebutuhan primer ini di Indonesia dikenal dengan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako), yaitu: beras, gula, sabun, minyak tanah, minyak goreng, susu, tepung terigu, lauk pauk, dan pakaian dasar. Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut berarti suatu keluarga sudah merasa nyaman hidupnya, karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari dalam menyambung hidup dalam suatu keluarga.

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan bagi suatu keluarga guna meningkatkan kesejahteraan dalam suatu keluarga. Biasanya kebutuhan ini muncul setelah suatu keluarga telah memenuhi kebutuhan primernya. Jadi apabila suatu keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhan sekundernya maka keluarga tersebut telah mengalami peningkatan kesejahteraan. Kebutuhan sekunder bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dari hasil usaha yang telah dilakukan selama ini. Sebagai contoh: pesawat televisi, VCD, alat komunikasi (telepon dan HP), kendaraan roda dua (sepeda atau motor), dan lain sebagainya.

Apabila suatu keluarga memperoleh pendapatan yang layak, maka keluarga tersebut akan berusaha meningkatkan kesejahtraannya melalui pemenuhan kebutuhan tertier. Kebutuhan tertier ini adalah kebutuhan bagi suatu keluarga untuk bersenang-senang. Artinya suatu keluarga menikmati hasil pencariannya selama ini untuk kesejahteraan keluarga. Karena semua kebutuhan mulai dari primer dan sekunder sudah terpenuhi, maka mereka yang mempunyai pendapatan yang layak sepatutnya pula merasakan kesenangan dalam keluarganya. Kebutuhan tertier tersebut merupakan kepemilikan barang-barang mewah (relatif mahal). Disini juga muncul rasa hargadiri, kebanggaan, dan kepuasan. Contoh kebutuhan tertier, antara lain: televisi, mobil (termasuk pemilikan mobil mewah), rumah mewah, vila, pola hidup mewah, menu makanan yang relatif modern, dan lain sebagainya yang biaya perolahnya relatif besar.

Tujuan hidup bagi setiap manusia adalah memperoleh kesejahteraan. Setiap manusia melakukan usaha adalah untuk memperoleh pendapatan yang layak. Bagi mereka yang mempunyai penghasilan pas-pasan, maka dapat memenuhi kebutuhan primer saja. Apabila pendapatan mengalami kenaikan maka kebutuhan sekunder mulai terpenuhi. Begitu juga jika pendapatan selalu meningkat, sudah jelas manusia tersebut berusaha



meningkatkan kesejahteraannya melalui pemenuhan kebutuhan tertier. Jadi Kebutuhan tertier dapat dipenuhi bagi suatu keluarga apabila sudah mempunyai penghasilan yang layak.

Bagi suatu keluarga yang mempunyai penghasilan relatif rendah, namun dari sisi penampilannya (gaya hidup) seperti orang yang berpenghasilan tinggi maka gaya hidup orang tersebut dikebak dengan *demonstration effect*. *Demonstration effect* adalah orang miskin yang meniru-niru gaya kehidupan orang kaya. Tujuannya adalah supaya dia dipandang oleh orang lain juga merupakan orang yang ekonominya mampan. Padahal semuanya itu adalah bohongan ekonomi rumah tangga. Hal tersebut akan membuat orang akan jatuh kepada kemiskinan.

Suatu keluarga dikatakan sejahtera apabila keluarga tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya relatif sempurna. Artinya setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga tersebut. Kebutuhan setiap keluarga akan sangat berbeda sekali, karena itu tingkat konsumsi keluarga juga relatif berbeda. Bagi suatu keluarga pemilikan rumah mewah merupakan kebutuhan dan kebanggaan, namun bagi keluarga lain barangkali cukup mempunyai rumah yang biasa saja, tapi punya mobil buatan eropa sudah merupakan kebanggaan tersendiri pula.

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2008), sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu keluarga dapat ditelusuri melalui pengeluaran keluarga melalui: pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, komunikasi, kebutuhan listrik, dan asuransi. Ketujuh kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan sekunder dan tertier bagi suatu keluarga. Suatu keluarga tidak akan memenuhi kebutuhan tersebut apabila kebutuhan primernya belum terpenuhi.

Pendidikan

Di Indonesia pendidikan dasar yang dikenal dengan wajib belajar sembilan tahun (wajib 9 tahun) merupakan program pemerintah. Bahkan pemerintah untuk program wajib 9 tahun biaya operasional sekolah ditanggung sepenuhnya (khusus untuk sekolah negeri). Artinya biaya sekolah wajib 9 tahun bagi putra-putri Indonesia relatif rendah. Timbul pertanyaan, siapa yang



ikut pendidikan gratis tersebut? mereka golongan ekonomi mana yang ikut menikmati sekolah gratis itu?

Rata-rata murid yang mengenyam pendidikan di sekolah gratis tersebut sebagian besar adalah orang tua yang ekonominya kurang mampu atau mereka yang berda di pedesaan. Bagi ekonomi yang mampu di pdesaan juga ikut sekolah gratis karena tidak ada pilihan. Bagi keluarga yang ekonominya relatif mampu justru memilih sekolah swasta yang biayanya relatif mahal. Keluarga ini beranggapan bahwa membayar dengan mahal mereka akan memperoleh tingkat keuasan yang relatif seimbang dengan pengorbanan yang dikeluarkan.

Menyekolahkan anak di sekolah biayanya yang relatif lebih murah mereka tidak mendapat keuasan terutama dari cara dan fasilitas pendidikan di sekolah. Bagi mereka yang ekonomi mampu akan menjatuhkan pilihan untuk pendidikan anak-anaknya di sekolah yang bagus tenta saja diimbangi dengan baiaya yang seimbang. Disini muncul kepuasan keluarga dalam pendidikan anak. Kepuasan ini harus dibayar mahal. Hanya keluarga ekonomi mampu yang dapat melakukan ini semua.

Bagi keluarga ekonomi mampu pendidikan merupakan kebutuhan utama guna meraih kesejahteraan jangka panjnag untuk generasi berikutnya. Mereka sanggup mengeluarkan dana investasi untuk pendidikan bermutu terhadap anak-anak mereka. Justru keluarga mampu telah mempunyai anggaran pendidikan anak-anaknya dimasa datang. Anggaran pendidikan ini pada umumnya telah direncanakan melalui tabungan, investasi, dan asuransi pendidikan. Ini semua hanya dapat dilakukan bagi keluarga yang ekonominya mampan. Sementara keluarga miskin belum memikirkan anggaran pendidikan, karena mereka baru terfokus pada kebutuhan primer semata.

Kesehatan

Kesehatan merupakan kunci untuk meraih kesejahteraan. Guna mempertahankan kesehatan yang prima bagi seseorang membutuhkan pemeliharaan kesehatan yang baik. Bagi keluarga yang ekonominya mampu, kesehatan dari sisi ekonomi sangat mahal harganya. Sebagai contoh, suatu keluarga ingin mempertahankan kesehatannya selalu prima, maka keluarga



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

tersebut membutuhkan perawatan dirinya yang teratur. Mereka selalu berkonsultasi dengan dokter, mengkonsumsi makanan yang bermutu tinggi dan mengandung vitamin, memiliki alat olah raga yang baik, bahkan mengkonsumsi suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Semuanya ini membutuhkan biaya.

Bagaimana suatu keluarga bisa sejahtera apabila ada salah satu anggota keluarga yang sakit. Bagi keluarga yang kehidupannya mampan, biaya perawatan cukup tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin. Bagi keluarga kaya berobat bisa ke dokter spesialis dan perawatan lebih cenderung ke rumah sakit swasta bahkan ke luar negeri. Namun bagi keluarga miskin berobat cukup ke puskesmas atau untuk mereka di pedesaan mengandalkan dukun semata.

Jadi tingkat kesejahteraan dari sisi kesehatan dapat dilihat bagaimana suatu keluarga tersebut menyisihkan sebagian pendapatannya dalam upaya mempertahankan kesehatan. Biaya ini dapat dilihat secara langsung dan tidak langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan secara langsung antara lain: biaya konsultasi dengan dokter, biaya perawatan di rumah sakit, pembelian obat yang disarankan oleh dokter (resep). Biaya kesehatan secara tidak langsung antara lain: konsumsi untuk suplemen, biaya peralatan olah raga, merubah pola makanan kepada yang lebih bergizi dan berkualitas.

Transportasi

Keluarga ekonomi menengah ke bawah sarana transportasi lebih banyak menggunakan sarana transportasi umum. Sudah barang tentu pengeluaran sebagian pendapatan dalam bentuk konsumsi sangatlah rendah dibandingkan dengan orang kaya. Bagi keluarga ekonomi menengah ke atas lebih banyak menggunakan sarana transportasi pribadi. Dari dua bentuk sarana transportasi ini menunjukkan pengeluaran rumah tangga yang berbeda.

Bagi keluarga ekonomi mampan, mereka memiliki mobil pribadi sampai beberapa buah untuk kebutuhan sarana transportasi keluarga. Fasilitas tersebut membutuhkan biaya yang tinggi seperti perawatan, bahan bakar, komponen kendaraan, perawatan kendaraan, pajak kendaraan. Semuanya ini adalah bagian dari konsumsi rumah tangga.



Rekreasi

Kegiatan rekreasi merupakan bagian dari kesehatan. Rekreasi merupakan cerminan juga dari kesejahteraan suatu keluarga. Rekreasi membutuhkan biaya yang juga cukup tinggi bila dibandingkan dengan jenis konsumsi yang lain. Yang termasuk bagian dari rekreasi adalah, antara lain: berlibur, berkunjung ke tempat keluarga di luar kota, berakhir pekan dengan keluarga, olah raga, *shopping* ke mal atau ke luar negeri, dan lain sebagainya.

Kita ambil contoh olah raga keluarga kaya, antara lain: golf, bowling, tenis, berkuda, terbang layang, selam, selancar, balet, dansa, balap motor/mobil. Semuanya itu membutuhkan investasi yang relatif tinggi. Sudah barang tentu jenis olah raga ini tidak diminati oleh keluarga yang ekonominya pas-pasan.

Bagi keluarga miskin, rekreasi ini belum merupakan kebutuhan karena biayanya cukup tinggi. Oleh karena itu rekreasi lebih banyak dinikmati bagi keluarga kaya atau ekonominya sudah mulai mampan.

Komunikasi

Sarana komunikasi merupakan kebutuhan primer bagi semua golongan ekonomi, namun yang membedakan antara orang miskin dengan orang kaya adalah fasilitas dan perkengkapan komunikasi tersebut. Dari sisi lain juga membedakannya adalah pengeluaran untuk komunikasi seperti biaya bulanan atau pulsa telepon.

Komunikasi juga mencerminkan kemajuan suatu keluarga dari sisi informasi. Keluarga kaya membutuhkan informasi yang lengkap terkait dengan aktifitasnya sehari-hari. Mulai dari informasi tentang keluarga (baik dekat maupun jauh) sampai kepada kegiatan dunnia kerja (kantor dan bisnis). Sudah barang tentu frekuensi pemakainnya sangat mempengaruhi pengeluaran rumah tangga.

Investasi peralatan komunikasi yang dimiliki oleh keluarga antara lain: pesawat telepon/fax, handphone, radio dan sejenisnya, televisi, kamera, handycam. Jenis kepemilikan alat komunikasi tersebut memperlihatkan strata ekonomi keluarga.



Kebutuhan Listrik

Keluarga kaya kebutuhan listrik di rumah tangganya sangat tinggi. Semua aktivitas di rumah pada umumnya sangat tergantung kepada listrik. Kebutuhan akan listrik ini merupakan bagian dari kesejahteraan suatu keluarga. Hal ini sangat beralasan, karena pemenuhan kebutuhan rumah tangga memakai alat elektronik merupakan kebutuhan primer bagi suatu rumah tangga yang ekonominya mampan, antara lain: alat pendingin ruangan (AC), televisi, alat masak, peralatan air (pompa, pemanas air), elektronik lainnya yang mendukung aktivitas di rumah tangga.

Semakin tinggi tagihan rekening listrik, menunjukkan kebutuhan akan listrik di keluarga tersebut sangat tinggi, beban biaya rekening merupakan pengeluaran rumah tangga. Artinya semakin tinggi beban rekening listrik memperlihatkan tingkat pemakaiannya tinggi, dan ini bisa menjadi indikator kesejahteraan suatu keluarga.

Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis jaminan kesejahteraan jangka panjang. Pada tahap awal si nasabah hanya melakukan pembayaran sebagai premi untuk jenis barang dan jasa yang dijaminakan untuk masa depan. Bentuk jaminan dimasa depan tersebut antara lain: asuransi jiwa (dengan segala macam jenis), asuransi kesehatan, asuransi pendidikan untuk putra-putri, asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi kebakaran, dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan bagian dari pengeluaran rumah tangga yang pemanfaatannya dapat diperoleh pada masa datang. Asuransi merupakan investasi untuk masa datang dalam bentuk jaminan kesejahteraan keluarga.

D. Investasi Sumberdaya Manusia dalam Pembangunan Ekonomi

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan dimasa datang. Setiap manusia dituntut kompetensi individunya untuk berinovasi guna memacu pembangunan ekonomi di segala bidang. Kualitas SDM itu ditingkatkan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Meningkatkan kualitas SDM merupakan investasi manusia jangka panjang, karena setiap orang menempuh jalur



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pendidikan tidak secara otomatis menjadikan dirinya berkualitas. Masih diperlukan proses dalam dunia kerjanya menuju ke jenjang yang lebih ahli atau berkualitas.

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari segi ekonomi tapi sejauh mana pembangunan itu bisa meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM). Dalam pembangunan berkelanjutan dewasa ini tidak hanya ditunjang oleh pembangunan ekonomi tetapi juga oleh pembangunan SDM. Karena itu investasi pada aspek manusia sebagai modal dasar pembangunan sangat didahulukan.

Peningkatan kualitas SDM juga merupakan tuntutan yang tumbuh sebagai akibat perkembangan pembangunan yang makin cepat dan kompleks. Perkembangan ekonomi, industrialisasi, arus informasi, dan perkembangan iptek yang pesat makin membuat kualitas SDM sangat dibutuhkan. Pembangunan SDM dapat dilakukan melalui empat jalur kebijaksanaan yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup yang meliputi kualitas manusia seperti jasmani, rohani maupun kualitas kehidupan; 2) Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya penyebarannya; 3) Peningkatan SDM yang berkembang dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan penguasaan iptek; dan 4) Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat yang mendukung peningkatan kualitas SDM.

Pada saat ini, SDM Indonesia sebagai salah satu sumberdaya pembangunan masih merupakan potensi. Pertumbuhan SDM yang cepat, tetapi dengan kualitas yang masih rendah, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumberdaya pembangunan. Sehubungan dengan itu pemerintah Indonesia mulai mencanangkan perbaikan mutu pendidikan sejak pendidikan dasar yakni melalui penerapan pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak Indonesia. Kurikulum disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sistem pendidikan diperguruan tinggi semakin diperbaiki melalui peningkatan mutu pendidikan dan kualitas tenaga kependidikan.

SDM merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi,



Sumberdaya alam (SDA), dan kapasitas produksi yang terpasang dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun diantaranya peranan SDM mengambil tempat yang sentral khususnya dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dimana kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu SDM sangat dipengaruhi oleh peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Pendidikan dan Pelatihan

Telaahan mengenai peran pendidikan dalam pembangunan biasanya berpangkal pada saran pendapat bahwa pendidikan merupakan prasarat untuk meningkatkan martabat manusia. Melalui pendidikan warga masyarakat mendapat kesempatan untuk membina kemampuannya dalam mengatur kehidupannya secara wajar. Perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, berarti membuka kesempatan ekonomi untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Satu sama lain akan mendukung terlaksananya pemerataan pendapatan masyarakat.

Selama dasawarsa yang lampau sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah negara berkembang dibidang pendidikan formal. Kesempatan untuk pendidikan sudah diperluas, namun hal itu dalam arti kuantitatif. Jalur pendidikan formal yang semakin meluas belum juga menunjukkan hasil yang diharapkan. Kalau diukur dengan serangkaian masalah yang harus ditanggulangi secara lebih mendasar, pengangguran (terbuka maupun terselubung) yang masih cenderung meningkat dengan bertambahnya angkatan kerja yang keterampilannya masih terbatas. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja mendesak ke arah penambahan tempat belajar. Dalam suatu tahap, hal itu memang dilakukan akan tetapi semata-mata secara kuantitatif dan tidak disertai oleh usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan.

Pembinaan mutu SDM dalam rangka pembangunan ekonomi harus diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan dan meluaskan keterampilan teknis, keahlian profesional, dan kecerdasan akademis (*technical skill, professional expertise and academic qualitie*) dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Ditinjau dari sudut penerimaan pendapatan, maka beda antara pendapatan yang diterima oleh seorang keluaran pendidikan tinggi dengan pendapatan seorang tenaga kerja yang hanya mendapatkan pendidikan dasar, tidak begitu besar. Padahal biaya pendidikan tinggi per pelajar adalah 88 kali lebih besar dibandingkan dengan biaya per anak sekolah di tingkat pendidikan dasar. Ketimpangan nisbi pada penerimaan pendapatan dibandingkan dengan tingkat biaya untuk pendidikan tinggi bagaimanapun juga mencerminkan ketimpangan pada tingkat produktivitas dalam ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Artinya, dari sudut kepentingan masyarakat secara menyeluruh kenaikan produktivitas seorang keluaran pendidikan tinggi (diukur dengan pendapatan yang diterimanya) secara nisbi tidak memadai dengan biaya investasi dalam pendidikan.

Disuatu pihak tuntutan zaman mengharuskan agar mutu pendidikan ditingkatkan dan kalau perlu dengan membatasi perluasannya secara kuantitatif. Di pihak lain, akan dihadapi secara terus menerus desakan masyarakat agar disediakan kesempatan pendidikan yang semakin meluas dengan fasilitasnya yang semakin banyak, kendatipun dengan mengabaikan segi mutunya.

Kunci kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya adalah memperbaiki mutu tenaga pengajar dan membina motivasi golongan pengajar. Dikebanyakan negara berkembang tenaga pengajar di sekolah dasar mendapat pendidikan di sekolah lanjutan atas ataupun dengan pelatihan melalui kursus-kursus.

Kellemahan pokok dalam sistem pendidikan di negara berkembang termasuk Indonesia terletak pada sistem dan struktur pendidikan umum di tingkat menengah dan langsung berkaitan dengan pendidikan guru yang diperlukan. Hal ini disebabkan oleh kompartementasi karena terlalu dini diadakan pemisahan diantara berbagai rupa jurusan, di samping itu banyaknya mata pelajaran/kuliah yang tumpang tindih.

2. Kesehatan Rakyat dan Pembangunan

Tekanan penduduk yang semakin bertambah mengandung akibat bahwa persyaratan minimal mengenai mutu gizi dalam makanan tidak memadai. Begitu pula mengenai fasilitas medis dan pelayanan kesehatan umum. Dampak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

negatif dari pertumbuhan penduduk yang sangat tidak terkendali sangat luas dan mendalam. Di keluarga yang tidak melakukan program keluarga berencana dan mempunyai banyak anak, maka anak-anak yang lebih muda sering kali dihindangi penyakit *malnutrition*. Walaupun keluarga menjadi semakin lebih besar, hal itu sering tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan yang sepadan. Penyediaan pangan maupun perhatian kesehatan terhadap anak-anak yang lebih kecil secara nisbi menjadi berkurang.

Kekurangan gizi menjadi salah satu penyebab bagi gangguan kesehatan dan kematian yang prematur. Sering tidak terpenuhi kebutuhan kalori sehari-hari yang diperlukan secara minimal untuk menjaga kesehatan.

Persyaratan minimal mengenai kebutuhan kalori, protein, vitamin dan unsur-unsur mineral dalam makanan harus amat diperhatikan dari sudut mutu SDM dalam proses pembangunan. Hal itu sama lain mempengaruhi pertumbuhan fisiknya maupun kemampuan nalarnya dan perkembangan mentalnya.

Dari beberapa masalah dan target untuk meningkatkan SDM kita tidak terlepas dari faktor ekonomi terutama masalah investasi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas SDM supaya target pembangunan di masa datang dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk meningkatkan kualitas SDM perlu dipersiapkan mulai dari kebutuhan makanan yang menyangkut dengan perbaikan gizi, sampai kepada penyempurnaan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan di masa depan. Sudah barang tentu membutuhkan investasi yang sangat besar sekali terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana.

Untuk perbaikan gizi pemerintah Indonesia telah memulai sejak PJP I (awal tahun 1980-an) yaitu diterapkannya pemakaian Air Susu Ibu (ASI), penyediaan posyandu dengan tenaga medis dan bermacam imunisasi untuk ibu hamil dan anak balita, perbaikan gizi, semuanya ini untuk meningkatkan kualitas manusia masa depan dan memperpanjang harapan hidup anak Indonesia. Sehingga pada generasi yang akan datang diharapkan anak Indonesia mampu menjadi manusia yang berkualitas yang dapat menyokong roda pembangunan di masa akan datang.

Program yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dengan penerapan perbaikan gizi melalui posyandu dalam upaya memperpanjang



harapan hidup anak Indonesia. Perbaikan gizi diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dari sisi fisik dan nonfisik. Pembangunan ekonomi di masa datang sangat tergantung kepada kualitas angkatan kerja dari sisi jasmani dan rohani. Karena itu perbaikan gizi dimulai dari anak usia dini. Semuanya itu harus didukung oleh program kesehatan masyarakat melalui kebijakan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



BAB IV TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN DI WILAYAH PEDESAAN

Teori Pembangunan Ekonomi

Setiap negara bekerja keras untuk membangun. Kemajuan ekonomi adalah komponen utama pembangunan, tetapi bukan merupakan satu-satunya. Pembangunan bukan saja fenomena ekonomi. Pembangunan harusnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial.

Pembangunan ekonomi bukanlah konsep baru. Selama berpuluh-puluh tahun silam, para ahli ilmu sosial telah bergulat dengan masalah pembangunan ekonomi, tetapi mereka belum berhasil mengembangkan suatu teori pertumbuhan ekonomi yang tersusun secara sistematis. Berikut ini dicoba menyajikan beberapa teori pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi, sehingga dapat menjadi suatu bahan perbandingan.

1. Teori Pembangunan Klasik

Aliran Klasik muncul pada akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 19, yaitu di masa revolusi industri. Suasana pada waktu itu merupakan awal bagi perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela dan menurut Klasik pertumbuhan ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Teori Klasik tentang pembangunan ekonomi membicarakan tentang: (1) Kebijakan pasar. Ahli ekonomi Klasik meyakini adanya perekonomian, persaingan sempurna, pasar bebas yang secara otomatis bebas dari campur tangan pemerintah. Dalam kegiatan ekonomi dapat memaksimumkan keuntungan melalui tangan-tangan yang tak kelihatan; (2) Pemupukan modal. Semua kaum Klasik memandang pemupukan modal merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi. Karena itu mereka menekankan arti tabungan dalam jumlah yang besar; (3) Keuntungan, rangsangan bagi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

investasi. Semakin besar keuntungan yang diperoleh dari penanaman investasi, maka semakin besar pula akumulasi modal dan investasi; (4) Keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan naik secara terus menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan antara kapitalis cenderung meningkat; dan (5) Keadaan stasioner. Ahli ekonomi Klasik meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada akhir proses pemupukan modal. Sekali keuntungan mulai menurun, proses ini akan berlangsung terus sampai keuntungan mencapai nol, pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal berhenti, dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minimal. Sehingga Malthus menyatakan adanya korelasi antara pertumbuhan penduduk dengan persediaan makanan.

Teori Pembangunan Adam Smith

Adam Smith (1723-1790) bapak dari ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Tetapi dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) yang terkenal dengan buku *Wealth of Nations* yang tema pokoknya mengenai bagaimana perekonomian itu tumbuh.

Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi yaitu pertumbuhan output (GNP) total, dan pertumbuhan penduduk. Kedua aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu; sumber-sumber alam, manusia (pembagian kerja), dan stok barang.

Smith meyakini berlakunya doktrin hukum alam dalam persoalan ekonomi. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraannya secara agregat. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perdagangan. Kekuatan pasar persaingan sempurna merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, dan cenderung untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.

Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori pembangunan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja.



...a menghubungkan kenaikan itu dengan; 1) meningkatnya keterampilan pekerja; 2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; dan 3) penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga.

Dari sisi pemupukan modal harus dilakukan dahulu dari pada pembagian kerja, karena pemupukan modal dalam bentuk barang harus lebih dahulu dilakukan sebelum pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai salah satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi, dengan demikian masalah pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal.

Teori Ricardian

David Ricardo (1772-1823) dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation* ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi Klasik. Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber-sumber alam) tidak dapat ditambah, sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.

Teori pembangunan ekonomi Ricardo ditandai oleh beberapa ciri-ciri antara lain (1) Tanah terbatas jumlahnya; (2) tenaga kerja (penduduk) yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah; (3) Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada di atas tingkat keuntungan minimal; (4) Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi; (5) Sektor pertanian dominan; (6) Berlaku bagi tanah hukum hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing return*).

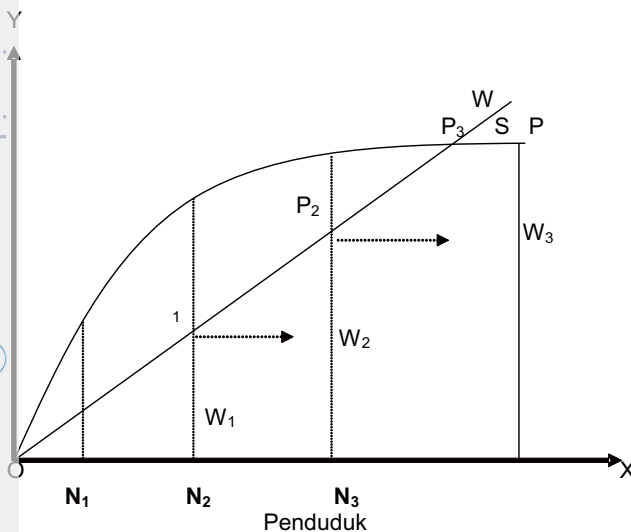
Dalam teorinya Ricardo mengatakan, apabila potensi sumber-sumber alam telah dieksploitir secara penuh maka perekonomian berhenti tumbuh. Masyarakat mencapai posisi stasioner, dengan ciri-ciri sebagai berikut (Mudrajat Kuncoro, 2000): 1) Tingkat output (GDP) konstan (berhenti berkembang); 2) Jumlah penduduk konstan (berhenti bertambah); 3) Pendapatan per kapitan konstan (akibat poin 1 dan 2); 4) Tingkat upah pada tingkat upah alamiah; 5) Tingkat keuntungan berada pada keuntungan minimal; 6) Akumulasi kapital berhenti; dan 7) Tingkat sewa tanah yang maksimal.

Gerakan menuju stasioner dalam model Ricardo diterangi melalui Gambar 4.1. Jumlah penduduk digambarkan pada sumbu horizontal, dan



1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Dari apa yang telah diuraikan, teori Ricardo mempunyai kelemahan tertentu, diantaranya: 1) Mengabaikan pengaruh teknologi; 2) Pengertian yang salah tentang keadaan stasioneri; 3) Pengertian yang salah tentang penduduk; 4) Kebijakan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan; 5) Mengabaikan faktor-faktor kelembagaan; 6) Teori Ricardo adalah teori distribusi, bukanlah teori pertumbuhan; 7) Tanah juga menghasilkan selain dari gandum; dan 8) Modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap.



Gambar 4.1. Keadaan Menuju Stasioner



Teori Pembangunan Malthus

Dalam bukunya *Principles of Political Economy* pada tahun 1820 yang terkenal dengan teori kependudukan, kemudian di keluarkan teori tentang pembangunan ekonomi dalam bukunya *The Progress of Wealth* pada tahun yang sama.

Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malah proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat. Malthus lebih menitikkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri.

Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk melangsungkan pembangunan ekonomi. Malahan pertumbuhan penduduk akibat dari proses pembangunan. Ia mengatakan pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan apabila dapat meningkatkan permintaan efektif. Untuk itu ada beberapa saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yaitu:

- Pertumbuhan yang berimbang. Di dalam sistem Malthus perekonomian dibagi menjadi sektor pertanian dan industri. Kemajuan teknologilah di kedua sektor itu yang dapat membawa kepada pembangunan ekonomi.
- Menaikkan permintaan efektif. Selain kemajuan teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi juga harus diimbangi dengan meningkatnya permintaan efektif. Untuk itu perlu langkah-langkah sebagai berikut; *Pertama*, pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara adil; *Kedua*, permintaan efektif dapat ditingkatkan melalui perluasan perdagangan internal dan eksternal., karena perdagangan akan meningkatkan keinginan, hasrat, dan selera untuk mengkonsumsi yang sasarannya untuk menjaga harga di pasar komoditi; *Ketiga*, mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Keterbatasan teori Malthus, antara lain: 1) Stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal; 2) Pandangan negatif terhadap akumulasi modal; 3) Komoditas tidak dipertukarkan dengan komoditi secara langsung; 4) Konsumen tidak produktif memperlambat kemajuan; dan 5) Dasar tabungan bersisi satu.

2. Teori Schumpeter

Josept Schumpeter hidup di zaman modern (1883-1950), teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonom Klasik. Bukunya yang mengungkapkan pertumbuhan ekonomi *Theory of Economic Development* (1911), kemudian diuraikan dalam buku *Business Cycles* (1939), dan *Capitalism, Socialism, and Democracy* (1942).

Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Keseimbangan ini ditandai oleh arus sirkuler yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Menurut Schumpeter pembangunan adalah perubahan yang spontan terputus-putus pada saluran-saluran arus sirkuler tersebut; gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya. Unsur pertama terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan tersebut berupa inovasi yang pelakunya adalah wiraswasta atau inovator atau entrepreneur.

Inovasi itu terdiri dari: (1) pengenalan barang baru; (2) pengenalan metode produksi baru; (3) pembukaan pasar baru; (4) penemuan sumber-sumber ekonomi baru; dan (5) menjalankan organisasi baru dalam industri. Schumpeter mengatakan, pengenalan produk baru dan perbaikan terus menerus pada produk inilah yang membawa kepada pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu sumber kenaikan output, tetapi ia bukanlah suatu sumber yang menarik atau yang paling penting. Yang lebih menarik adalah kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi yang disebabkan adanya inovasi tadi. Inovasi ini berarti perbaikan teknologi dalam arti luas.

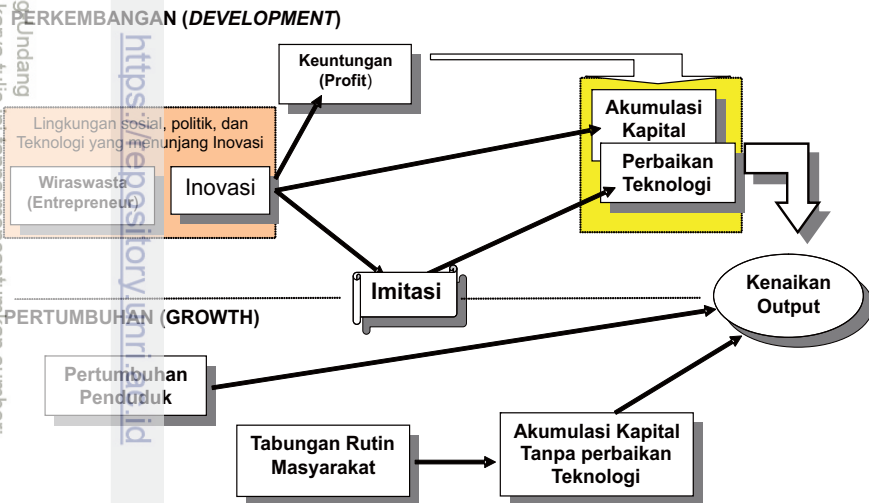
Inovasi mempunyai tiga pengaruh yaitu: (1) diperkenalkannya teknologi baru; (2) inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital; dan (3) inovasi pada tahap-tahap



Selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut.

Proses imitasi ini mempunyai pengaruh berupa: 1) Menurunnya keuntungan monopolis yang dinikmati oleh para inovator; 2) Penyebaran teknologi baru di dalam masyarakat (teknologi tersebut tidak lagi menjadi monopoli para inovatornya)

Dalam analisis Schumpeter membedakan antara pertumbuhan ekonomi (*growth*) dengan perkembangan ekonomi (*development*) seperti disajikan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Proses Kemajuan Ekonomi

1. 3. Teori Keynes

Menurut John Maynard Keynes (1936) semakin besar pendapatan nasional semakin besar volume pekerja yang dihasilkan, demikian sebaliknya. Volume pekerja tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Keynes mengemukakan beberapa syarat pokok dalam kemajuan ekonomi, yaitu: (1) kemampuan mengendalikan penduduk; (2) kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil; (3) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan mempedomani hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan; (4) tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produk dan konsumsi.

Teori yang dikembangkan oleh Keynes ini tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosio-ekonomi. Teori ini hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. Untuk penerapannya di negara terbelakang bersifat terbatas. Asumsi yang dipakainya adalah sebagai berikut: 1) Teori Keynes didasarkan adanya pengangguran siklis yang terjadi selama depresi. Pengangguran ini disebabkan oleh menurunnya permintaan efektif. Pengangguran ini dapat dihilangkan dengan menaikkan permintaan efektif; 2) Analisis Keynes merupakan analisis periode jangka pendek; 3) Teori Keynes didasarkan pada perekonomian tertutup, tetapi negara terbelakang bukanlah perekonomian tertutup, karena perdagangan luar negeri memainkan peranan yang dominan; 4) Adanya penawaran lebih faktor komplemen, faktor tenaga kerja dan sumber perlengkapan lainnya dalam perekonomian.

Peralatan yang dipakai Keynes untuk menguji kebenaran teorinya bagi negara terbelakang, antara lain adalah: 1) Permintaan efektif. Pengangguran merupakan akibat dari kurangnya permintaan efektif dan untuk mengatasinya Keynes menyarankan agar memperbesar pengeluaran konsumsi dan non konsumsi; 2) Kecenderungan mengkonsumsi; 3) Kecenderungan menabung. Ia menyorot tabungan sebagai sifat sosial yang buruk, karena menabung menyebabkan berkurangnya permintaan agregat; 4) Kecenderungan marginal modal; 5) Suku bunga. Suku bunga merupakan faktor penentu kedua investasi; 6) *Multiplier*. Konsep ini didasarkan pada asumsi: (a) pengangguran terpaksa; (b) kurva penawaran output yang tidak elastis; (c) kapasitas lebih pada industri barang konsumsi; dan (d) penawaran modal kerja bersifat elastis; dan 7) Langkah-langkah kebijaksanaan.

4. Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi Rostov

Rostov dalam proses perkembangan ekonomi membagi lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu: 1) Masyarakat tradisional; 2) Pra-syarat tinggal



landas; 3) Tinggal landas; 4) Dorongan menuju kedewasaan; dan 5) Era konsumsi massa dan besar-besaran.

Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi. Struktur sosial masyarakat ini berjenjang; hubungan darah dan keluarga sangat menentukan. Kekuasaan politik terpusat di daerah, ditangan bangsawan pemilik tanah yang didukung oleh sekelompok serdadu dan pegawai negeri.

Tahap-Syarat Tinggal Landas

Tahap kedua ini merupakan masa transisi dimana prasarat-prasarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Manusia-manusia baru yang mau bekerja keras muncul memasuki sektor ekonomi, mereka bersedia mengambil resiko untuk mengejar keuntungan. Pada tahap ini telah muncul perusahaan-perusahaan manufakturing yang menggunakan metode baru, sehingga kegiatan mereka mengarah kepada industrialisasi. Prasarat yang diperlukan untuk mempertahankan industrialisasi menurut Rostov adalah: (1) Perluasan modal overhead sosial khususnya dibidang transpor untuk memperluas pasar, menggarap sumberdaya alam yang lebih produktif; (2) revolusi teknologi di bidang pertanian, sehingga produktivitas pertanian meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduk; (3) perluasan impor, termasuk impor modal yang dibiaya oleh produksi yang efisien dan pemasaran sumber alam untuk diekspor.

Tinggal Landas

Tahap ini merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya, kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Rostov mendefinisikan tinggal landas sebagai revolusi industri yang bertalian secara langsung dengan perubahan radikal di dalam metode produksi, dalam jangka waktu yang relatif singkat menimbulkan konsekuensi yang menentukan.

Syarat tinggal landas menurut Rostov: (1) kenaikan laju investasi produktif melebihi 10 persen dari pendapatan nasional; (2) perkembangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi; (3) hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial dan organisasi yang menampung hasrat ekspansi di sektor modern dan memberikan daya dorong pada pertumbuhan.

Dorongan Menuju Kedewasaan

Tahap ini masyarakat telah menerapkan teknologi modern terhadap keseluruhan sumberdaya mereka. Pada tahap ini ada tiga perubahan penting yang terjadi, yaitu: (1) sifat tenaga kerja berubah menjadi tenaga kerja terdidik. Orang lebih suka tinggal di kota dari pada di desa. Upah nyata mulai meningkat, orang telah memikirkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar; (2) watak pengusaha berubah, pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan; (3) masyarakat merasa bosan dengan kejajaiban industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan lebih jauh.

Era Konsumsi Massa dan Besar-besaran

Tahap ini ditandai dengan migrasi besar-besaran ke pinggir kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Pada tahap ini keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas. Dalam tahap ini terlihat tiga kekuatan yang tampak cenderung meningkatkan kesejahteraan, yaitu: (1) penerapan kebijaksanaan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh; (2) ingin memiliki satu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, jaminan sosial, fasilitas hiburan; (3) keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting.

B. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base*)

Teori *economic base* menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi sektor industri di suatu daerah yang menggunakan sumberdaya produksi lokal, termasuk



tenaga kerja, bahan baku, dan outputnya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan peluang kerja (*job creation*) di daerah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada tekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Lincoln Arsyad, 1999).

Ferroux dalam Mudrajat Kuncoro (2002) merupakan orang pertama mengemukakan konsep pusat pertumbuhan ekonomi (*economic growth center*). Ferroux menyatakan pusat pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu tempat dalam suatu ruang atau suatu wilayah, darimana kekuatan-kekuatan sentrifugal memancar dan kemana kekuatan-kekuatan sentripental ditarik. Di dalam suatu proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi di seluruh wilayah secara serentak melainkan akan bekerja kearah pengelompokan aktivitas ekonomi yang akhirnya membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Setiap pusat pertumbuhan ekonomi akan mempunyai daerah penarikan dan daerah penolakan sampai batas tertentu, sehingga dalam suatu wilayah yang luas akan terbentuk gugusan-gugusan pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*) masing-masing. Konsep pusat pertumbuhan ekonomi ini sebagai suatu gugusan industri-industri, baik yang saling terkait maupun yang berdiri sendiri-sendiri, yang kemudian berkembang menjadi kota dan berlokasi pada suatu tempat tertentu dalam suatu wilayah.

Setiap pusat pertumbuhan ekonomi akan mempunyai daerah penarikan dan daerah penolakan sampai batas tertentu, sehingga dalam suatu wilayah yang luas akan terbentuk gugusan-gugusan pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*) masing-masing. Menurut Ayub M. Padangaran (1999) konsep pusat pertumbuhan ekonomi ini kemudian dikembangkan dan dijelaskan lebih lanjut oleh Myrdal, Hirschman, Friedman dan Alonso, Boudevile, Hermensen, Hansen, Darwent, dan Richardson



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

sebagai suatu gugusan industri-industri, baik yang saling terkait maupun yang berdiri sendiri-sendiri, yang kemudian berkembang menjadi kota dan berlokasi pada suatu tempat tertentu dalam suatu wilayah.

Dalam ilmu ekonomi regional teori pusat pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai salah satu instrumen pembangunan wilayah yang cukup baik karena dapat menimbulkan beraneka efek atau dampak yang positif terhadap pembangunan wilayah yang ada disekitarnya (Richardson, 1977). Pusat pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan efek tetesan ke bawah (*trickling down effect* atau *spread effect*) dan efek polarisasi (*polarization effect* atau *backwash effect*) pada wilayah yang ada disekitarnya (*hinterland*), pendapatan wilayah akan lebih besar jika investasi pembangunan dikonsentrasikan pada pusat pertumbuhan dibandingkan jika investasi pembangunan yang sama digunakan secara menyebar dalam seluruh wilayah yang bersangkutan. Efek pusat pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah sekitarnya masih bersifat umum, yaitu pusat-pusat pertumbuhan akan menyebarkan efek yang beraneka ragam terhadap perekonomian wilayah sekitarnya melalui saluran yang beraneka ragam pula.

Pendapat Feroux dijelaskan lebih rinci oleh Myrdal dalam Tulus T.H. Tambunan (2001a), pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan berkembang industri-industri yang akan memancarkan berbagai bentuk keuntungan (*spread effect*) ke wilayah sekitarnya berupa permintaan hasil-hasil produksi dari wilayah sekitarnya sehingga perekonomian wilayah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi akan ikut berkembang. Lebih lanjut Myrdal menjelaskan kemungkinan adanya efek negatif (*backwash effect*) dari suatu pusat pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah sekitarnya yaitu tertariknya atau mengalirnya tenaga kerja potensial dan modal dari wilayah sekitar ke pusat pertumbuhan sehingga wilayah sekitarnya akan kekurangan tenaga kerja yang inovatif atau produktif dan juga dapat mengalami kekurangan modal untuk melakukan atau mengembangkan usaha.

Hirschman (1958) menjelaskan lebih rinci tentang pendapat Myrdal, yaitu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merupakan daerah maju akan memberikan dua jenis efek ekonomi yang langsung terhadap wilayah sekitarnya yakni efek yang menyenangkan dan efek yang tidak menyenangkan. Efek yang dikemukakan pertama adalah efek menyebar ke



bawah (*trickling down effect*) yaitu meningkatnya pembelian hasil-hasil produksi dan terserapnya tenaga kerja menganggur dari wilayah sekitar oleh industri-industri yang ada di pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan efek yang tidak menyenangkan adalah efek polarisasi (*polarization effect*) yakni yang semakin lemahnya daya saing industri-industri yang ada di wilayah sekitar terhadap industri yang serupa di pusat pertumbuhan ekonomi sebagai akibat adanya penghematan aglomerasi.

Friedman (1964) juga menjelaskan mengenai efek pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi relatif berbeda dengan penjelasan Myrdal yaitu efek yang timbulkan oleh suatu pusat pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah sekitarnya dibagi menjadi lima kategori yaitu: 1) efek dominasi, yaitu perpindahan sumberdaya berupa tenaga kerja dan modal dari wilayah *hinterland* ke pusat pertumbuhan ekonomi; 2) efek informasi, yaitu makin besarnya hubungan dan interaksi antara wilayah sekitar dengan pusat pertumbuhan ekonomi; 3) efek psikologis, yaitu kecenderungan masyarakat pada wilayah *hinterland* untuk mengikuti perilaku dan pola hidup masyarakat yang ada di pusat pertumbuhan ekonomi; 4) efek modernisasi, yaitu terjadinya perubahan-perubahan nilai sosial yang cepat di wilayah *hinterland*; dan 5) efek ekonomi, yaitu terciptanya kondisi berupa imbalan atau hasil yang diperoleh dari setiap kegiatan usaha akan makin besar karena adanya spesialisasi dan peningkatan skala usaha di wilayah *hinterland*.

Pemikiran Mellor dan Lele (1973) serta Mellor (1976, 1984, 1989) amat terkenal dengan model *rural-led strategy of growth*. Johnston dan Kilby (1975) mengembangkan konsep *agricultural and structural transformation model*. King dan Byerlee (1978) menemukan bahwa keterkaitan industri dengan sektor pertanian amat kuat apabila sektor industri mempunyai keterkaitan ke belakang yang tinggi (Mudrajat Kuncoro, 2000).

Adelman (1987) menekankan pentingnya *agricultural demand-led industrialization* (ADLI). Dengan sejumlah analisis, ia membuktikan bahwa strategi ADLI lebih superior dibandingkan strategi *export-led growth*, khususnya apabila diterapkan di negara berkembang di mana peranan sektor pertanian masih substansial. Strategi ini menghendaki pergeseran strategi pertanian dari *surplus extraction* menjadi *surplus creation*, dan ditumbuhkan keterkaitan permintaan antara sektor pertanian dengan sektor lain dalam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

perekonomian. Ini sejalan dengan pemikiran Sumodiningrat dan Kuncoro (1990) yang mencoba menuangkan pola simbiosis antara sektor pertanian dan industri di Indonesia melalui strategi pengembangan agroindustri dan agribisnis. Banyak yang sependapat bahwa salah satu syarat perlu (*necessary condition*) untuk dapat dicapai transformasi struktural dari pertanian (industri primer) ke industri manufaktur (industri sekunder) adalah adanya keterkaitan sektor pertanian dan sektor industri yang tangguh. Kaitan yang paling sesuai adalah pengolahan produk-produk pertanian ke dalam pengembangan agroindustri (Mudrajad Kuncoro, 2000).

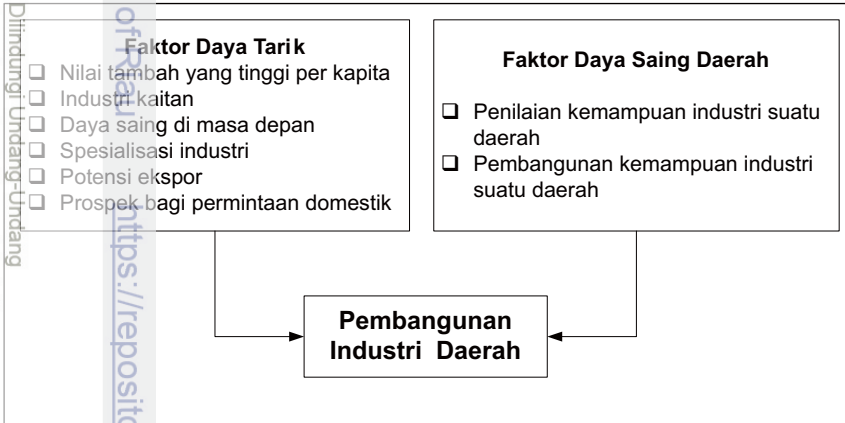
Pembangunan ekonomi daerah juga didukung oleh teori lokasi. Teori ini juga sering digunakan untuk penentuan dan pengembangan kawasan industri di suatu daerah. Pemikiran teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya seendah mungkin. Karena itu pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasikan biaya produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan bahan baku dan pasar (Tulus T.H. Tambunan, 2001). Di samping itu juga banyak faktor lain yang juga harus dipertimbangkan seorang pengusaha untuk memilih lokasi, seperti ketersediaan tenaga kerja, tingkat upah, biaya energi, ketersediaan pemasok bahan baku, komunikasi, infrastruktur, termasuk alat transportasi, sanitasi, fasilitas fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan kualitas pemerintah. Untuk pengembangan suatu lokasi industri di suatu daerah, apakah mampu setiap daerah menciptakan faktor-faktor lokasi insentif yang dapat menarik perusahaan-perusahaan dari luar daerah. Kalau pemerintah daerah mampu melakukan ini, maka akan terjadi *spread effect* di daerah tersebut.

Dalam upaya pembangunan ekonomi pedesaan di daerah Riau, maka industri yang diunggulkan adalah industri pengolahan hasil perkebunan (kelapa sawit). Pembangunan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, pemerintah daerah berusaha menarik investor dari luar, apakah dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Dalam kerangka pemikiran Kotler (1997), ada sejumlah faktor penentu pembangunan industri di suatu daerah, yaitu faktor daya tarik industri dan faktor daya saing daerah. Kerangka pemikiran Kotler tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Dari gambar tersebut dapat diuraikan faktor daya tarik industri di suatu daerah, yaitu:

1) Nilai tambah yang tinggi per kapita. Ini berarti industri tersebut memiliki sumbangan yang penting tidak hanya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga terhadap pembentukan PDRB.



Sumber: Kotler (1997)

Gambar 4.3 Faktor Penentu dalam Pembangunan Industri Suatu Daerah

- 2) Industri-industri kaitan. Perkembangan industri tersebut akan meningkatkan total nilai tambah daerah atau mengurangi kebocoran ekonomi dan ketergantungan impor.
- 3) Daya saing di masa depan. Ini sangat menentukan prospek dari pengembangan industri yang bersangkutan.
- 4) Spesialisasi industri. Sesuatu dasar pemikiran teori klasik mengenai perdagangan internasional, suatu daerah sebaiknya berspesialisasi pada industri-industri dimana daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif sehingga daerah tersebut akan menikmati *gain from trade*.
- 5) Potensi ekspor. Apabila suatu daerah memiliki *gain from trade*, maka daerah tersebut dapat mengekspor barangnya dengan biaya yang lebih rendah, karena adanya spesialisasi produk dari daerah tersebut.
- 6) Prospek bagi permintaan domestik. Ini akan memberikan suatu kontribusi yang berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui konsumsi lokal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Kotler (1997), faktor penyumbang pada daya tarik industri di suatu daerah/wilayah dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Faktor pasar. Termasuk faktor ini adalah ukuran pasar, ukuran segmen kunci, laju pertumbuhan pasar, keragaman pasar, kepekaan terhadap harga dan faktor eksternal, siklus dan musim, serta kemampuan tawar menawar.
- 2) Faktor persaingan. Antara lain tingkat pemusatan, substitusi disebabkan oleh progres teknologi, tingkat dan jenis integrasi, dan *entry rate* dan *exit rate*.
- 3) Faktor keuangan dan ekonomi. Faktor ini adalah nilai tambah, kesempatan kerja, keamanan, stabilitas ekonomi, pemanfaatan kapasitas produksi, skala ekonomis, dan ketersediaan infrastruktur keuangan.
- 4) Faktor teknologi. Berkaitan dengan teknologi adalah kompleksitas, diferensiasi, paten dan hak cipta, teknologi proses manufaktur yang diperlukan.

Berdasarkan pemikiran Doz dan Prohalad (1987) dalam Tulus T.H. Tambunan (2001a), keunggulan kompetitif yang ada atau yang potensial dari suatu daerah yang menentukan kemampuan industri di daerah tersebut tergantung pada: 1) daya saing-faktor-faktornya, yakni kekuatan relatif faktor-faktor produksinya yang mencakup sumberdaya fisik, sumberdaya manusia, dan teknologinya; 2) daya saing atau kekuatan relatif perusahaan-perusahaan di daerah tersebut. Pada Gambar 4.4 disajikan pendapat dari Doz dan Prohalad tentang penilaian kemampuan industri suatu daerah.



Sumber: Tulus T.H. Tambunan., 2001a

Gambar 4.4 Penilaian Kemampuan Industri Suatu daerah



Ketika daya saing faktor-faktor suatu daerah tinggi dan perusahaan-perusahaan lokalnya sangat kompetitif, maka industri di daerah tersebut akan berkembang pesat. Apabila daya saing perusahaan-perusahaan di daerah tinggi, namun daya saing faktor-faktornya rendah, maka akan timbul tekanan bagi investasi ke luar daerah (*outward investment*), yaitu investasi daerah-daerah lain yang mempunyai daya saing faktor yang tinggi. Apabila daya saing perusahaan-perusahaan di suatu daerah rendah, sedangkan faktor-faktor yang dimiliki daerah tersebut tinggi, maka akan timbul investasi ke dalam (*inward investment*) untuk industri-industri di mana perusahaan-perusahaan tersebut berada.

Pembangunan Sektor Industri di Pedesaan

Struktur ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan pembangunan yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri, sehingga tidak terjadi hambatan dari sisi penawaran dan permintaan. Pada dasarnya alasan yang menimbulkan perlunya pembangunan yang seimbang adalah untuk menjaga agar pembangunan tersebut tidak menghadapi hambatan dalam memperoleh bahan baku, tenaga ahli, listrik, dan fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar. Demikian juga untuk memperoleh pasar dari barang-barang yang diproduksi.

Jika diperhatikan strategi pembangunan di Indonesia sampai saat ini dilakukan pembangunan yang berimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri. Pelaksanaan pembangunan yang berimbang ini dapat dilihat dari peranan kedua sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada masa lalu peranan sektor pertanian terhadap PDB jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor industri.

Sebenarnya strategi pembangunan seimbang itu bertujuan untuk keselarasan dalam perekonomian agar antar sektor mampu saling menunjang dan melengkapi satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari program pembangunan pertanian di subsektor perkebunan. Dalam hal ini pembangunan perkebunan kelapa sawit harus ditunjang oleh industri hulunya, antara lain penyediaan bibit yang baik, sarana produksi yang memadai, alat-alat pertanian yang mendukung. Begitu juga untuk ke depan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pembangunan perkebunan kelapa sawit juga dapat merangsang tumbuhnya industri hilir, seperti: pabrik kelapa sawit (PKS) yang menghasilkan minyak sawit, dan industri hilir lainnya yang berbahan baku dari minyak sawit, seperti: industri minyak goreng, deterjen, kosmetik, dan industri kimia lainnya.

Menurut Mellor (1976), pembangunan di sektor industri dan sektor pertanian saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Sektor pertanian memproduksi berbagai produk konsumsi dan bahan baku sektor industri (agroindustri), sedangkan sektor industri memproduksi berbagai kebutuhan untuk sektor pertanian.

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Mellor (1984), telah menunjukkan adanya hubungan antara satu sektor dengan sektor lainnya dan hubungan tersebut meningkat sejalan dengan tumbuhnya perekonomian. Stagnasi yang terjadi pada sektor pertanian akan dapat menghambat pertumbuhan sektor industri khususnya agroindustri karena terlambatnya aliran bahan baku dari pertanian yang diperlukan. Sebaliknya jika terjadi kemunduran di sektor industri, maka sektor pertanian mengalami kesulitan untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan. Walaupun seluruh sektor dalam perekonomian menurut para ahli saling ada keterkaitan satu sama lain, akan tetapi kuat atau lemahnya keterkaitan antar sektor sangat berbeda.

Pendapat Mellor tersebut juga didukung oleh Jhingan (1990), pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Harus ada keseimbangan yang tepat antara investasi di bidang pertanian dan bidang industri, karena kedua bidang ini bersifat saling melengkapi. Peningkatan output di bidang industri membutuhkan perluasan output di bidang pertanian. Jika pekerjaan di sektor industri meningkat, akan membawa peningkatan permintaan bahan-bahan makanan. Oleh karena itu penawaran bahan makanan harus ditingkatkan. Bersamaan dengan meluasnya sektor industri tersebut, penawaran bahan mentah juga harus ditingkatkan. Karena itu sektor pertanian harus berkembang bersama-sama dengan sektor industri.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lewis dalam Jhingan (1990), di dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian serta antara produksi untuk konsumsi dalam negeri dan produksi untuk ekspor.



Dari sisi lain Jhingan (2006) menyatakan, setiap investasi dapat mempunyai pengaruh keterkaitan ke depan maupun pengaruh keterkaitan ke belakang. Pengaruh kaitan ke depan mendorong investasi pada tahap produksi berikutnya, dan pengaruh kaitan ke belakang mendorong investasi pada tahap produksi sebelumnya. Pembangunan harus bertujuan untuk menemukan proyek-proyek yang mempunyai kaitan total paling besar. Keterkaitan ke depan (*forward linkage*) diukur berdasarkan perbandingan antara nilai jual hasil industri diluar sektor industri yang bersangkutan dan seluruh nilai dari jumlah permintaan, dan dinyatakan dalam persentase. Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) diukur berdasarkan perbandingan antara pembelian dari luar sektor yang bersangkutan dan jumlah nilai produksi yang dihasilkan dan dinyatakan dalam persentase. Keterkaitan ini memperlihatkan saling ketergantungan struktural dalam suatu ekonomi dan seberapa jauh pertumbuhan pada satu sektor dapat memberikan rangsangan terhadap pengembangan sektor lainnya.

Begitu juga apa yang dikemukakan oleh Hirschman dalam Jhingan (1990), investasi pada sektor industri atau sektor-sektor perekonomian yang strategis akan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut. Pembangunan harus berlangsung dengan cara ini, dengan pertumbuhan yang menjalar dari sektor utama ekonomi ke sektor pendukungnya, dari satu industri ke industri lainnya.

Pengalaman di negara-negara Asia menunjukkan adanya berbagai model mobilisasi perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan, yaitu (Mudradjat Kuncoro, 2000): *Pertama*, mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan dalam rumah tangga petani gurem agar terjadi pembentukan modal di pedesaan (Nurkse, 1951). Ide tenaga kerja yang masih belum didayagunakan pada rumah tangga petani kecil dan gurem merupakan sumberdaya yang tersembunyi dan merupakan potensi tabungan. Kendati demikian, bila tenaga kerja tersebut diupah sesuai dengan tingkat upah yang berlaku dan potensi tabungan direalisasikan, beberapa cara perlu dilakukan untuk mengamankan tenaga kerja dalam rumah tangga tersebut. Alternatif cara yang dapat digunakan untuk memobilisasikan tenaga kerja adalah: menyusun kerangka lembaga di



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pedesaan yang memungkinkan untuk memberdayakan tenaga kerja pedesaan, terutama industri yang berbasis bahan baku dari pedesaan.

Kedua, menitik beratkan pada transfer sumberdaya pertanian ke industri melalui mekanisme pasar (Lewis, 1954; Fei dan Ranis, 1964). Ide bahwa suplai tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan formasi modal lewat proses pasar, mulanya tidak berkaitan sama sekali dengan mobilisasi ekonomi pedesaan. Ketersediaan tenaga kerja semacam itu dikemukakan hanya untuk menjelaskan bagaimana pangsa relatif upah dan laba pada sektor kapitalis (apakah sektor pertanian atau industri diperekonomian pedesaan atau kota) dapat saja dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja di sektor subsistem, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tabungan dan investasi dalam perekonomian secara umum.

Ketiga, menyoroti pesatnya pertumbuhan pada sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor pemimpin (Schultz, 1963; Mellor, 1976). Model ini dikenal dengan model berbasis teknologi (*Rural-Led Development*). Beberapa permasalahan dalam strategi pembangunan dengan sektor unggulan pertanian didasarkan atas kemungkinan dibukanya pertanian oleh teknologi modern. Sektor pertanian tidak hanya sebagai pemasok sumberdaya (baik pangan, bahan baku, tenaga kerja, atau tabungan), namun sebagai sektor yang mampu meningkatkan permintaan atas produk pertanian dan nonpertanian, karena itu mendukung proses pembangunan seimbang. Proses ini akan berhasil apabila dua syarat berikut terpenuhi, yaitu: 1) kemampuan mencapai tingkat pertumbuhan output pertanian yang tinggi; 2) proses ini juga menciptakan pola permintaan yang kondusif terhadap pertumbuhan. Pada gilirannya ini tergantung pada dampak keterkaitan ekonomi pedesaan lewat pengeluaran atas barang konsumsi yang dipasok dari dalam sektor itu sendiri, dan melalui investasi yang didorong.

Investasi yang terbentuk di suatu wilayah akan menyebabkan munculnya nilai tambah dari kegiatan industri tersebut. Salahsatu tujuan pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian (agribisnis) adalah kegiatan industri dapat menimbulkan nilai tambah dari produk pertanian dan menciptakan *multiplier effect* ekonomi di wilayah tersebut.



Nilai tambah yang diciptakan oleh aktivitas agribisnis dihitung dengan rumus:

$$NT = \left[\frac{O}{I_{bb}} H_o \right] - (H_{bb} + B_{bb}) \quad \text{atau} \quad NT(\%) = \frac{I_{bb}}{O} \times \frac{NT}{H_o} \times 100\%$$

Keterangan: NT= nilai tambah (Rp/kg bahan baku), O= luaran (kg/satu proses produksi), I_{bb} = Volume masukan (*input*) bahan baku (kg/satu proses produksi), H_o = Harga luaran (Rp/kg), H_{bb} = Harga bahan baku (Rp/kg), dan B_{bb} = Biaya di luar bahan baku per unit bahan (Rp/kg bahan baku).

Keuntungan yang diperoleh oleh pengolah (pelaku agribisnis) dapat diketahui dengan rumus:

$$KP = NT - ITK \quad \quad \quad KP(\%) = \frac{N_p}{N_p} \cdot 100\%$$

$$ITK = \frac{I_{tk}}{I_{bb}} \cdot U_{tk} \quad \quad \quad N_p = \left[\frac{O}{I_{bb}} H_o \right]$$

Keterangan: KP= Keuntungan pengolah (Rp/kg bahan baku), N_p = Nilai produksi per unit bahan baku (Rp/kg bahan baku), ITK= Imbalan tenaga kerja (Rp/kg bahan baku), I_{tk} = Masukan tenaga baku (kg/satu proses produksi), dan U_{tk} = Upah rerata tenaga kerja (Rp/HKP).

D. Distorsi Harga dan Pemasaran

Sistem pemasaran pertanian merupakan satu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran. Tugasnya melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir. Begitu pula sebaliknya memperlancar aliran uang, nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran dari tangan konsumen akhir ke tangan produsen awal dalam suatu sistem komoditas (*Gumbira Sa'id, E. dan A. Harizt Intan, 2001*).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Sistem pemasaran pertanian mencakup banyak lembaga, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, baik yang terlibat dan terkait secara langsung maupun yang tidak terlibat atau terkait langsung dengan operasi sistem pemasaran pertanian. Sistem pemasaran yang kompleks tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya memaksimalkan tingkat konsumsi kepuasan konsumen, pilihan konsumen, dan mutu hidup masyarakat (Downey. W David dan Steven P. Erickson, 1987).

Dalam pengembangan sektor pertanian ke depan masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain: *Pertama*, lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Salah satu faktor produksi penting dalam usahatani adalah modal. Besar-kecilnya skala usahatani yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum pemilikan modal petani masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usahatani sebelumnya. Untuk memodali usahatani selanjutnya petani terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu (pedagang) atau segala kebutuhan usahatani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayarannya setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan petani sering terjatuh pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan pihak petani.

Kedua, ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah sebagai faktor produksi utama dalam pertanian makin bermasalah. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Dari sisi lain mengakibatkan terjadinya pembagian penggunaan tanah untuk berbagai subsektor pertanian yang dikembangkan oleh petani.

Ketiga, pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Sarana produksi sangat diperlukan dalam proses produksi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Pengadaan sarana produksi itu bukan hanya menyangkut ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, tetapi yang lebih penting adalah jenis dan kualitasnya. Oleh karena itu pengadaan sarana produksi ini perlu



direncanakan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan pada waktu yang tepat.

Keempat, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi.

Saha pertanian merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Petani yang bertindak sebagai manajer dan pekerja pada usahatani haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan berbagai faktor masukan usahatani, sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang dilakukan.

Kelima, lemahnya organisasi dan manajemen usahatani. Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan penyampaian informasi (*top down*) dan panyaluran inspirasi (*bottom up*) para anggotanya. Dalam pertanian organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok tani. Selama ini kelompok tani sudah terbukti menjadi wadah penggerak pengembangan pertanian di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat kelompok tani dalam hal memudahkan koordinasi, penyuluhan dan pemberian paket teknologi.

Keenam, kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usahatani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usahatani itu sendiri. Ada dua hal yang dapat dilihat berkaitan dengan sumberdaya manusia ini, yaitu jumlah yang tersedia dan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Kedua hal ini sering dijadikan sebagai indikator dalam menilai permasalahan yang ada pada kegiatan pertanian.

Solusi untuk menghindari terjadinya distorsi harga di tingkat petani, di pedesaan seharusnya dibentuk lembaga ekonomi masyarakat yakni koperasi. Dengan adanya koperasi fluktuasi harga dapat diperkecil. Sudah seharusnya koperasi di pedesaan melakukan terobosan baru dalam bentuk usaha agroindustri. Koperasi di pedesaan dapat berfungsi sebagai, antara lain: Pertama, mencari alternatif pemecahan masalah pertanian seperti



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

penyediaan kredit, pembentukan modal bersama melalui tabungan, penyediaan sarana produksi, pengendalian hama terpadu, pelaku agroindustri, memasarkan produk pertanian dan sebagainya; Kedua, memberikan kemudahan berupa pelatihan dan pembinaan kepada petani dalam usaha-usaha yang dilakukannya; dan ketiga, petani perlu diorganisir untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam menghadapi persaingan dan melakukan kemitraan dengan pihak lain (Almasdi Syahza, 2003b).

Dalam era globalisasi pada saat ini dan masa-masa mendatang untuk menyongsong liberalisasi perdagangan peranan pemerintah makin kecil, bahkan kebijaksanaan pajak impor dan subsidi akan dihapuskan bila sampai waktunya. Dengan demikian peranserta pihak swasta, yaitu perusahaan-perusahaan besar sangat diperlukan untuk mengisi dan melengkapi berbagai program pemerintah. Pihak pengusaha yang berada pada posisi yang kuat dapat membantu petani pada posisi yang lemah dalam bentuk jaringan kemitraan. Hubungan ini dapat memberikan keuntungan kepada petani, yaitu: Pertama, transfer teknologi dan penyediaan masukan sehingga petani mampu bersaing dengan produk lain yang dihasilkan dengan menggunakan masukan dan teknologi yang lebih unggul; Kedua, dapat memperoleh informasi dan peluang pasar secara cepat; Ketiga, dapat membuka akses terhadap modal dan pasar; dan keempat, adanya jaminan dan kepastian pasar bagi produk pertanian (Almasdi Syahza, 2003e).

E. Disparitas Pembangunan Wilayah

Sumitro Djojohadikusumo(1994) mengemukakan bahwa, dimensi ekonomi regional dalam persepsi kesenjangan menunjukkan pada ketidakseimbangan dalam jalannya perekonomian antar daerah. Di sini kita dihadapkan dengan suatu dilema yang dapat disebut sebagai dualisme teknologis. Secara pokok adanya dualisme teknologis menimbulkan perbedaan dan ketimpangan mengenai pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai kawasan dalam batas wilayah ataupun secara regional. Tanpa adanya kebijaksanaan aktif untuk menanggulangi kecenderungan itu, maka akan ada ketimpangan kumulatif pada pertumbuhan ekonomi di antara berbagai pusat kegiatan dalam wilayah.



Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu proyek pembangunan adalah peningkatan dan pemeratan pendapatan. Pengertian pemerataan pendapatan masih belum diberikan secara jelas, karena para ahli ekonomi umumnya hanya memperhatikan jumlah pendapatan itu sendiri tanpa memperhatikan dari manakah asalnya pendapatan itu. Sekelompok masyarakat dapat saja memperoleh jumlah pendapatan yang sama, namun pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut belum tentu akan sama besarnya. Karena itu para ahli ekonomi dalam merencanakan pemerataan umumnya lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan individual, kemudian mengelompokkannya pada suatu ukuran tertentu. Kelompok-kelompok berdasarkan pendapatan tersebut kemudian diukur dan dianalisis dari hasil yang diperoleh kemudian disusun perencanaan untuk menentukan langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat diambil.

Kalau kita telaah lebih lanjut tentang sasaran pembangunan yakni pemerataan pembangunan masih merupakan tanda tanya yang patut dikaji terutama bila dikaitkan dengan aspek spasialnya. Apakah dengan semakin tumbuh dan berkembangnya investasi swasta yang ditandai dengan semakin pesatnya penanaman modal baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri akan memperkecil disparitas spasial ?

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut tidak, jelas yang terjadi selama ini adalah *polarization effect* yang ditandai dengan mengalirnya modal dan tenaga kerja dari daerah yang belum berkembang ke daerah yang telah berkembang dan *spread effect* serta *strikling down effect* (banyaknya bahan baku dari daerah yang belum berkembang yang dapat dipasarkan ke daerah yang telah berkembang karena kebutuhan di daerah tersebut meningkat) yang diharapkan malah tidak terjadi. Akibat yang dirasakan adalah daerah yang sudah berkembang semakin berkembang dan di daerah tersebut akan terjadi penumpukan kegiatan industri, sementara daerah-daerah lain semakin tertinggal dan tidak diminati oleh investor. Adanya hal-hal yang dikemukakan di atas mendorong keharusan adanya *government intervention* (campur tangan pemerintah) untuk mengurangi tingkat *Regional Inequalities* tersebut.

Menurut Tulus T.H. Tambunan (2001) cukup banyak studi mengenai ketimpangan ekonomi regional di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya. Diantaranya dari Ibrahim, Hendra Esmara, Uppal dan Handoko, Iwan Jaya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Aziz, Hidi dan Williamson, Sediono dan Igusa, Sondakh, Aktia dan Lukman, dan Syafrizal. Kesemua pandangan dari hasil-hasil studi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar propinsi di Indonesia adalah, antara lain: 1) konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah; 2) kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut menjadi rendah; 3) kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital antar propinsi; 4) perbedaan sumberdaya alam antar wilayah, dan pemanfaatan serta pengelolaan yang tidak efisien; 5) perbedaan kondisi demografi antar daerah penyebab utamanya adalah pertumbuhan dan jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja; dan 6) kurang lancarnya perdagangan antar daerah, penyebabnya adalah terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi.

Menurut Mudradjat Kuncoro (2000) ada teori yang menyatakan ada *tradeoff* antara ketidak merataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidak merataan di negara sedang berkembang dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi rendah. Di banyak negara sedang berkembang tidak ada *tradeoff* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan. Jeffrey Williamson, menyimpulkan bahwa ketidak merataan yang timbul berdampak sedikit terhadap akumulasi modal, namun ketidak merataan yang timbul memang memegang peranan penting dalam sulitnya akumulasi modal. Ada berbagai cara pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Menurut Fields. Gary S (1990), ada tidaknya *tradeoff* antara pertumbuhan dengan pemerataan tergantung jenis data yang digunakan, apakah silang tempat (*cross section*), runtut waktu (*time series*), ataukah menggunakan data mikro.

Studi kompresif yang dilakukan oleh Fields menemukan fakta, yaitu: *Pertama*, negara yang mengalami kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan ternyata kurang lebih sama dengan banyaknya negara yang mengalami ketimpangan pendapatan; *Kedua*, kemiskinan absolut menurun di kebanyakan negara; dan *ketiga*, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan banyak yang berjalan beriringan. Fields menyimpulkan, pertumbuhan ekonomi



yang cepat umumnya menurunkan kemiskinan, namun pertumbuhan ekonomi tidak menjamin adanya pengurangan kemiskinan.

Dari apa yang diungkapkan di atas tentang penyebab ketimpangan antar wilayah dan ketidakmerataan pendapatan, maka dalam penelitian ini mencoba mengkaji apakah pembangunan perkebunan di daerah Riau juga penyebab ketimpangan antar daerah atau sebaliknya dapat mengurangi ketimpangan tersebut dan menciptakan pendapatan yang lebih merata antar golongan dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat pedesaan.

Bagi Indonesia dalam pembangunan di masa datang akan menghadapi tiga kelompok permasalahan mendasar (Sumitro Djojohadikusumo, 1994), yaitu; *Pertama*, lapangan kerja produktif dan pengangguran. Masalah ini berkaitan dengan ketimpangan antara produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dan produktivitas di sektor sekunder (industri dan konstruksi); *Kedua*, ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa; dan *ketiga*, ketidakseimbangan ekonomi antar daerah.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah rasio gini (*gini ratio*) dan kriteria Bank Dunia. Nilai gini rasio berkisar antara nol dan satu. Bila rasio gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Secara grafis, ini ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorens dengan garis pemerataan sempurna. Namun bila rasio gini sama dengan satu menunjukkan terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya semakin tinggi nilai rasio gini maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio gini berarti semakin merata distribusi pendapatan. Perbandingan tingkat ketimpangan dari Bank Dunia dan Gini Ratio dapat dilihat pada Tabel 4.1.



Tabel 4. Rasio Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Kriteria Penilaian		Tingkat Ketimpangan
Gini Ratio	Bank Dunia	
< 0,30	> 17 %	Rendah
0,30 – 0,40	12 – 17 %	Sedang
> 0,40	< 12 %	Tinggi

*) Untuk 40 persen penduduk berpendapatan terendah
Sumber: Suseno Triyanto W, 1990, *Indikator Ekonomi*.

Berbagai studi empiris menunjukkan modernisasi pertanian telah memperbesar kesenjangan distribusi pendapatan. Studi Gibbons menyimpulkan bahwa revolusi hijau telah memperparah kepincangan distribusi pendapatan masyarakat karena meskipun petani kecil secara umum membaik kondisinya sebagai hasil modernisasi pertanian, namun posisi mereka secara relatif lebih buruk dibandingkan petani kaya yang jauh meningkat penghasilannya. Hasil penelitian Arief dan Wong membuktikan bahwa di daerah pedesaan Jawa terjadi proses meningkatnya kepincangan pendapatan, seperti ditunjukkan oleh meningkatnya rasio gini dari 0,3048 pada tahun 1970 menjadi 0,3604 pada tahun 1976 (Mudradjat Kuncoro, 2000).

Amiruddin Ardani (1996) menganalisis kesenjangan pendapatan dan konsumsi antar daerah dengan menggunakan indeks Williamson selama 1968-1993 dan 1983-1993. Kesimpulannya mendukung hipotesis Williamson bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan kemakmuran antar daerah, namun semakin maju pembangunan ekonomi kesenjangan tersebut semakin menyempit.

Indek Williamson merupakan salah satu alat untuk menganalisis tingkat ketimpangan antar wilayah pada suatu negara/daerah. Pada awal perkembangannya, sebenarnya Williamson menggunakan pengukuran regional inequalities tersebut pada beberapa negara. Pengukuran serta interpretasinya terhadap *regional inequalities* ini disebutkan sebagai *International Cross-Section Analysis*. Data dasar yang digunakan ialah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Jadi pengertian *inequalities* (ketimpangan wilayah) disini diartikan sebagai ketimpangan dalam pendapatan per kapita.



Seperti yang dikutip oleh Tommy Firman (1977), menurut Williamson, pada umumnya *Regional Inequalities* cenderung membesar pada saat terjadinya proses perkembangan. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut: 1) migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki modal/ terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang, karena di sana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih tinggi; 2) investasi cenderung berlaku di daerah yang telah berkembang, karena faktor market dan lain-lain, dimana keuntungan relatif lebih besar, demikian pula resiko kerugian relatif lebih kecil; 3) kebijaksanaan pemerintah cenderung mengakibatkan konsentrasinya *social and economic overhead capital* di daerah yang telah berkembang karena kebutuhan yang lebih besar. Hal ini justru mendorong berkembang industri yang lebih pesat; 4) tidak adanya kaitan (*linkages*) diantara *regional markets*, menyebabkan rintangan untuk pemancaran (*spread effects*) inovasi dan *income multiplier*.

Apabila diamati pembangunan di Daerah Riau yang terjadi selama ini, adalah *polarization effect*, seperti terjadinya urbanisasi oleh tenaga kerja pedesaan, pemusatan industri pengolahan di daerah perkotaan. Sementara *spread effect* serta *striking down effect* yang diharapkan malah tidak terjadi, seperti tidak berminatnya investor melakukan investasi di daerah pedesaan (sumber bahan baku). Akibat yang dirasakan adalah daerah yang sudah berkembang semakin berkembang dan di daerah tersebut akan terjadi penumpukan kegiatan industri, sementara daerah-daerah lain semakin tertinggal dan kurang diminati oleh investor.

Salah satu sebab meningkatnya kesenjangan dan kemiskinan antar daerah di masyarakat pedesaan adalah karena adanya distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan yang dikuasai kelompok ekonomi kuat, dimana mereka ini dekat dengan kekuasaan. Dampaknya terhadap kepemilikan faktor produksi seperti tanah, modal tidak merata dan tidak adil. Selain itu rendahnya teknologi produksi, sedikitnya teknologi pengolahan hasil, akses pemasaran serta rendahnya keterampilan menyebabkan mereka tidak dapat berbuat banyak untuk kegiatan produksi, akibatnya pendapatan mereka menjadi sangat rendah. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pesatnya pembangunan sektor perkebunan,



kegiatan HPH dan HTI telah mendesak mereka sehingga memberikan dampak negatif terhadap kepemilikan lahan bagi keluarga miskin di pedesaan.

Untuk mengetahui perhitungan disparitas spasial (regional inequality) di antara daerah kabupaten/kota digunakan Indeks Williamson.

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Keterangan: I_w adalah Indeks Williamson; f_i adalah jumlah penduduk di masing-masing daerah tingkat dua; n merupakan jumlah penduduk Riau; Y_i adalah pendapatan per kapita di masing-masing daerah tingkat dua; dan \bar{Y} adalah pendapatan per kapita Riau. Angka indeks bergerak dari nol sampai 1 ($0 < I_w < 1$). Indeks Williamson semakin mendekati 1 menunjukkan semakin besar disparitas antar daerah (disparitas spasial).

F. Daya Dukung Wilayah

Daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam menyediakan bahan baku industri yang ada di kawasan wilayah itu sendiri. Konsep daya dukung wilayah paling mudah diterapkan pada sistem agraris. Dalam sistem itu industri yang berbasis agraris kesinambungan kegiatannya tertumpu pada pertanian dalam arti luas. Menurut Sostroamidjojo dan Entang (1975) pengukuran daya dukung wilayah didasarkan pada kemampuan lahan (*land capability*). Pada umumnya kemampuan lahan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan lahan dalam fungsinya sebagai media tumbuh untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Dalam keadaan ini yang ditinjau adalah daya dukung wilayah terhadap pengembangan industri hilir yang berbasis kelapa sawit.

Menurut Suparmoko (1997), lahan merupakan sumberdaya alam yang paling penting untuk kelangsungan kehidupan manusia, karena lahan atau tanah merupakan masukan (input) yang diperlukan untuk setiap bentuk aktifitas manusia, baik untuk kegiatan pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan-jalan, daerah rekreasi maupun untuk keperluan tertentu seperti untuk kegiatan alamiah. Sedangkan Todaro (2000) berpendapat bahwa



lahan merupakan sumber fisik yang mempengaruhi potensi suatu negara untuk pertumbuhan ekonominya.

Berdasarkan pengertian dari *land capability* akan dapat diketahui kemampuan lahan di daerah Riau untuk memproduksi TBS. Kemampuan tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan bahan baku per tahun, luas perkebunan kelapa sawit, dan produktivitas lahan tersebut.

Pada dasarnya daya dukung itu tergantung pada kemampuan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perkebunan guna mendukung perkembangannya industri yang berbasis kelapa sawit. Makin besar persentasi lahan yang dipakai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit makin besar daya dukung wilayah. Karena semakin luas areal perkebunan akan semakin besar produksinya. Tentu saja akan menghasilkan bahan baku yang diperlukan untuk industri pengolahan kelapa sawit. Persentasi lahan ditentukan oleh kesesuaian tanah untuk perkebunan kelapa sawit.

Daya dukung suatu wilayah ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: a) adanya potensi bahan baku yang memungkinkan pengembangannya di masa yang akan datang; b) adanya sistem kelembagaan yang dapat merealisasikan daya dukung tersebut; dan c) adanya iklim dan ketinggian topografi yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan bahan baku tersebut.

Daya dukung wilayah juga didukung oleh kondisi tanah itu sendiri. Proses fisik, kimiawi, dan biologis di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh iklim kehidupan tanaman dan hewan serta aktivitas manusia. Petani harus menyadari bagaimana proses-proses ini dipengaruhi dan bisa dimanipulasi guna membudidayakan tanaman yang sehat dan produktif. Mereka harus menciptakan dan mempertahankan konsisi-kondisi tanah sebagai berikut (Reijntjes, 1999): a) ketersediaan air, udara, dan unsur hara tepat waktu dalam jumlah seimbang dan mencukupi; b) struktur tanah yang meningkatkan pertumbuhan akar, pertukaran unsur-unsur gas, ketersediaan air, dan kapasitas penyimpanan; c) suhu tanah yang meningkatkan kehidupan tanah dan pertumbuhan tanaman; dan d) tidak adanya unsur tostik

Agar kondisi tanah dapat mendukung pertumbuhan tanaman serta meningkatkan produktivitas lahan maka perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat meningkatkan tingkat kesuburan tanah (Reijntjes, 1999), antara lain:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Memperhatikan unsur-unsur tanah yang penting

Tanah seringkali digambarkan dari partikel-partikel padat, air, unsur-unsur gas, humus, dan bahan organik mentah. Aspek penting yang sering kali dilupakan adalah tanah juga merupakan tempat tinggal bagi sejumlah makhluk hidup yang sangat beragam. Kehidupan tanah ini mencakup flora tanah dan fauna tanah. Organisme-organisme ini memainkan peranan utama dalam berbagai proses tanah dan interaksi tanah-tanaman, seperti pembentukan tanah, penciptaan struktur tanah, mineralisasi sampai pada unsur hara bebas untuk pertumbuhan tanaman, pembentukan humus, pengikatan nitrogen, pelarutan fosfat serta penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Ada saling ketergantungan yang kuat antara akar dan kehidupan tanah karena akar mengeluarkan senyawa yang merangsang kehidupan tanah (Subba Rao dalam Coen Reijntjes, 1999).

2. Mengelola bahan organik

Bahan organik berfungsi sebagai penyimpanan unsur hara yang secara perlahan akan dilepaskan kedalam larutan air tanah yang gunanya untuk tanaman. Bahan organik di dalam atau di atas tanah juga melindungi dan membantu mengatur suhu dan kelembaban tanah.

Ada lima cara penanganan bahan organik, yaitu: 1) memberikan langsung ke tanah baik itu sebagai mulsa pada permukaan tanah maupun dipendam dalam tanah; 2) membakarnya (mengakibatkan mineralisasi); 3) mengomposnya; 4) menjadikan sebagai pakan ternak; dan 5) memfermentasikannya dalam instalasi biogas.

Jika unsur hara digantikan terutama oleh bahan-bahan kimia dan petani tidak lagi menganggap pemberian pupuk kandang penting, maka tanah akan menjadi miskin bahan organik dan unsur hara penyangga. Dengan kata lain produktivitas dan kestabilan sistem pertanian akan menurun.

3. Mengolah tanah

Kondisi tanah bisa juga diperbaiki dengan pengolahan terhadap struktur tanah, kemampuan menahan air, aerasi, kemampuan infiltrasi, suhu, dan evaporasi. Pengolahan tanah akan mengurangi pembentukan panas dan memecahkan saluran-saluran kapiler dalam tanah. Lapisan yang diolah akan



mengering dengan cepat, tetapi kelembaban dapat terkonservasi dengan lebih baik. Pengolahan tanah dapat menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan benih dan mungkin diperlukan untuk memerangi gulma dan hama tanaman lainnya atau untuk membantu mengendalikan erosi.

Teknik pengolahan konservasi dan teknik tanpa pengolahan akhir-akhir ini telah dikembangkan oleh ilmuwan dan petani. Ini merupakan praktek-praktek pertanian tradisional di beberapa tempat.

Mengelola kesuburan tanah

Tanah yang sehat merupakan prakondisi bagi kesehatan tanaman. Kesehatan tanaman dipengaruhi langsung oleh penyerapan senyawa organik tertentu yang dibentuk ketika organisme tanah memineralisasi bahan organik. Kesehatan tanaman dipengaruhi secara tidak langsung ketika suatu organisme tanah menekan perkembangan organisme lain yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Pemupukan seimbang merupakan dasar kesehatan tanaman. Unsur hara yang terlalu banyak atau terlalu sedikit bisa menyebabkan tanaman lebih rentan terhadap serangan penyakit dan hama.

Pengelolaan bahan organik, pengolahan tanah, dan pengelolaan kesehatan tanah mungkin tidak cukup untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi pertumbuhan tanaman tertentu. Keadaan ini memerlukan permintaan investasi untuk perbaikan guna peningkatan produktivitas tanah terutama lahan pertanian.

Dari sisi lain Marsudi Djojodipuro (1992) menyatakan bahwa daya dukung wilayah untuk pembangunan industri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: *factor endowment*, pasar dan harga, bahan baku dan energi, aglomerasi (keterkaitan antar industri dan penghematan ekstern), kebijaksanaan pemerintah, dan biaya angkutan.

Factor endowment adalah tersedianya faktor produksi secara kualitatif maupun kuantitatif di suatu daerah, antara lain: tanah, tenaga dan modal. Makin banyak *factor endowment* yang dimiliki oleh suatu daerah makin tinggi daya dukung wilayah tersebut terhadap pengembangan industri. Setiap daerah memiliki faktor endowment yang berbeda. Sebagai contoh untuk tanaman kelapa sawit, daerah Riau mempunyai keunggulan dari segi tanah, yaitu kondisi tanah yang mendukung untuk media tumbuh kelapa sawit,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

daerah yang relatif rata sehingga dapat menekan biaya produksi kelapa sawit. Disamping itu juga rendahnya biaya tenaga kerja yang bekerja disektor perkebunan kelapa sawit.

Analisis daya dukung wilayah (DDW) yang berbasis agribisnis dilakukan untuk mengetahui kemampuan wilayah dalam menyediakan bahan baku untuk suatu industri. Untuk mengetahui daya dukung wilayah tersebut digunakan data produksi sektor pertanian dan jumlah kebutuhan bahan baku untuk industri yang bersangkutan. Secara matematis daya dukung wilayah terhadap industri berbasis agribisnis:

$$DDW = \frac{L_i \times P_i}{KBB}$$

DDW merupakan daya dukung wilayah dalam pengembangan industri, L_i adalah luas lahan pemasok bahan baku industri, P_i adalah produktivitas lahan per hektar, dan KBB merupakan kebutuhan bahan baku industri hilir dalam satu satuan.

Apabila hasil perhitungan menunjukkan rasionya >1 , maka daya dukung wilayah dalam pengembangan industri cukup kuat, dan sebaliknya apabila rasionya <1 , daya dukung wilayah sangat lemah untuk pengembangan industri.

Hasil perhitungan DDW dapat memberikan gambaran kebutuhan atau kapasitas pabrik yang akan dibangun untuk mengembangkan produk turunan dari sektor pertanian. Apabila suatu wilayah memberikan DDW lebih besar, maka sangat memungkinkan di wilayah tersebut dibangun industri pengolahan. Dimana pembangunan industri pengolahan akan menciptakan nilai tambah dari produk itu sendiri. Secara berkesinambungan akan menimbulkan *multiplier effect* ekonomi di wilayah tersebut.

G. Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek yakni: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Melihat bagaimana suatu perekonomian



berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita, oleh sebab itu ada dua sisi yang harus diperhatikan yakni; sisi output total (GNP) dan sisi jumlah penduduk.

Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan angka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya (Jhingan, 1994). Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu; *Pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *Kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; dan *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat.

Teori pertumbuhan ekonomi sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Salah satu model teoritis tentang pembangunan paling terkenal, yang memusatkan perhatian pada transformasi struktural (*structural transformation*) suatu perekonomian subsisten, mula-mula dirumuskan oleh W. Arthur Lewis dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Fei dan Gustav Ranis. Model dua sektor Lewis (*Lewis two-sector model*) ini sekarang telah diakui sebagai teori umum yang baku.

Menurut model pembangunan yang diajukan Lewis, perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor, yakni: 1) sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol, ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja (*surplus labor*) sebagai suatu fakta bahwa sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian dan sektor tersebut tidak akan kehilangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

outputnya sedikitpun; 2) sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Perhatian utama dari model ini diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja tersebut dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor modern tersebut. Adapun laju atau kecepatan terjadinya perluasan tersebut ditentukan oleh tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern. Peningkatan investasi itu sendiri dimungkinkan oleh adanya keuntungan sektor modern dari selisih upah, dengan asumsi bahwa para kapitalis yang berkecimpung dalam sektor modern tersebut bersedia menanamkan kembali seluruh keuntungannya. Yang terakhir, tingkat upah di sektor industri perkotaan (sektor modern) diasumsikan konstan dan, berdasarkan suatu premis tertentu, jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah di sektor pertanian subsisten tradisional. (Lewis berasumsi bahwasanya tingkat upah di daerah perkotaan sekurang-kurangnya harus 30 persen lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan di daerah-daerah pedesaan untuk memaksa pekerja pindah dari desa-desa asalnya ke kota-kota). Pada tingkat upah di daerah perkotaan yang konstan, maka kurva penawaran tenaga kerja pedesaan dianggap elastis sempurna (Todaro, Michael P., 2000).

Rangkaian proses pertumbuhan berkesinambungan (*self sustaining growth*) atas sektor modern dan perluasan kesempatan kerja tersebut di atas, diasumsikan akan terus berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja pedesaan diserap habis oleh sektor industri. Selanjutnya, tenaga kerja tambahan yang berikutnya hanya dapat ditarik dari sektor pertanian dengan biaya yang lebih tinggi karena hal tersebut pasti akan mengakibatkan merosotnya produksi pangan. Hanya penurunan rasio tenaga kerja terhadap tanah secara drastis saja yang akan mampu membuat produk marginal tenaga kerja desa menjadi tidak sama dengan nol lagi. Pada saat tingkat upah dan kesempatan kerja di sektor modern terus mengalami pertumbuhan, maka kemiringan kurva penawaran tenaga kerja bernilai positif. Transformasi struktural perekonomian dengan sendirinya akan menjadi suatu kenyataan



dan perekonomian itupun pada akhirnya pasti beralih dari perekonomian pertanian tradisional yang berpusat di daerah pedesaan menjadi sebuah perekonomian industri modern yang berorientasikan kepada pola kehidupan perkotaan.

Kuznets menyatakan, ada lima pola penting pertumbuhan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi modern. Kelima pola tersebut adalah: penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik, invensi, inovasi, penyempurnaan, dan penyebaran penemuan yang biasanya diikuti dengan penyempurnaan. Inovasi terdiri dari dua macam: pertama, penurunan biaya yang tidak menghasilkan perubahan apapun pada kualitas produk; kedua, pembaharuan yang menciptakan produk baru dan menciptakan permintaan baru akan produk tersebut. Pembaharuan ini akan menciptakan perubahan dalam permintaan (Jhingan, 1990).

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan metode dalam proses produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya (Jhingan, 1990).

Menurut Schumpeter dalam Jhingan (1990), unsur utama pembangunan terletak pada usaha melakukan kombinasi baru yang di dalamnya terkandung berbagai kemungkinan dalam keadaan mantap. Kombinasi baru ini muncul dalam bentuk inovasi. Inovasi dapat terdiri dari: 1) pengenalan barang baru; 2) pengenalan metode produksi baru; 3) pembukaan pasar baru; 4) penguasaan sumber penawaran baru bahan mentah atau barang semi manufaktur; dan 5) pembentukan organisasi baru pada setiap industri. Pengenalan produk baru dan perbaikan terus menerus pada produksi inilah yang membawa kepada pembangunan. Peranan inovator tidak kepada kapitalis tetapi kepada pengusaha. Pengusaha bukanlah seorang manusia yang mempunyai kemampuan manajemen biasa tetapi seseorang yang memperkenalkan sesuatu yang sama sekali baru. Dia tidak menyediakan dana tetapi mengatur pemakaiannya. Pengusaha didorong oleh: a) keinginan untuk mendirikan kerajaan bisnis swasta; b) keinginan untuk menguasai dan membuktikan superioritasnya, dan c) kesenangan membuat dan mendapatkan sesuatu, atau sekedar menyalurkan kepintaran dan tenaga seseorang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Inovasi mempunyai tiga pengaruh yaitu: (1) diperkenalkannya teknologi baru; (2) inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital; dan (3) inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Proses imitasi ini mempunyai pengaruh berupa: Pertama, menurunnya keuntungan monopolis yang dinikmati oleh para inovator; dan kedua, penyebaran teknologi baru di dalam masyarakat (teknologi tersebut tidak lagi menjadi monopoli para inovatornya)

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu sumber kenaikan output, tetapi ia bukanlah suatu sumber yang menarik atau yang paling penting. Yang lebih menarik adalah kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi yang disebabkan adanya inovasi tadi. Inovasi ini berarti perbaikan teknologi dalam arti luas.

Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda pentingnya di dalam kehidupan perekonomian. *Simon Kuznets* menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern, yaitu (Jhingan, 1994): *Pertama*, laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi, satu sisi dapat menciptakan permintaan akan barang produksi dan dari sisi lain sebagai penawaran tenaga kerja dalam proses produksi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk itu mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil yang dihasilkannya. Apabila laju pertumbuhan penduduk dapat diimbangi oleh laju pertumbuhan produktivitas, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Tetapi apabila pertambahan penduduk lebih cepat dari pertambahan penghasilan akan menyebabkan mundurnya perekonomian, inilah yang diragukan dalam teori Malthus.

Kedua, peningkatan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Kenaikan efisiensi berarti penggunaan output yang semakin besar setiap unit input.



Ketiga, laju perubahan struktural yang tinggi. Kecepatan perubahan struktural di dalam pertumbuhan ekonomi modern dapat juga tergambarkan dalam perubahan distribusi tenaga kerja diantara tiga sektor utama yakni: pertanian, industri, dan jasa. Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan hukum.

Keempat, Urbanisasi. Pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan semakin banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke daerah perkotaan. Urbanisasi pada umumnya merupakan produk industrialisasi. Urbanisasi mempengaruhi tingkat dan struktur pengeluaran konsumen negara melalui dua cara: (1) urbanisasi menghasilkan pembagian kerja dan spesialisasi yang semakin meningkat dan perubahan aktivitas dari berbagai usaha keluarga dan tidak berorientasi pasar menjadi usaha yang berorientasi pasar; (2) urbanisasi membuat biaya pemenuhan sejumlah kebutuhan menjadi semakin mahal. Hal ini disebabkan karena kehidupan kota semakin mahal dibandingkan dengan kehidupan desa. Seperti, perumahan, kebersihan, air, angkutan dalam dan antar kota, dan fasilitas lainnya; dan (3) *demonstration effect*, kehidupan kota mendorong kelompok urbanis meniru pola konsumsi orang kota sehingga menyebabkan meningkatnya pengeluaran konsumen.

Kelima, ekspansi negara maju. Ekspansi negara-negara maju yang bermula dari bangsa Eropa tidak lain adalah akibat revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Hal ini melahirkan dominasi politik terhadap negara jajahan.

Keenam, arus barang, modal, dan orang antar bangsa. Arus barang, modal dan orang antar bangsa dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena tidak ada suatu negarapun yang bisa memenuhi kebutuhan bangsanya dengan semata-mata hasil produksinya. Arus barang komoditi merupakan unsur yang dominan untuk ekspansi keluar dari negara maju. Begitu juga dengan kekurangan modal suatu negara akan menyebabkan mengalirnya investasi dari negara kaya ke negara berkembang dan diikuti dengan aliran migrasi sebagai pembawa ilmu pengetahuan dan teknologi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Potensi subsektor perkebunan untuk dijadikan andalan ekspor di masa-masa mendatang sangat besar. Prasarat yang diperlukan hanyalah perbaikan dan penyempurnaan iklim usaha dan struktur pasar komoditas perkebunan dari sektor hulu sampai hilir. Mustahil kinerja ekspor akan lebih baik jika kegiatan produksi di sektor hulu, pola perdagangan, dan distribusi komoditas perkebunan domestik masih mengalami banyak hambatan dan distorsi pasar (Bustanul Arifin, 2001).

Sebenarnya masih terdapat banyak ruang untuk memanfaatkan potensi dan peluang ekspor komoditas perkebunan. *Pertama*, perbaikan efisiensi pemasaran (transportasi, logistik, dan administrasi) mengingat Indonesia telah dikenal sebagai *planter* yang paling efisien dibandingkan beberapa produsen komoditas perkebunan seperti Amerika Latin dan Afrika. Keunggulan komparatif karena rendahnya biaya produksi di tingkat kebun ini seharusnya dapat ditransfer sampai pada kegiatan pemasaran dengan cara mengurangi faktor non teknis, seperti biaya siluman dan bahkan pajak ekspor di bidang perdagangan. *Kedua*, upaya pendalaman (*deepening*) pada beberapa komoditas strategis dengan meningkatkan program-program diversifikasi produk dan percepatan pertumbuhan sektor hilir. Upaya ini, walaupun beskala jangka panjang, sangat bermanfaat untuk menambah daya tahan industri komoditas perkebunan dari gejolak pasar internasional produk hilir. Selain meningkatkan nilai tambah (*added-value*) dapat dilaksanakan di dalam negeri, tenaga kerja produktif yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi.

Menurut Duft dalam Hill. Hall (2002), diversifikasi berarti tampil dalam berbagai jenis bentuk. Pada umumnya, diversifikasi berhubungan dengan jenis-jenis produk atau jasa yang berbeda-beda dalam suatu penawaran bisnis. Melakukan diversifikasi juga berarti bergerak pada beberapa lini produk. Diversifikasi merupakan salah satu cara untuk mengeleminasi dampak negatif atau risiko yang dihadapi seorang pengusaha agribisnis. Menurut Barghouti (1992), su diversifikasi dapat didekati pada empat tingkatan, yakni tingkatan usahatani, regional, sektoral dan intersektoral. Diversifikasi menjadi tidak populer karena meningkatnya tekanan efisiensi, sehingga spesialisasi pada suatu lini produk, yang memiliki keunggulan kompotitif, menjadi suatu pilihan.

Produk minyak kelapa sawit berpotensi besar untuk dijadikan andalan ekspor di luar minyak dan gas bumi, dan bisa menggeser posisi industri



Ekspor hasil kayu dan tekstil yang kini sedang mengalami perlambatan. Dari sisi penawaran, ekspor produk-produk kelapa sawit mengalami peningkatan yang sangat mengagumkan, terutama pada lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) meningkat sebesar 21,2 persen per tahun (Sustanil Arifin, 2001). Kecenderungan ini pasti akan meningkat, mengingat pertumbuhan investasi, areal tanam serta produksi kelapa sawit nasional juga meningkat.

Khusus di daerah Riau sejak pertengahan tahun 1980-an dikembangkan subsektor perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit, karet dan kelapa. Kegiatan ini menyebabkan penanaman investasi di daerah Riau semakin pesat. Sejak dikembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau menunjukkan dampak terhadap ekonomi masyarakat Riau, karena perkebunan ini terasa memberikan tetesan langsung kepada masyarakat. Berbeda halnya dengan investasi di sektor industri dan perminyakan yang hanya melibatkan golongan tertentu. Perkembangan investasi ini juga memberi peningkatan perkembangan ekspor, terutama ekspor non migas yang berasal dari sektor pertanian.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi para investor menanam modalnya di Riau. Motivasi yang *pertama*, untuk menunjang kebutuhan industri minyak, hal ini terlihat dalam investasi dan ekspor perlengkapan penambangan minyak, besi, dan baja (terutama pipa logam); *kedua*, untuk memenuhi keperluan pasar Singapura berupa hasil pertanian dan pangan, pariwisata dan pakaian; *ketiga*, untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dan tenaga kerja yang lebih murah; *keempat*, untuk mengantisipasi pertumbuhan Batam dan sekitarnya dengan terjun dibidang real estate, kawasan industri, tempat-tempat wisata dan proyek infrastruktur yang lain.

H. Pembangunan Pertanian Berbasis Agribisnis

Program pembangunan pertanian pada hakikatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan pertanian jangka panjang yaitu sektor agribisnis sebagai



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

andalan pembangunan nasional (Departemen Pertanian, 2004).

Program pengembangan agribisnis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis, yang mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Tujuan program ini adalah mengembangkan, antara lain: 1) subsistem hulu; 2) subsistem *on-farm*; 3) subsistem pengolahan; 4) subsistem pemasaran; dan 5) subsistem penunjang sebagai satu kesatuan sistem yang sinergis. Sasaran program adalah berkembangnya: 1) semua subsistem agribisnis secara serasi dan seimbang; dan 2) usaha-usaha agribisnis (Departemen Pertanian, 2001).

Sektor agribisnis merupakan lapangan kerja yang berperan besar dalam penurunan tingkat pengangguran. Karena itu pengembangan pertanian sudah seharusnya dipusatkan kepada pengembangan produktivitas yang dicapai melalui manajemen agribisnis yang ditata dengan baik. Agribisnis mencakup keseluruhan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usahatani dan pemasarannya sehingga produksinya sampai pada konsumen akhir. Agribisnis meliputi seluruh sektor bahan masukan usahatani, terlibat dalam proses produksi, dan pada akhirnya menangani pemrosesan, penyebaran, penjualan secara borongan dan enceran produk kepada konsumen akhir. Agribisnis merupakan sektor perekonomian yang menghasilkan dan mendistribusikan masukan bagi pengusahatani, memasarkan, dan memproses serta mendistribusikan produk usahatani kepada pemakai akhir (Downey, W. David, Steven P Erickson, 1987)

Dimasa lalu (PJP I), sebagian rakyat kita berada pada mata rantai yang memberikan nilai tambah kecil (pertanian primer) dalam keseluruhan kegiatan ekonomi yang berbasis pertanian, mulai dari industri hulu hingga hilir, sehingga wajar jika pendapatan petani kita rendah. Sementara mereka yang menguasai mata rantai kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah terbesar seperti industri hulu dan hilir pertanian beserta kegiatan perdagangannya, mampu berkembang dan menjadi konglomerat besar. Oleh sebab itu kita perlu memperkuat ekonomi rakyat agar mampu merebut nilai tambah yang besar. Menurut Bungaran Saragih (2001b) dalam upaya



Penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*). Industrialisasi menjamin iklim makro kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat cara riil diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian.

Lebih lanjut Bungaran Saragih (2001a) menyatakan, cara yang paling efektif dan efisien untuk memberdayakan ekonomi rakyat adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat yaitu sektor agribisnis. Dengan perkataan lain, pembangunan ekonomi nasional yang memberikan prioritas pada pengembangan sektor agribisnis merupakan syarat keharusan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, bahkan pemberdayaan ekonomi nasional. Saat ini sektor agribisnis Indonesia memungkinkan untuk mampu bersaing guna merebut peluang pasar pada era perdagangan bebas. Di luar sektor agribisnis, bukan hanya sulit bersaing tetapi juga tidak mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Pemihakan kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor agribisnis di level makro perlu disertai dengan upaya mikro agar manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. Pengalaman lalu menunjukkan bahwa kontribusi yang besar sektor agribisnis dalam perekonomian nasional ternyata tidak diikuti peningkatan pendapatan petani yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keperpihakan pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Pembangunan pedesaan yang berbasis agribisnis harus dapat mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu konsep yang pernah dikemukakan oleh *Friedmann, J* dan *Mike Douglass* (1976) adalah pengembangan agropolitan. Dalam konsep tersebut dikemukakan bagaimana cara mempercepat pembangunan di pedesaan dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Untuk itu hal yang perlu dilakukan adalah: *Pertama*, merubah daerah pedesaan dengan cara memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (*urbanism*) yang telah disesuaikan pada lingkungan pedesaan tertentu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Bentuk ini tidak lagi mendorong perpindahan penduduk desa ke kota. Menanam modal di pedesaan merupakan salah satu cara menekan urbanisasi dan merubah tempat permukiman di desa menjadi suatu bentuk campuran yang dinamakan agropolis atau kota di ladang.

Kedua, memperluas hubungan sosial di pedesaan sampai keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas (*agropolitan district*).

Ketiga, memperkecil keretakan sosial (*social dislocation*) dalam proses pembangunan, yaitu: memelihara kesatuan keluarga, memperteguh rasa aman, dan memberi kepuasan pribadi dalam membangun masyarakat baru.

Keempat, menstabilisasikan pendapatan desa dan kota. Memperkecil perbedaannya dengan cara memperbanyak kesempatan kerja yang produktif di pedesaan, khususnya memadukan kegiatan pertanian dengan nonpertanian dalam lingkungan masyarakat yang sama.

Kelima, menggunakan tenaga kerja yang ada secara lebih efektif dengan mengarahkan pada usaha-usaha pengembangan sumberdaya di tiap-tiap agropolitan district, termasuk peningkatan hasil pertanian.

Keenam, merangkai *agropolitan district* menjadi jaringan regional dengan cara membangun dan memperbaiki sarana hubungan antara agropolitan district dengan kota.

Ketujuh, menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan lingkungan, sehingga dapat mengendalikan pemberian prioritas pembangunan serta pelaksanaannya pada penduduk daerahnya.

Kedelapan, menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membangun agropolitan dengan cara: a) menanam kembali bagian terbesar dari tabungan setempat di tiap-tiap distrik; b) mengadakan sistem bekerja sebagai pengganti pajak bagi semua anggota masyarakat yang telah dewasa; c) mengalihkan dana pembangunan dari pusat-pusat kota dan kawasan industri khusus untuk pembangunan agropolitan; dan d) memperbaiki nilai tukar barang-barang yang merugikan antara petani dan penduduk kota agar lebih menguntungkan petani.

Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan pedesaan selama ini mengacu kepada pembangunan sektor pertanian dan kemudian dikembangkan dalam bentuk agribisnis. Pembangunan pertanian yang dikembangkan dalam bentuk skala besar selama ini adalah subsektor



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

perkebunan yang salah satunya menjadi komoditi unggulan adalah kelapa sawit. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelapa sawit dapat memberikan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnya.

Hasil penelitian Elpawati (2000) bagi petani peserta pola PIR, petani kelapa sawit sudah berada pada kategori sejahtera. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengembangan usahatani di sekitar areal pola PIR untuk mempercepat difusi teknologi dan mencegah terjadinya kesenjangan teknologi antara petani PIR dengan petani non PIR. Untuk mendukung pengembangan usahatani tersebut, Juraemi (2003) mengungkapkan perlunya dikembangkan sistem pengolahan dan pemasaran yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani kelapa sawit. Untuk itu perlu dikembangkan industri hilir yang berbasis kelapa sawit di daerah pedesaan. Menurut Wiwit Suhartiningsih (2003), untuk pengembangan agroindustri berbasis kelapa sawit di Indonesia perlu dilakukan deregulasi dalam industri kelapa sawit. Untuk berinvestasi industri kelapa sawit di Indonesia selama ini, investor harus melewati 17 lembaga di pusat dan 27 lembaga di daerah. Hal ini akan menambah biaya perizinan bagi investor. Di Malaysia investor hanya berhubungan dengan *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB). Lebih lanjut Wiwit Suhartiningsih menganjurkan sebaiknya di Indonesia dibentuk *Indonesia Palm Oil Board* (IPOB). Dengan adanya dukungan industri pengolahan kelapa sawit di daerah yang berpotensi, maka diharapkan akan dapat menciptakan nilai tambah dan *multiplier effect* ekonomi.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Imron Zahri (2003), yaitu perlunya peningkatan pembinaan dan kinerja kelembagaan seperti koperasi dan kelompok tani. Perlu perbaikan pola kemitraan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan, pengembangan kemitraan dengan manajemen koperasi, dan pemberian lahan minimal 2 ha per rumah tangga petani, agar petani dapat hidup layak. Dari sisi lain Juraemi (2003) menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan konsep-konsep baru dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mampu memberdayakan petani di daerah pedesaan.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: *Pertama*, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; *Kedua*, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; *Ketiga*, pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan *keempat*, membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.

I. Indikator Pembangunan Pedesaan

Pembangunan ekonomi di pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebutuhan akan sarana untuk meningkatkan pendapatan keluarga tergantung kepada ketersediaan sumberdaya di pedesaan termasuk penyediaan modal untuk pengembangan usaha pedesaan. Keberhasilan pembangunan pedesaan dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain: tekanan penduduk, kegiatan dasar wilayah, pendapatan petani, perkembangan penduduk, perkebangan pusat pertumbuhan, kepadatan tenaga kerja, keadaan sosial ekonomi. Keberhasilan pembangunan pembangunan ekonomi pedesaan dapat diketahui dari angka multiplikasi efek ekonomi.

1. Tekanan Penduduk

Tekanan penduduk merupakan indeks yang dimaksudkan untuk menghitung dampak penduduk di lahan pertanian terhadap lahan tersebut. Makin besar jumlah penduduk makin besar pula kebutuhan sumberdaya, sehingga tekanan terhadap sumberdaya juga meningkat. Dengan kualitas penduduk yang rendah, kenaikan tekanan terhadap sumberdaya akan meningkat sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk. Tekanan penduduk



dapat diamati setiap tahun dengan menggunakan rumus:

$$TP = Zx \frac{f.P_0(1+r)^t}{L}$$

terangan:

- = Indeks tekanan penduduk;
- = Luas lahan minimal perpetani untuk dapat hidup layak;
- = Proporsi petani dalam populasi;
- = Jumlah penduduk pada waktu $t=0$;
- = Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun;
- = Rentang waktu dalam tahun
- = Total luas wilayah pertanian.

Hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan sebagai berikut:

$TP < 1$ Lahan masih dapat menampung lebih banyak penduduk petani

$TP > 1$ Tekanan penduduk melebihi kapasitas lahan

Sebagai catatan, besarnya nilai Z adalah luas lahan yang mampu memberikan hasil yang cukup (hidup yang layak bagi keluarga petani) sebesar 2,5 ha.

2. Kegiatan Dasar Wilayah

Indek ini digunakan untuk menentukan sektor ekonomi yang paling berpengaruh terhadap penduduk wilayah tertentu. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{M_i / M}{R_i / R}$$

Keterangan:

LQ_i = Koefisien lokasi

M_i = Jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalam sektor i pada satu wilayah pengamatan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- M = Jumlah tenaga kerja yang ada di satu wilayah pengamatan tersebut.
 R_1 = Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor I pada seluruh wilayah pengamatan.
 R = Jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh wilayah pengamatan.
 $R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$

LQ dapat bernilai < 1 atau > 1 . Jika nilai LQ untuk sektor pertanian lebih besar dari satu, berarti sektor pertanian sangat penting dan masyarakat sangat tergantung pada sektor tersebut.

3. Tingkat Pendapatan Petani

Sebagai tolok ukur kesejahteraan petani, jumlah pendapatan per kapita petani dihitung dari gabungan pendapatan yang diperoleh dari hasil usahatani dan hasil di luar usahatani dibagi jumlah anggota keluarga yang ada di dalam tanggungannya. Tingkat pendapatan digunakan untuk menentukan apakah bantuan yang diberikan kepada petani sebaiknya berupa bantuan penuh dari pemerintah, subsidi atau pemberian kredit atau petani dapat menanggung seluruh biaya.

4. Perkembangan Penduduk dan Kesejahteraan

Analisis perkembangan penduduk dan kesejahteraannya diharapkan memberikan informasi tingkat perkembangan penduduk dan tingkat kesejahteraan pada masing-masing wilayah yang diamati. Dengan informasi tersebut dapat diketahui gambaran homogenitas dari wilayah yang diamati secara menyeluruh. Parameter yang banyak terkait dalam perkembangan penduduk dan kesejahteraan antara lain: jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk, jumlah tenaga kerja produktif bruto, kepadatan tenaga kerja produktif, dan pendapatan per kapita.

Guna mengetahui tingkat kemakmuran dan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama di sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan pengujian dengan rumus sebagai berikut (Todaro, Michael P, 2000):



$$G = w_1 g_1 + w_2 g_2 + \dots + w_i g_i$$

G adalah indeks pertumbuhan kesejahteraan sosial; g_i adalah tingkat pertumbuhan sosial quantile ke i ; dan w_i merupakan bobot kesejahteraan kelompok quantile ke i .

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi di pedesaan ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai indeks pertumbuhan kesejahteraan (G) dari periode ke periode.

Pusat Pertumbuhan Wilayah

Analisis pusat pertumbuhan wilayah untuk memberikan gambaran dan informasi perkembangan wilayah yang lain dalam satu kesatuan wilayah administratif. Parameter yang digunakan pada analisis adalah fungsi pelayanan di wilayah yang diamati seperti: prasarana ekonomi (bank, pasar, dll.), prasarana komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

6. Kerapatan Tenaga Kerja

Jumlah gambaran tenaga kerja yang produktif tersedia dalam wilayah didapatkan dari perhitungan jumlah penduduk yang berusia antara 16 s/d 55 tahun. Klasifikasi umur tersebut dikategorikan sebagai angkatan kerja produktif, sedang yang berumur di bawah 16 tahun dan di atas 55 tahun dikategorikan sebagai angkatan kerja tidak produktif. Karena keadaan tersebut berada dalam satu wilayah maka tenaga kerja tidak produktif menjadi beban tanggungan tenaga kerja produktif untuk menopang kehidupannya.

Analisis ini menggunakan indikator tenaga kerja, yaitu: beban tanggungan tenaga produktif, kerapatan tenaga kerja geografis, kerapatan tenaga kerja agraris, kepadatan penduduk geografis, dan kepadatan penduduk agraris.

Kerapatan tenaga kerja (KTK) geografis

$$KTK_g = \frac{TK_{tp}}{L_g}$$



Kerapatan tenaga kerja (KTK) agraris:

$$KTK_a = \frac{TK_{tp}}{L_a}$$

Keterangan: KTK_g merupakan kerapatan tenaga kerja geografis; KTK_a adalah kerapatan tenaga kerja agraris; TK_{tp} adalah tenaga kerja tidak produktif; L_g luas wilayah geografis; L_a adalah luas lahan agraris.

7. Indek Daya Dukung Lahan

Guna mengetahui kemampuan lahan dalam menyediakan kehidupan yang layak di pedesaan dilakukan dengan analisis daya dukung lahan (DDL). Data yang diperlukan adalah data sosial ekonomi antara lain: luas lahan garapan, jenis tanaman pangan yang diusahakan, produksi dan produktivitas tanaman, persentase tingkat konsumsi minimum dari semua jenis tanaman pangan yang diusahakan dalam menu makanan penduduk per tahun, serta konsumsi per kapita per hari (kkal).

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan rumus daya dukung lahan murni sebagai berikut (Soemarwoto, 2001):

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n A_{si} \cdot Y_{si}}{\sum_{i=1}^n C_{si}} \times \frac{1}{R}$$

Keterangan: K=daya dukung lahan (orang/ha); ASi =luas lahan yang ditanami dengan jenis tanaman Si (ha); Ysi =produksi bersih tanaman pangan Si (kkal/tahun); Csi =tingkat konsumsi untuk masing-masing jenis tanaman pangan dalam menu penduduk (%kkal/tahun); dan R =kebutuhan kalori rata-rata per orang (kkal/orang/tahun).

8. Peta keadaan Sosial Ekonomi

Untuk mempermudah informasi dalam penentuan rencana pembangunan pedesaan yang bersifat teknis, informasi sosial ekonomi digambarkan dalam



Bentuk peta sosial ekonomi. Variabel-variabel yang digambarkan dalam peta sosial ekonomi adalah variabel-variabel dasar sosial ekonomi setempat meliputi: tekanan penduduk (TP), kegiatan dasar wilayah (ketergantungan terhadap sumber pendapatan) (LQ), pendapatan petani (P), pusat pertumbuhan wilayah (T), perkembangan penduduk dan kesejahteraan (L), dan kepadatan tenaga kerja (TK). Secara sederhana variabel sosial ekonomi dapat dituliskan pada peta sebagai berikut :

$$\frac{TP;LQ;P}{TK;T;L}$$

<https://repository.unri.ac.id>



Hak cipta milik Universitas Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

